



Badan Ketahanan Pangan
Kementerian Pertanian

PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN

FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS

2018



PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN

FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS

2018

Badan Ketahanan Pangan
Kementerian Pertanian



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN/ KETUA HARIAN DEWAN KETAHANAN PANGAN

Pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan selama 4 tahun terakhir ini telah berhasil menghantarkan Indonesia mencapai swasembada beberapa komoditas strategis yaitu beras, bawang merah, cabai dan jagung. Tidak hanya dalam aspek ketersediaan saja, pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan, infrastruktur untuk memperlancar distribusi pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasilnya, terlihat adanya perubahan yang signifikan selama 4 tahun terakhir, seperti penurunan angka kemiskinan pedesaan dari 17,77 juta jiwa menjadi 15,81 juta jiwa, peningkatan nilai tukar petani dari 102,03 menjadi 102,46, penurunan nilai inflasi kelompok bahan pangan dari 10,57 persen menjadi 1,29 persen serta peningkatan PDB sektor pertanian dari Rp 995 trilyun menjadi Rp 1.344 trilyun.

Saya dapat memahami jika keberhasilan pencapaian pembangunan belum dapat memuaskan semua pihak. Meskipun demikian, melalui Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas - FSVA*) ini, kita semua dapat mengukur status ketahanan pangan wilayah sekaligus mengevaluasi seberapa besar pencapaian pembangunan ketahanan pangan dan gizi yang telah dilakukan. FSVA 2018 jika dibandingkan dengan FSVA 2015 menunjukkan telah terjadi peningkatan status ketahanan pangan wilayah di 177 kabupaten.

Dengan bekal FSVA, saya mengharapkan pemerintah daerah dapat mengoptimalkan forum Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memperkuat koordinasi lintas program dan sektor. Fokus mengoptimalkan potensi dan sumberdaya yang dimilikinya untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi masyarakat di wilayah Prioritas 1 – Prioritas 3 agar upaya-upaya peningkatan ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan serta komitmen Indonesia dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) dapat terwujud.

Menteri Pertanian/
Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan

Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, MP

KATA PENGANTAR

KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN

Ketersediaan informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik sangat penting untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi, karena dapat memberikan arah dan rekomendasi kepada pembuat keputusan dalam penyusunan program, kebijakan, serta pelaksanaan intervensi di tingkat pusat dan daerah. UU No 18/2012 tentang Pangan dan PP No 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi mengamanatkan pula bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi yang kemudian dituangkan dalam Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*).

FSVA 2018 menunjukkan bahwa program pembangunan ketahanan pangan selama empat tahun telah berhasil meningkatkan status ketahanan pangan wilayah di 177 kabupaten. Aspek ketersediaan pangan di tingkat nasional mengalami peningkatan, kemiskinan telah berkurang, dan akses terhadap pangan meningkat. Saat ini lebih banyak rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas kesehatan dan angka harapan hidup mereka juga meningkat. Listrik telah menjangkau wilayah yang lebih luas.

Saya berharap, bahwa penyusunan FSVA tidak berhenti sampai kabupaten saja, tetapi juga mencakup sampai ke tingkat desa, sehingga setiap tingkatan pemerintahan (provinsi dan kabupaten/kota) dapat memprioritaskan dan mensinerjikan sumberdaya yang dimiliki untuk menurunkan tingkat kerentanan terhadap kerawanan pangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menghapuskan kemiskinan. Tidak hanya itu, dengan FSVA ini, pemantauan dini dapat lebih ditingkatkan lagi agar kejadian kerawanan pangan dapat dideteksi lebih dini, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih besar bagi korbannya, dengan mengembangkan mekanisme *one-step-up* secara lebih efektif.

Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Kelompok Kerja FSVA Nasional dari lintas Kementerian dan Lembaga, Perguruan Tinggi dan Dinas Ketahanan Pangan serta lembaga/unit kerja ketahanan pangan terkait di tingkat provinsi dan kabupaten atas kontribusinya dalam penyusunan FSVA 2018 ini. Kerja sama lebih lanjut yang sangat penting setelah FSVA ini berhasil disusun adalah melakukan upaya-upaya secara bersinergi di dalam intervensi penanganan kerentanan pangan pada daerah prioritas.

Kepala Badan Ketahanan Pangan/
Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan



Dr. Ir. Agung Hendriadi, M.Eng.

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Dasar Pemikiran untuk Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	2
1.2 Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi	4
1.3 Metodologi	6
BAB 2 KETERSEDIAAN PANGAN	15
2.1 Perkembangan Pertanian	15
2.2 Produksi Sereal dan Umbi-umbian Utama	19
2.3 Rasio Konsumsi Normatif Per Kapita terhadap Produksi	24
2.4 Pencapaian dalam Ketersediaan Pangan	25
2.5 Tantangan untuk Meningkatkan Ketersediaan Pangan	25
2.6 Kebijakan dan Strategi dalam Pengembangan Ketersediaan Pangan	27
BAB 3 AKSES TERHADAP PANGAN	31
3.1 Akses terhadap Listrik	31
3.2 Kemiskinan	32
3.3 Pangsa Pengeluaran Pangan	38
3.4 Bantuan Sosial untuk Akses terhadap Pangan	40
3.5 Strategi untuk Peningkatan Akses	40
BAB 4 PEMANFAATAN PANGAN	51
4.1 Konsumsi Pangan	51
4.2 Tenaga Kesehatan	55
4.3 Akses ke Air Bersih	57
4.4 Lama Sekolah Perempuan di Atas 15 Tahun	58
4.5 Kebijakan dan Program	60
BAB 5 DAMPAK DARI STATUS GIZI DAN KESEHATAN	71
5.1 Dampak (Outcome) dari Status Gizi	72
5.2 Dampak (Outcome) dari Status Kesehatan	78
5.3 Pencapaian Bidang Kesehatan	81
5.4 Strategi untuk Memperbaiki Status Gizi dan Kesehatan	86

BAB 6	FAKTOR IKLIM DAN LINGKUNGAN YANG MEMPENGARUHI KETAHANAN PANGAN	93
6.1	Bencana Alam	94
6.2	Variabilitas Curah Hujan	95
6.3	Kehilangan Produksi yang Disebabkan oleh Kekeringan, Banjir dan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	96
BAB 7	ANALISIS KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOMPOSIT	101
7.1	Ketahanan Pangan di Indonesia	101
7.2	Perubahan Tingkat Kerentanan terhadap Ketahanan Pangan Kronis Tahun 2015-2018	109
BAB 8	KEBIJAKAN STRATEGIS PANGAN DAN GIZI	117
8.1	Strategi untuk Ketahanan Pangan Berkelanjutan	117
8.2	Kerjasama Lintas Progam dan Lintas Sektor	119
BAB 9	REKOMENDASI KEBIJAKAN	121
9.1	Wilayah Kabupaten	121
9.2	Wilayah Perkotaan	123

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Ringkasan Indikator FSVA	7
Tabel 1.2	<i>Cut off Point</i> Indikator Individu	9
Tabel 1.3	Bobot Indikator Individu	11
Tabel 1.4	<i>Cut off point</i> Komposit	12
Tabel 2.1	Produksi Serealia dan Umbi-umbian Utama, 2008 – 2017 (ribu ton)	19
Tabel 2.2	Perkembangan Luas Panen dan Produksi Padi 2018	21
Tabel 3.1	Persentase Rumah Tangga Tanpa Akses Listrik per Provinsi 2015-2017	31
Tabel 3.2	Jumlah dan Persentase Penduduk Hidup di Bawah Garis Kemiskinan per Provinsi 2014-2018	33
Tabel 3.3	Koefisien Gini per Provinsi 2014-2018	34
Tabel 3.4	Tingkat Pengangguran Terbuka per Provinsi 2014-2017	36
Tabel 3.5	Penduduk 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama 2014 – 2017	37
Tabel 3.6	Persentase Rumah Tangga dengan Pangsa Pengeluaran Pangan lebih dari 65% 2017	39
Tabel 3.7	Program Bantuan Pemerintah untuk Individu, Keluarga dan Kelompok Kurang Mampu 2017	42
Tabel 4.1	Konsumsi Energi per Kapita per Hari Menurut Provinsi 2017	52
Tabel 4.2	Konsumsi Energi per Kapita per Hari Menurut Kelompok Makanan dan Kuintil Pengeluaran 2017	54
Tabel 4.3	Konsumsi Protein per Kapita per Hari Menurut Kelompok Makanan dan Kuintil Pengeluaran 2017	54
Tabel 4.4	Rasio Jumlah Penduduk per Tenaga Kesehatan terhadap Kepadatan Penduduk 2017	56
Tabel 4.5	Persentase Rumah Tangga tanpa Akses ke Air Bersih 2016 – 2017	57
Tabel 4.6	Rata-rata Lama Sekolah Perempuan di Atas 15 Tahun 2017	59
Tabel 5.1	Klasifikasi WHO tentang Masalah Kesehatan Masyarakat untuk Prevalensi Kurang Gizi	73
Tabel 5.2	Prevalensi Kurang Gizi pada Balita menurut Provinsi 2017	73
Tabel 5.3	100 Kabupaten/Kota Prioritas untuk Intervensi Stunting 2018	75
Tabel 5.4	Angka Harapan Hidup Tingkat Provinsi 2017	79
Tabel 5.5	Persentase Penduduk yang mempunyai Keluhan Kesehatan Tingkat Provinsi 2014-2016	80
Tabel 6.1	Sepuluh Negara yang Mengalami Bencana Alam Terbanyak 2016	94
Tabel 6.2	Bencana Alam yang Terjadi di Indonesia dan Kerusakannya 2003-2017	94
Tabel 6.3	Perbandingan Area Puso Padi dan Jagung Akibat Banjir, Kekeringan dan Organisme Pengganggu Tanaman 2013-2017	97
Tabel 7.1	Klasifikasi Prioritas Berdasarkan Status Kabupaten (Tanpa Pemekaran, Induk dan Pemekaran)	103
Tabel 7.2	Sebaran Prioritas Kabupaten di Setiap Provinsi (Persentase)	104
Tabel 7.3	Nilai Rata-Rata Kelompok Kabupaten Prioritas Rentan dan Prioritas Tahan	105
Tabel 7.4	Sebaran Prioritas Kota di Setiap Provinsi (Persentase)	107

Tabel 7.5	Nilai Rata-rata Kelompok Kota Prioritas Rentan dan Prioritas Tahan	108
Tabel 7.6	Perubahan Tingkat Prioritas Kabupaten per Provinsi 2015 – 2018 (Persentase)	110
Tabel 7.7	Jumlah dan Persentase dari Kabupaten Tanpa Pemekaran dalam Kelompok-kelompok Prioritas	111
Tabel 8.1	Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi	117
Tabel 8.2	Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi	118
Tabel 9.1	Contoh Intervensi Penanganan Kerentanan Pangan Wilayah Kabupaten	123
Tabel 9.2	Contoh Intervensi Penanganan Kerentanan Pangan Wilayah Kota	125

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Kerangka Konseptual Ketahanan Pangan dan Gizi	5
Gambar 2.1	Produksi Peternakan 2008-2017	17
Gambar 2.2	Produksi Perikanan 2008-2017	17
Gambar 2.3	Produksi Beberapa Komoditas Sayuran 2008-2017	18
Gambar 2.4	Produksi Beberapa Komoditas Buah-buahan 2008-2017	18
Gambar 2.5	Produksi Serealia dan Umbi-umbian Utama 2008 – 2017	19
Gambar 2.6	Produksi Jagung di Beberapa Provinsi di Indonesia 2008 – 2017	20
Gambar 2.7	Produksi Jagung di Beberapa Provinsi di Indonesia 2008 – 2017	22
Gambar 2.8	Produksi Ubi Kayu di Beberapa Provinsi di Indonesia 2008 – 2017	23
Gambar 2.9	Produksi Ubi Jalar di Beberapa Provinsi di Indonesia 2004 – 2013	23
Gambar 3.1	Koefisien Gini dan Angka Kemiskinan 2014 – 2018	35
Gambar 3.2	Ketenagakerjaan Nasional per Sektor Agustus 2017	38
Gambar 5.1	Jumlah SDM di Indonesia 2016	81
Gambar 5.2	Jumlah Tenaga Medis di Indonesia 2016	82
Gambar 5.3	Rasio Dokter terhadap 100.000 Penduduk di Indonesia 2016	83
Gambar 5.4	Rasio dokter gigi per 100.000 Penduduk di Indonesia 2016	84
Gambar 5.5	Rasio Perawat per 100.000 Penduduk di Indonesia 2016	85
Gambar 5.6	Rasio Bidan per 100.000 Penduduk di Indonesia 2016	86
Gambar 6.1	Bencana Alam per Provinsi 2003 – 2017	95
Gambar 7.1	Jumlah Kabupaten Rentan di Prioritas 1 per Provinsi	102
Gambar 7.2	Jumlah Kabupaten Rentan di Prioritas 2 per Provinsi	102
Gambar 7.3	Jumlah Kabupaten Rentan di Prioritas 3 per Provinsi	103
Gambar 7.4	Jumlah Kota Rentan di Prioritas 1 per Provinsi	106
Gambar 7.5	Jumlah Kota Rentan di Prioritas 2 per Provinsi	106
Gambar 7.6	Jumlah Kota Rentan di Prioritas 3 per Provinsi	107
Gambar 8.1	Koordinasi Lintas Sektor dalam Penanganan Kerentanan Pangan	119
Gambar 9.1	Kerangka Intervensi untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan	122
Gambar 9.2	Kerangka Intervensi untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan	124

DAFTAR PETA

Peta 2.1	Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih sereal	29
Peta 3.1	Rumah tangga tanpa akses terhadap listrik	45
Peta 3.2	Penduduk hidup di bawah garis kemiskinan	47
Peta 3.3	Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran	49
Peta 4.1	Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk	65
Peta 4.2	Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih	67
Peta 4.3	Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun	69
Peta 5.1	Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting)	89
Peta 5.2	Angka harapan hidup	91
Peta 6.1	Peta proyeksi perubahan rata-rata curah hujan musiman periode 2032-2040 terhadap 2006-2014	99
Peta 7.1	Peta ketahanan dan kerentanan pangan 2018	113
Peta 7.2	Perubahan status prioritas kabupaten Antara FSVA 2015 dan FSVA 2018	115

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Data Indikator Individu dan Prioritas Ketahanan Pangan Komposit Wilayah Kabupaten	127
Lampiran 2	Data Indikator Individu dan Prioritas Ketahanan Pangan Komposit Wilayah Kota	138

RINGKASAN EKSEKUTIF

PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN

FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS (FSVA) 2018

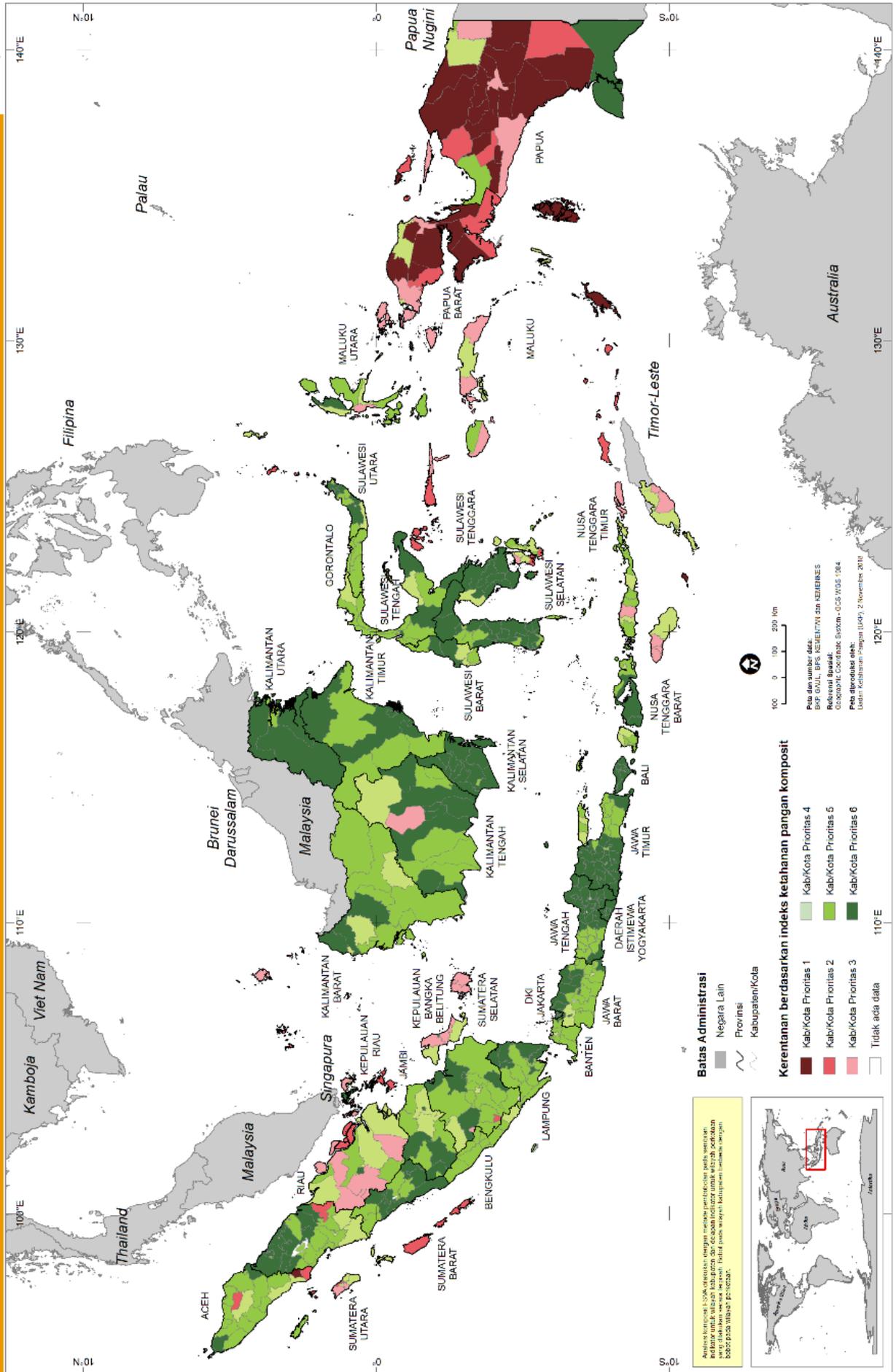
1. Ketersediaan informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik sangat penting untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi, karena dapat memberikan arah dan rekomendasi kepada pembuat keputusan dalam penyusunan program, kebijakan, serta pelaksanaan intervensi di tingkat pusat dan daerah. Penyediaan informasi diamanahkan dalam UU No 18/ 2012 tentang Pangan dan PP No 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi.
2. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*) merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan. Informasi dalam FSVA menjelaskan lokasi wilayah rentan terhadap kerawanan pangan dan indikator utama daerah tersebut rentan terhadap kerawanan pangan.
3. FSVA 2018 adalah pemutakhiran dari empat edisi sebelumnya. Pemutakhiran yang dilakukan meliputi metode analisis, indikator, dan data yang digunakan. Indikator yang digunakan dalam penyusunan FSVA merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator didasarkan pada: (i) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan (ii) tingkat sensitifitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; dan (iii) ketersediaan data tersedia secara rutin untuk periode tertentu yang mencakup seluruh wilayah kabupaten/kota. Sembilan indikator digunakan dalam penyusunan FSVA. Indikator pada aspek ketersediaan pangan adalah rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan padi, jagung, ubi kayu, dan ubi jalar. Indikator pada akses pangan adalah persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran, dan persentase rumah tangga tanpa akses listrik. Indikator pada aspek pemanfaatan pangan adalah rata-rata lama sekolah perempuan diatas 15 tahun, persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih, rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk, persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (*stunting*), dan angka harapan hidup pada saat lahir.
4. Kabupaten/kota diklasifikasikan dalam 6 kelompok ketahanan pangan dan gizi berdasarkan pada tingkat keparahan dan penyebab dari situasi ketahanan pangan dan gizi. Kabupaten/kota di Prioritas 1, 2 dan 3 merupakan wilayah rentan pangan dengan klasifikasi Prioritas 1 tingkat rentan pangan tinggi, Prioritas 2 rentan pangan sedang, dan Prioritas 3 rentan pangan rendah. Kabupaten/kota di Prioritas 4, 5, dan 6 merupakan wilayah tahan pangan dengan klasifikasi Prioritas 4 tahan pangan rendah, Prioritas 5 tahan pangan sedang, sedangkan Prioritas 6 yaitu tahan pangan tinggi.

5. Metode analisis yang digunakan dalam penyusunan FSVA adalah metode pembobotan dengan menggunakan *expert judgement*. FSVA 2018 mengakomodasi perkembangan wilayah kabupaten/kota hasil pemekaran wilayah. Wilayah yang dianalisis dalam FSVA 2018 sebanyak 514 kabupaten/kota, terdiri dari 416 kabupaten dan 98 kota. Analisis komposit dibedakan antara wilayah kabupaten dan perkotaan.
6. Hasil analisis FSVA tahun 2018 menunjukkan bahwa kabupaten rentan pangan Prioritas 1-3 sebanyak 81 kabupaten dari 416 kabupaten (19%) yang terdiri dari 26 kabupaten (6%) Prioritas 1; 21 kabupaten (5%) Prioritas 2; dan 34 kabupaten (8%) Prioritas 3. Kabupaten Prioritas 1 tersebar di 17 kabupaten di Provinsi Papua, 6 Kabupaten di Provinsi Papua Barat, 2 kabupaten di Provinsi Maluku, dan 1 kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Karakteristik kabupaten rentan pangan ditandai dengan rasio konsumsi terhadap ketersediaan pangan tinggi, persentase balita *stunting* tinggi, serta angka kemiskinan yang tinggi.
7. Sementara itu, Kota Rentan Pangan Prioritas 1-3 sebanyak 7 Kota dari 98 kota di Indonesia (7,14%). Pada wilayah perkotaan, terdapat 2 kota (2%) Prioritas 1, yaitu Kota Subulussalam di Aceh dan Kota Tual di Maluku; 2 kota (2%) Prioritas 2, yaitu Kota Gunung Sitoli di Sumatera Utara dan Kota Pagar Alam di Sumatera Selatan; serta 3 kota (3%) Prioritas 3, yaitu Kota Tanjung Balai di Sumatera Utara, Lubuk Linggau di Sumatera Selatan, dan Tidore Kepulauan (Maluku Utara). Karakteristik kota rentan pangan ditandai dengan rumah tangga dengan pangsa pengeluaran pangan yang tinggi, akses air bersih yang rendah, dan balita *stunting* yang tinggi.
8. Program pembangunan pertanian selama empat tahun telah berhasil meningkatkan status ketahanan pangan wilayah di 177 kabupaten:
 - a. Kabupaten rentan pangan yang naik peringkat sebanyak 75 kabupaten (19%) dengan rincian: Prioritas 2 ke Prioritas 3 sebanyak 18 kabupaten, Prioritas 2 ke Prioritas 4 sebanyak 5 kabupaten, Prioritas 2 ke Prioritas 5 sebanyak 2 kabupaten. Kabupaten Prioritas 3 yang meningkat ke Prioritas 4 sebanyak 14 kabupaten, Prioritas 3 ke Prioritas 5 sebanyak 23 kabupaten, dan Prioritas 3 ke Prioritas 6 sebanyak 13 kabupaten.
 - b. Kabupaten tahan pangan yang naik peringkat sebanyak 102 kabupaten (26%) dengan rincian: Prioritas 4 ke Prioritas 5 sebanyak 49 kabupaten, Prioritas 4 ke Prioritas 6 sebanyak 26 kabupaten, sedangkan Prioritas 5 ke Prioritas 6 sebanyak 27 kabupaten.
9. Fokus lokasi penanganan kerentanan pangan di wilayah kabupaten diprioritaskan pada:
 - a. Kabupaten-kabupaten yang terletak di Kawasan Indonesia Timur yang memiliki daerah Prioritas 1-3 terbesar
 - b. Kabupaten-kabupaten yang lokasinya jauh dari ibu kota provinsi/daerah perbatasan yang rata-rata memiliki tingkat ketahanan pangan lebih rendah dibandingkan kabupaten lain.
 - c. Kabupaten-kabupaten di Kepulauan dengan tingkat kerentanan pangan tinggi
 - d. Kabupaten pemekaran dengan tingkat kerentanan pangan tinggi
10. Penanganan kerentanan pangan di wilayah perkotaan diprioritaskan pada:
 - a. Kota-kota yang memiliki keterbatasan akses terhadap pangan (infrastruktur, stabilisasi pasokan, dan daya beli).

- b. Kota-kota yang memiliki keterbatasan pemanfaatan pangan (kualitas sumberdaya manusia dan sanitasi).
11. Program-program peningkatan ketahanan pangan dan menangani kerentanan pangan wilayah kabupaten diarahkan pada kegiatan:
- a. Peningkatan penyediaan pangan di daerah non sentra produksi dengan mengoptimalkan sumberdaya pangan lokal
 - b. Penanganan stunting diantaranya melalui sosialisasi dan penyuluhan tentang gizi dan pola asuh anak; penyediaan fasilitas dan layanan air bersih
 - c. Penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan; pembangunan infrastruktur dasar (jalan, listrik, rumah sakit), dan pemberian bantuan sosial; serta pembangunan usaha produktif/UMKM/padat karya untuk menggerakkan ekonomi wilayah
 - d. Peningkatan akses air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih; sosialisasi dan penyuluhan
 - e. Penurunan pangsa pengeluaran pangan melalui sosialisasi pola konsumsi pangan (B2SA) serta peningkatan kesempatan kerja
 - f. Peningkatan pendapatan
 - g. Peningkatan pendidikan perempuan
 - h. Penyediaan tenaga kesehatan
12. Program-program penanganan kerentanan pangan di daerah perkotaan diarahkan pada kegiatan:
- a. Peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat sehingga meningkatkan daya beli masyarakat
 - b. Sosialisasi pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman
 - c. Peningkatan akses rumah tangga terhadap air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih
 - d. Peningkatan sanitasi lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat melalui sosialisasi dan penyuluhan
 - e. Penanganan balita stunting melalui intervensi program gizi baik spesifik maupun sensitif.



Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 2018



BAB 1

PENDAHULUAN

Dimensi pembangunan diarahkan pada kebijakan dan program peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Sumberdaya manusia tangguh dan unggul ditentukan oleh asupan gizi yang dipenuhi dari kecukupan pangan, sebagai komponen dasar tumbuh kembang sejak usia anak-anak hingga dewasa. Kecukupan gizi akan meningkatkan kecerdasan manusia, menyehatkan fisik serta menguatkan mental dan perilakunya, sehingga tidak dapat ditunda pemenuhannya.

Kecukupan gizi dipenuhi dari pangan. Pangan berkualitas tidak hanya dinilai dari sisi jumlah, tetapi juga dari sisi keragaman baik jenis maupun kandungan gizi, serta jaminan keamanannya. Dengan demikian, pangan berkontribusi nyata terhadap pembentukan generasi yang berkualitas asalkan tersedia, terjangkau dan dimanfaatkan dengan baik melalui pengolahan yang aman dan tepat serta dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, pembangunan pertanian seyogyanya diarahkan pada peningkatan produksi pangan yang beragam dan pemanfaatan pangan yang berkualitas.

Meskipun dari sisi ketersediaan pangan telah mencukupi, Indonesia masih dihadapkan pada tantangan pemanfaatan pangan dan gizi. Situasi konsumsi pangan di Indonesia yang diindikasikan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan juga masih menunjukkan kondisi yang belum ideal. Pada tahun 2017, skor PPH sebesar 90,4 dimana situasi konsumsi masyarakat Indonesia masih didominasi oleh kelompok padi-padian, yaitu sebesar 62,1 persen. Angka ini lebih besar jika dibandingkan dengan angka yang direkomendasikan, yaitu sebesar 50 persen. Sementara itu, konsumsi pada kelompok umbi-umbian mencapai 3,3 persen, pangan hewani 11,2 persen, kacang-kacangan 3,1 persen, serta sayur dan buah 5,4 persen. Angka tersebut masih belum mencapai konsumsi yang direkomendasikan, yaitu sebesar 6 persen untuk umbi-umbian, 12 persen untuk pangan hewani, 5 persen untuk kacang-kacangan, dan 6 persen untuk sayur dan buah (BKP 2018).

Selain tantangan pemanfaatan pangan dan gizi, Indonesia juga menghadapi tantangan pemenuhan kebutuhan pangan masa depan seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan perubahan gaya hidup. Hasil Sensus Penduduk 2010 mencatat bahwa jumlah penduduk Indonesia sebesar 237 juta jiwa. Jumlah tersebut diproyeksikan akan terus meningkat dimana pada tahun 2035 penduduk Indonesia akan mencapai 305,65 juta jiwa. Selain itu, pergeseran penduduk desa-kota dan gaya hidup juga ikut mempengaruhi upaya pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Pada tahun 2010, persentase penduduk kota sebesar 49,8 persen. Angka tersebut meningkat pada tahun 2015 menjadi 53,3 persen dan diproyeksikan akan mencapai lebih dari 60 persen pada tahun 2035 (BPS 2013). Tantangan dan permasalahan lain yang mungkin timbul adalah persaingan penggunaan sumberdaya lahan, alih fungsi lahan yang relatif besar, ancaman perubahan iklim (iklim ekstrim), dan lain-lain yang menyebabkan terjadinya degradasi kualitas sumberdaya pertanian dan infrastruktur pendukungnya.

Dalam kondisi permintaan terhadap pangan yang terus bertambah, meningkatnya kebutuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang mulai melambat, maka ketahanan pangan dan gizi akan tetap menjadi perhatian utama. Perubahan situasi yang terjadi perlu diantisipasi agar tidak berpengaruh terhadap status ketahanan pangan dan gizi.

Pada tahun 2017, Indonesia berada pada urutan ke-69 dari 113 negara berdasarkan *Global Food Security Index* yang diukur dari ketersediaan pangan, keterjangkauan, keamanan dan kualitas pangan (EIU 2017). Terjadi perbaikan peringkat dibandingkan tahun 2016, dimana Indonesia menduduki peringkat 71 (EIU 2016). Sementara itu, *Global Hunger Index* (GHI) yang disusun oleh *International Food Policy Research Institute* (IFPRI) menggunakan empat aspek untuk menilai ketahanan pangan suatu negara, yaitu: proporsi *undernourishment*, balita *wasting*, balita *stunting*, dan angka kematian bayi. Indeks GHI sebesar 22 menempatkan Indonesia pada peringkat ke-72 dari 119 negara (IFPRI 2017). Indeks ketahanan pangan lainnya adalah *Rice Bowl Index* (RBI) yang dikembangkan untuk menilai sejauh mana kapasitas suatu negara dalam mengatasi tantangan ketahanan pangan dan menempatkan Indonesia pada peringkat 10 dari 15 negara di Asia Pasifik (Syngenta dan FSG 2016).

Seiring dengan peningkatan volume dan nilai produksi pertanian, kesejahteraan petani juga mengalami perbaikan sebagaimana ditunjukkan oleh Nilai Tukar Usaha Pertanian (NUTP) pertanian sempit (tidak termasuk perikanan). Selain itu, persentase penduduk dengan konsumsi kalori kurang dari 1.400 kkal (70 persen AKG) per kapita mengalami trend yang menurun. Pada tahun 2013 persentase penduduk rawan sebesar 18,68 persen turun menjadi 12,69 persen pada tahun 2016 (BKP 2016). Penurunannya perlu terus didorong sehingga kualitas konsumsi penduduk Indonesia mengalami peningkatan. Selain itu, secara nasional angka gizi buruk masih cukup tinggi, dengan *stunting* (balita pendek) dan *wasting* (berat badan kurang) sebesar 29,6 dan 9,6 persen di tahun 2017. Pada saat yang sama, jumlah penduduk dewasa (usia di atas 18 tahun) di Indonesia yang mengalami obesitas juga mengalami peningkatan. Berdasarkan Pemantauan Status Gizi (PSG) Kementerian Kesehatan, sekitar 25,8 persen penduduk dewasa tergolong obesitas pada 2017. Jumlah itu melonjak dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 10,6 persen (Kemenkes 2018).

Pada sisi yang lain, sebagai negara yang terletak di wilayah *ring of fire* yang rawan bencana, Indonesia harus terus meningkatkan kesiapsiagaan terhadap kemungkinan terjadinya bencana serta potensi kerawanan pangan yang bersifat transien sebagai dampak bencana. Demikian halnya dengan antisipasi terhadap peningkatan anomali perubahan iklim yang semakin sulit diprediksi yang dapat menyebabkan kegagalan panen dan kerentanan pangan dan gizi masyarakat.

1.1. Dasar Pemikiran untuk Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

Pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah mengusung agenda pembangunan ketahanan pangan yang dituangkan dalam agenda ke-7 Nawa Cita dalam upaya mencapai kedaulatan pangan yang mencerminkan kekuatan dalam mengatur masalah pangan secara mandiri. Agenda ke-7 Nawa Cita kemudian diterjemahkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. RPJMN sebagai strategi kebijakan

untuk menyediakan pangan bagi seluruh penduduk Indonesia yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau.

Agenda pembangunan nasional tersebut juga selaras dengan agenda pembangunan global paska 2015 yang tertuang dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Tujuan ke-2 dari 17 tujuan yang ada di dalam SDGs menyebutkan komitmen masyarakat internasional untuk mengakhiri kelaparan, meraih keamanan pangan dan memperbaiki gizi, serta mempromosikan pertanian berkelanjutan. Langkah selanjutnya untuk memperkuat komitmen global ini adalah dengan mengintegrasikan SDGs ke dalam kebijakan pemerintah secara eksplisit untuk perencanaan, penganggaran, dan pengaturan kelembagaan baik di tingkat nasional maupun daerah. Tindakan penting yang perlu diambil adalah merancang mekanisme partisipatif untuk masyarakat sipil, sektor swasta, organisasi filantropi dalam rangka menggalang dukungan terhadap prioritas pembangunan nasional dan SDGs.

Dalam rangka mengantisipasi, mencegah dan menangani persoalan rawan pangan dan gizi buruk harus didukung oleh informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik. Informasi ketahanan pangan dapat dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen untuk mengelola krisis pangan dalam rangka upaya perlindungan/penghindaran dari krisis pangan dan gizi baik jangka pendek, menengah maupun panjang. Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 114 dan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Pasal 75 mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi, yang dapat digunakan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta sebagai sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan dan gizi.

Informasi tentang ketahanan dan kerentanan pangan penting untuk memberikan informasi kepada para pembuat keputusan dalam pembuatan program dan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun tingkat lokal, untuk lebih memprioritaskan intervensi dan program berdasarkan kebutuhan dan potensi dampak kerawanan pangan yang tinggi. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen untuk mengelola krisis pangan dalam rangka upaya perlindungan/penghindaran dari krisis pangan dan gizi baik jangka pendek, menengah maupun panjang.

Sejak tahun 2003, Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan salah satu badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, *World Food Programme* (WFP), untuk memperkuat pemahaman ini melalui pengembangan peta ketahanan pangan dan gizi. Peta ini berfungsi sebagai alat yang ampuh untuk meningkatkan pencapaian sasaran dan memberi informasi kepada proses pembuatan kebijakan di bidang ketahanan pangan dan gizi. Pada tahun 2005, kemitraan ini menghasilkan Peta Kerawanan Pangan (*Food Insecurity Atlas - FIA*) pertama yang mengidentifikasi 100 dari 265 kabupaten sebagai kabupaten yang relatif lebih rentan terhadap kerawanan pangan dan gizi. Pada tahun 2009, metodologi Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan telah disempurnakan dengan cakupan yang diperluas menjadi 346 kabupaten di 32 provinsi. Pada tahun 2015 kembali dilakukan pemutakhiran FSVa dengan memperluas cakupannya dengan memasukkan beberapa kabupaten baru, sehingga total kabupaten yang dianalisis berjumlah 398 yang tersebar di 32 provinsi. FSVa 2015 memberikan kontribusi langsung terhadap perubahan kebijakan penting termasuk integrasi kegiatan yang berhubungan dengan ketahanan pangan dan gizi ke

dalam rencana dan alokasi anggaran tahunan pemerintah. FSVA telah dimanfaatkan oleh banyak instansi, baik di tingkat pusat maupun daerah, sebagai dasar dalam menentukan target intervensi program, khususnya terkait penurunan angka kemiskinan, balita *stunting* dan angka rawan pangan. Badan Ketahanan Pangan memanfaatkan FSVA sebagai salah satu rujukan dalam menetapkan lokasi Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) serta pengembangan Kawasan Mandiri Pangan. Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi memanfaatkan FSVA sebagai dasar dalam Penanganan Daerah Rawan Pangan - Penanganan Daerah Tertinggal (PDRT-PDT). Kementerian Pendidikan Nasional memanfaatkan FSVA dalam rangka penentuan lokasi Program Gizi Anak Sekolah (PROGAS). Lembaga internasional seperti *World Food Programme* (WFP) memanfaatkan FSVA dalam menentukan lokasi intervensi kerentanan pangan di NTT, NTB, dan Papua, serta penentuan lokasi survey biaya pangan. Sementara di tingkat daerah, sebagian pemerintah daerah telah menjadikan hasil rekomendasi FSVA sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan program ketahanan pangan dan gizi. Selain itu, keberhasilan FSVA 2015 juga mendorong diadakannya pelatihan-pelatihan bagi para staff teknis provinsi dan kabupaten dalam bidang analisis ketahanan pangan dan gizi yang kemudian dilakukan penyusunan peta FSVA Provinsi dan FSVA Kabupaten yang dirilis dari tahun 2016 sampai tahun 2017.

Dibangun dari keberhasilan FIA 2005, FSVA 2009 dan 2015, maka pada tahun 2018 dilaksanakan pemutakhiran (*updating*) FSVA. FSVA 2018 memperluas cakupan analisis dengan memasukkan beberapa kabupaten baru yang terbentuk dalam beberapa tahun terakhir, sehingga kabupaten yang dianalisis sebanyak 416 kabupaten. Pada FSVA 2018 ini juga dilakukan analisis pada wilayah perkotaan yang pada FSVA sebelumnya tidak dianalisis, yaitu pada 98 kota di Indonesia. Sehingga total cakupan Kabupaten dan Kota yang dianalisis pada FSVA 2018 sebanyak 512 kabupaten/kota. Selain itu, pemutakhiran juga dilakukan pada metodologi analisis. Pemutakhiran ini dilakukan agar potret ketahanan dan kerentanan pangan di tingkat wilayah dapat digambarkan secara lebih akurat yang dapat mencerminkan kondisi dan fakta terbaru sebagai hasil dari pembangunan serta mengakomodasi pemekaran wilayah. FSVA merupakan produk dari partisipasi aktif seluruh *stakeholder* terkait ketahanan di tingkat pusat dan Dinas/Kantor Ketahanan Pangan provinsi di bawah koordinasi Badan Ketahanan Pangan Pusat.

1.2. Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi

Undang-Undang No. 18 tahun 2012 mendefinisikan Ketahanan Pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Kerangka konseptual ketahanan pangan dalam penyusunan FSVA 2018 dibangun berdasarkan tiga pilar ketahanan pangan: ketersediaan pangan, akses pangan dan pemanfaatan pangan, serta mengintegrasikan gizi dan kerentanan di dalam keseluruhan pilar tersebut. **Ketersediaan pangan** adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan, serta pemasukan pangan (termasuk didalamnya impor dan bantuan pangan) apabila kedua sumber utama

tidak dapat memenuhi kebutuhan. Ketersediaan pangan dapat dihitung pada tingkat nasional, regional, kabupaten dan tingkat masyarakat.

Akses pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan yang bergizi, melalui satu atau kombinasi dari berbagai sumber seperti: produksi dan persediaan sendiri, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu daerah tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu jika mereka tidak mampu secara fisik, ekonomi atau sosial, untuk mengakses jumlah dan keragaman makanan yang cukup.

Pemanfaatan pangan merujuk pada penggunaan pangan oleh rumah tangga dan kemampuan individu untuk menyerap dan memetabolisme zat gizi. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan dan penyiapan makanan, keamanan air untuk minum dan memasak, kondisi kebersihan, kebiasaan pemberian makan (terutama bagi individu dengan kebutuhan makanan khusus), distribusi makanan dalam rumah tangga sesuai dengan kebutuhan individu (pertumbuhan, kehamilan dan menyusui), dan status kesehatan setiap anggota rumah tangga. Mengingat peran yang besar dari seorang ibu dalam meningkatkan profil gizi keluarga, terutama untuk bayi dan anak-anak, pendidikan ibu sering digunakan sebagai salah satu proxy untuk mengukur pemanfaatan pangan rumah tangga.

Gambar 1.1 Kerangka Konseptual Ketahanan Pangan dan Gizi



Sumber: Dimodifikasi dari the Lancet, 2013: Executive Summary of the Lancet Maternal and Child Nutrition Series

Kinerja dari masing-masing pilar tersebut tercermin dalam hal stabilitas pasokan pangan, akses masyarakat terhadap pangan, serta pemanfaatan pangan (*food utilization*) termasuk pengaturan menu dan distribusi pangan dalam keluarga. Apabila salah satu atau lebih, dari ke tiga pilar tersebut tidak berfungsi dengan baik, maka akan berdampak pada status gizi dan kesehatan. **Dampak gizi dan kesehatan** merujuk pada status gizi individu, termasuk defisiensi mikronutrien, pencapaian morbiditas dan mortalitas. Faktor-faktor yang berhubungan dengan pangan, serta praktek-praktek perawatan umum, memiliki kontribusi terhadap dampak keadaan gizi pada kesehatan masyarakat dan penanganan penyakit yang lebih luas.

1.3. Metodologi

Kerawanan pangan dan gizi adalah masalah multi-dimensional yang memerlukan analisis dari sejumlah parameter yang berbeda yang berada di luar cakupan masalah produksi pangan semata, dengan tidak ada satu ukuran yang langsung dapat mengukur masalah ini. Kompleksitas masalah ketahanan pangan dan gizi dapat dikurangi dengan mengelompokkan indikator *proxy* ke dalam tiga kelompok yang berbeda tetapi saling berhubungan, yaitu ketersediaan pangan, akses rumah tangga terhadap pangan dan pemanfaatan pangan secara individu. Pertimbangan gizi, termasuk ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan bergizi tersebar dalam ketiga kelompok tersebut.

13 indikator yang dipilih telah melalui proses penelaahan Tim Pengarah dan Kelompok Kerja Teknis berdasarkan ketersediaan data di tingkat kabupaten serta kapasitas indikator-indikator tersebut dalam mencerminkan unsur-unsur inti dari tiga pilar ketahanan pangan dan gizi (Tabel 1.1). FSVA 2018 membagi indikator tersebut menjadi dua kelompok indikator, yaitu kerentanan terhadap kerawanan pangan dan gizi kronis dan kerawanan pangan transien. Kerentanan terhadap **kerawanan pangan dan gizi kronis** adalah ketidakmampuan jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum dan biasanya berhubungan dengan struktural dan faktor-faktor yang tidak berubah dengan cepat, seperti iklim setempat, jenis tanah, sistem pemerintahan daerah, infrastruktur publik, kepemilikan lahan, distribusi pendapatan, hubungan antar suku, tingkat pendidikan, dan lain-lain. Indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan dan gizi kronis, yaitu rasio konsumsi pangan terhadap produksi sereal, persentase penduduk miskin, pangsa pengeluaran pangan rumah tangga terhadap pengeluaran total, infrastruktur listrik, akses terhadap air minum dan fasilitas kesehatan, angka harapan hidup, tingkat pendidikan perempuan dan *stunting* pada balita. Peta ini memberikan gambaran masing-masing indikator serta analisis komposit dari 9 indikator ketahanan pangan dan gizi pada tingkat kabupaten. Masing-masing kabupaten dikelompokkan dalam 6 prioritas, kelompok yang paling rentan pangan (Prioritas 1) sampai dengan kelompok yang paling tahan pangan (Prioritas 6) berdasarkan analisis komposit. Kelompok Prioritas 1 dan 2 merupakan kabupaten-kabupaten yang paling rentan pangan, Prioritas 3 dan 4 merupakan kabupaten-kabupaten dalam kelompok ketahanan pangan sedang, sedangkan Prioritas 5 dan 6 merupakan yang paling rendah tingkat kerentanan pangannya (relatif tahan pangan).

Kerawanan pangan transien adalah ketidakmampuan sementara yang bersifat jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum yang sebagian besar berhubungan dengan faktor dinamis yang dapat berubah dengan cepat. Indikator yang digunakan meliputi data kejadian bencana

alam yang memiliki dampak terhadap ketahanan pangan, estimasi hilangnya produksi padi yang disebabkan oleh banjir dan kekeringan, dan variabilitas curah hujan. Perubahan faktor dinamis tersebut umumnya menyebabkan kenaikan harga pangan yang lebih mempengaruhi penduduk miskin dibandingkan penduduk kaya, mengingat sebagian besar dari pendapatan penduduk miskin digunakan untuk membeli makanan. Kerawanan pangan transien yang berulang dapat menyebabkan kerawanan aset rumah tangga, menurunnya ketahanan pangan dan akhirnya dapat menyebabkan kerawanan pangan kronis.

Indikator

Dibandingkan dengan FSVA 2015, terdapat beberapa perubahan indikator FSVA 2018, yaitu: i) pangsa pengeluaran pangan rumah tangga digunakan sebagai indikator menggantikan presentase desa dengan akses penghubung yang tidak memadai; ii) rata-rata lama sekolah perempuan diatas 15 tahun digunakan sebagai indikator menggantikan perempuan buta huruf; dan iii) rasio tenaga kesehatan digunakan untuk menggantikan persentase desa dengan jarak lebih dari 5 km dari fasilitas kesehatan. Perubahan indikator dilakukan berdasarkan kemampuannya untuk melihat kekurangan gizi jangka panjang, agar selaras dengan program pemerintah dan target *Sustainable Development Goals (SDGs)*, serta ketersediaan data pada tingkat kabupaten secara berkala.

Tabel I.1 Ringkasan Indikator FSVA

Indikator	Definisi	Sumber Data
Kerentanan terhadap Kerawanan Pangan dan Gizi Kronis		
Ketersediaan Pangan		
Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan bersih "beras + jagung + ubi jalar + ubi kayu"	Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan bersih serealida dan umbi-umbian utama (padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar). Konsumsi normatif serealida dan umbi-umbian utama adalah 300 gram/kapita/hari.	Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pertanian (Angka Tetap tahun 2014-2016)
Akses Pangan		
Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh seorang individu untuk hidup secara layak.	SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) 2017, BPS
Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran	Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk makanan lebih dari 65% dibandingkan dengan total pengeluaran rumah tangga (makanan dan non makanan).	SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) 2017, BPS
Persentase rumah tangga tanpa akses listrik	Persentase rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap listrik dari PLN dan/atau non PLN, misalnya generator.	SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) 2017, BPS

Indikator	Definisi	Sumber Data
Pemanfaatan Pangan		
Rata-rata lama sekolah perempuan diatas 15 tahun	Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk perempuan berusia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal.	SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) 2017, BPS
Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih	Persentase rumah tangga yang tidak memiliki akses ke air minum yang berasal dari leding meteran, leding eceran, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung dan air hujan (tidak termasuk air kemasan) dengan memperhatikan jarak ke jamban minimal 10 m.	SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) 2017, BPS
Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk	Total jumlah penduduk per jumlah tenaga kesehatan (dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, dan tenaga keteknisian medis) dibandingkan dengan tingkat kepadatan penduduk.	Profil Tenaga Kesehatan 2017, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes
Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (<i>stunting</i>)	Anak di bawah lima tahun yang tinggi badannya kurang dari -2 Standar Deviasi (-2 SD) dengan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dari referensi khusus untuk tinggi badan terhadap usia dan jenis kelamin (Standar WHO, 2005).	Data Pemantauan Status Gizi (PSG) 2017, Kementerian Kesehatan
Angka harapan hidup pada saat lahir	Perkiraan lama hidup rata-rata bayi baru lahir dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas sepanjang hidupnya.	SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) 2017, BPS
Kerentanan terhadap Kerawanan Pangan Transien		
Bencana alam yang terkait iklim	Bencana alam yang terkait iklim yang terjadi selama tahun 2014-2016 dan perkiraan dampaknya terhadap ketahanan pangan.	Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB), 2014-2017
Variabilitas curah hujan	Perubahan curah hujan bulanan yang disebabkan oleh perubahan suhu permukaan laut sebesar satu derajat celcius.	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), 2014-2017
Kehilangan produksi	Rata-rata hilangnya produksi tanaman pangan akibat banjir, kekeringan dan organisme pengganggu tanaman (OPT).	Kementerian Pertanian, 2014-2017

Metode Analisis

I. Analisis Indikator Individu

Analisis indikator individu dilakukan dengan mengelompokkan indikator individu kedalam beberapa kelas berdasarkan metode sebaran empiris atau mengikuti standar pengelompokkan yang sudah ditetapkan aturan nasional atau internasional yang berlaku. Penetapan range delapan indikator mengikuti pola sebaran empiris. Satu indikator yaitu presentase balita *stunting* mengikuti aturan *World Health Organization* (WHO). Klasifikasi penentuan *cut off point* indikator tercantum pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Cut off Point Indikator Individu

Indikator	Range
Ketersediaan Pangan	
	≥ 1,50
	1,25 - <1,50
	1,00 - <1,25
1. Rasio konsumsi normatif karbohidrat terhadap ketersediaan pangan	0,75 - <1,00
	0,50 - <0,75
	< 0,50
Akses terhadap Pangan	
	≥ 35
	25 - < 35
2. Persentase penduduk miskin	20 - < 25
	15 - < 20
	10 - < 15
	<10
	≥ 50
3. Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran	40 - <50
	30 - <40
	20 - <30
	10 - <20
	<10
	≥ 50
4. Persentase rumah tangga tanpa akses listrik	40 - < 50
	30 - < 40
	20 - < 30
	10 - < 20
	< 10
Pemanfaatan Pangan	
	< 6
	6 - < 6,5
5. Rata-rata lama sekolah perempuan diatas 15 tahun	6,5 - < 7,5
	7,5 - < 8,5
	8,5 - < 9
	≥ 9
	≥ 70
6. Persentase rumah tangga tanpa akses air bersih	60 - <70
	50 - <60
	40 - <50
	30 - <40
	< 30

Indikator	Range
7. Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk	≥30
	20 - <30
	15 - <20
	10 - <15
	5 - <10
8. Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (<i>stunting</i>)	<5
	≥ 40
	30 - < 39
	20 - < 29
9. Angka Harapan Hidup	< 20
	≤58
	>58 - 61
	>61 - 64
	>64 - 67
	>67 - 70
	> 70

2. Analisis Komposit

Berdasarkan kesepakatan dalam Kelompok Kerja Teknis FSVA, pendekatan metodologi yang diadopsi untuk analisis komposit adalah dengan menggunakan metode pembobotan. Metode pembobotan digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif indikator terhadap masing-masing aspek ketahanan pangan. Metode pembobotan dalam penyusunan FSVA mengacu pada metode yang dikembangkan oleh *The Economist Intelligence Unit* (EIU) dalam penyusunan *Global Food Security Index* (EIU 2016 dan 2017) dan *International Food Policy Research Institute* (IFPRI) dalam penyusunan *Global Hunger Index* (IFPRI 2017). Goodridge (2007) menyatakan jika variabel yang digunakan dalam perhitungan indeks berbeda, maka perlu dilakukan secara tertimbang (pembobotan) untuk membentuk indeks agregat yang disesuaikan dengan tujuannya.

Langkah-langkah perhitungan analisis komposit adalah sebagai berikut:

1. Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan *z-score* dan *distance to scale* (0 – 100)
2. Menghitung skor komposit kabupaten/kota dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator, dengan rumus:

$$Y(j) = \sum_{n=1}^9 a_i X_{ij} \dots \dots \dots (1)$$

Dimana:

Y_j : Skor komposit kabupaten/kota ke-j

a_i : Bobot masing-masing indikator

X_{ij} : Nilai standarisasi masing-masing indikator pada kabupaten/kota ke-j

Besaran bobot masing-masing indikator berdasarkan rekomendasi para ahli (*expert judgement*) yang berasal dari akademisi dan pemerintah (Tabel 1.3). Khusus untuk analisis wilayah perkotaan hanya digunakan delapan (8) indikator dari aspek keterjangkauan dan pemanfaatan pangan, mengingat

ketersediaan pangan di tingkat perkotaan tidak dipengaruhi oleh produksi yang berasal dari wilayah sendiri tetapi berasal dari perdagangan antar wilayah. Oleh karena itu, pada perhitungan komposit wilayah perkotaan indikator rasio konsumsi normatif terhadap ketersediaan bersih tidak digunakan. Nilai bobot 0,30 dari indikator aspek ketersediaan pangan kemudian dialihkan kepada 8 indikator lainnya secara proporsional berdasarkan masing-masing aspek. Bobot untuk setiap indikator mencerminkan signifikansi atau pentingnya indikator tersebut dalam menentukan tingkat ketahanan pangan suatu wilayah.

Tabel 1.3 Bobot Indikator Individu

No	Indikator	Bobot	
		Kabupaten	Kota
Aspek Ketersediaan Pangan			
1.	Rasio konsumsi normatif terhadap ketersediaan bersih per kapita per hari	0,30	-
Sub Total		0,30	-
Aspek Keterjangkauan Pangan			
2.	Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan	0,15	0,20
3.	Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran	0,075	0,125
4.	Persentase rumah tangga tanpa akses listrik	0,075	0,125
Sub Total		0,30	0,45
Aspek Pemanfaatan Pangan			
5	Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih	0,15	0,18
6	Angka harapan hidup pada saat lahir	0,10	0,13
7	Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun	0,05	0,08
8	Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk	0,05	0,08
9	Prevalensi balita <i>stunting</i>	0,05	0,08
Sub Total		0,40	0,55

3. Mengelompokkan kabupaten/kota ke dalam 6 kelompok prioritas berdasarkan *cut off point* komposit. Skor komposit yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan ke dalam 6 kelompok berdasarkan *cut off point* komposit. *Cut off point* komposit merupakan hasil penjumlahan dari masing-masing perkalian antara bobot indikator individu dengan *cut off point* indikator individu hasil standarisasi z-score dan *distance to scale* (0-100).

$$K(j) = \sum_{n=1}^9 a_i C_{ij} \dots\dots\dots (2)$$

Dimana:

K_j : *cut off point* komposit ke-j

a_i : Bobot indikator ke-i

C_{ij} : Nilai standarisasi *cut off point* indikator ke-l kelompok ke-j

Tabel 1.4 Cut off point Komposit

Kelompok IKP	Kabupaten	Kota
1	$\leq 41,52$	$\leq 28,84$
2	$> 41,52 - 51,42$	$> 28,84 - 41,44$
3	$> 51,42 - 59,58$	$> 41,44 - 51,29$
4	$> 59,58 - 67,75$	$> 51,29 - 61,13$
5	$> 67,75 - 75,68$	$> 61,13 - 70,64$
6	$> 75,68$	$> 70,64$

Wilayah yang masuk ke dalam kelompok 1 adalah kabupaten/kota yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripada kabupaten/kota dengan kelompok di atasnya, sebaliknya wilayah pada kelompok 6 merupakan kabupaten/kota yang memiliki ketahanan pangan paling baik. Penting untuk menegaskan kembali bahwa sebuah kabupaten/kota yang diidentifikasi sebagai relatif lebih tahan pangan (kelompok Prioritas 4-6), tidak berarti semua kecamatan, desa serta penduduk di dalamnya juga tahan pangan. Demikian juga, tidak semua kecamatan, desa serta penduduk di kabupaten Prioritas 1-3 tergolong rentan pangan. Untuk dapat mengidentifikasi daerah mana yang benar-benar rentan pangan pada level kecamatan dan desa, disarankan adanya tindak lanjut berupa pembuatan FSVA provinsi dan kabupaten.

3. Pemetaan

Hasil analisis indikator individu dan komposit kemudian divisualisasikan dalam bentuk peta. Peta-peta yang dihasilkan menggunakan pola warna seragam dalam gradasi warna merah dan hijau. Gradasi merah menunjukkan variasi tingkat kerentanan pangan tinggi dan gradasi hijau menggambarkan variasi kerentanan pangan rendah. Untuk kedua kelompok warna tersebut, warna yang semakin tua menunjukkan tingkat yang lebih tinggi dari ketahanan atau kerentanan pangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2012. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- Anonim. 2015. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
- [BKP] Badan Ketahanan Pangan. 2018. Direktori Perkembangan Konsumsi Pangan. Jakarta: BKP.
- [BKP] Badan Ketahanan Pangan. 2016. Persentase Penduduk Berdasarkan Konsumsi Total. Jakarta (ID): Badan Ketahanan Pangan. [BPS] Badan Pusat Statistik. 2013. Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035. Jakarta: BPS.
- [DKP dan WFP] Dewan Ketahanan Pangan dan World Food Programme. 2015. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia 2015. Jakarta (ID): Dewan Ketahanan Pangan dan World Food Programme.
- [EIU] The Economist Intelligence Unit. 2017. Global Food Security Index 2017, Measuring Food Security and The Impact of Resources Risks. Dupont (GB): London.
- [EIU] The Economist Intelligence Unit. 2016. Global Food Security Index 2016 an Annual Measure of The State of Global Food Security. Dupont (GB): London.
- Goodridge P. 2007. Method explained index number, economic and labour. *Market Review*. 1(3): 54-57.
- [IFPRI] International Food Policy Research Institute. 2014. Global Hunger Index: The Inequalities of Hunger. Washington DC (US): IFPRI.
- [Kemenkes] Kementerian Kesehatan. 2017. Buku Saku Pemantauan Status Gizi Tahun 2017. Jakarta: Kemenkes.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS. 2014. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2015-2019. Jakarta: Bappenas.
- Syngenta and Frontier Strategy Group. 2016. Rice Bowl Index 2016: Collective Responsibility. Singapore: Syngenta Asia Pacific Pte Ltd and Frontier Strategy Group.
- The Lancet. 2013. Executive Summary of The Lancet Maternal and Child Nutrition Series. www.thelancet.com
- [UN] United Nation. 2018. Sustainable Development Goals (SDGs). New York: UN.

BAB 2

KETERSEDIAAN PANGAN

Undang-undang Pangan No. 18 tahun 2012 mendefinisikan ketersediaan pangan sebagai kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan. Sedangkan cadangan pangan nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat. Penyediaan pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan secara berkelanjutan.

Bab ini akan menyajikan penjelasan mengenai situasi ketersediaan pangan di Indonesia pada tingkat nasional dengan mengevaluasi data produksi pertanian, termasuk peternakan, hortikultura dan perikanan, dengan analisis yang lebih mendalam terhadap produksi tanaman pangan dan umbi-umbian (padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar). Kemudian akan dijelaskan juga mengenai analisis ketersediaan pangan pada tingkat kabupaten untuk keempat komoditas tersebut yang mencakup 416 kabupaten. Keempat komoditas tersebut dipilih karena keterbatasan data komoditas lainnya, terutama untuk pangan spesifik lokal serta keempat komoditas tersebut menyumbang hampir 50 persen dari asupan kebutuhan energi per hari pada rata-rata konsumsi pangan masyarakat Indonesia. Data produksi keempat komoditas tersebut dikumpulkan secara rutin pada tingkat kabupaten. Ketersediaan serealida didapat dengan cara menghitung rasio antara konsumsi serealida per kapita dan produksi. Indikator ini merupakan salah satu dari sembilan indikator utama dalam analisis situasi kerentanan terhadap kerawanan pangan dan gizi wilayah. Indikator ini mengukur ketersediaan pangan di suatu wilayah namun tidak melihat dari sisi produksi pangan lokal. Analisis ini juga tidak memperhitungkan sumber pangan hewani, kacang-kacangan, buah-buahan, sayur-sayuran dan komoditas yang kaya gizi lainnya. Di dalam Bab ini juga membahas tantangan utama ketersediaan pangan di Indonesia dan sekaligus memberikan rekomendasi untuk mengatasinya.

2.1. Perkembangan Pertanian

Berbagai lembaga konservasi internasional melihat Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang berlimpah ruah di dunia. Indonesia memiliki kurang lebih 10% spesies tanaman berbunga dunia, 14% spesies ikan dunia, 12% spesies mamalia dunia dan 17% spesies burung dunia (CBD, 2018 dan Mongabay, 2018). Kekayaan hayati sudah dibudidayakan oleh masyarakat Indonesia untuk memproduksi pangan, baik dalam bentuk beras, gula, daging, telur, susu, ikan, sayur dan buah, serta bentuk lainnya. Masyarakat Indonesia telah mengkonsumsi tidak kurang dari 100 jenis

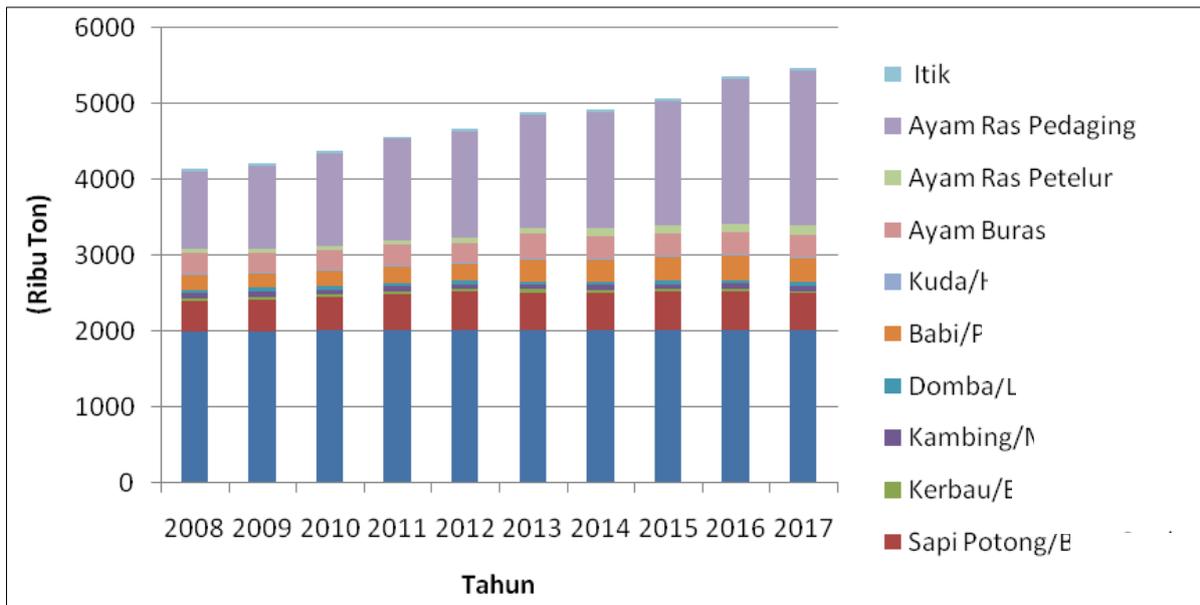
tumbuhan biji-bijian dan umbi-umbian untuk sumber karbohidrat. Tidak kurang dari 100 jenis kacang-kacangan, 450 jenis buah-buahan serta 250 jenis sayur-sayuran dan jamur juga digunakan dalam menu makanan masyarakat Indonesia (Bappenas, 2016).

Pada saat ini, pangan pokok untuk sebagian besar masyarakat Indonesia adalah beras. Selain pangan pokok utama beras, ada beberapa wilayah di Indonesia yang masih mengonsumsi jagung, ubi kayu, ubi jalar, keladi/talas dan sagu sebagai makanan pokok. Pada tahun 2017, produksi padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar secara keseluruhan memberikan kontribusi sebesar 60,23% dari total penyediaan energi per kapita per hari (BKP, 2017), dimana beras memiliki kontribusi yang lebih besar dalam penyediaan energi dibanding dengan jagung, ubi kayu dan ubi jalar. Gandum merupakan bahan pangan yang konsumsinya semakin meningkat di Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, maka impor gandum pada tahun 2017 mencapai 11,45 juta ton dan tepung terigu sebesar 0,86 juta ton (BPS, 2017).

Sebagian besar pangan pokok, seperti padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar, dapat memberikan kontribusi yang besar untuk asupan energi bagi masyarakat Indonesia, tetapi tidak memiliki kandungan vitamin dan mineral yang mencukupi. Kacang-kacangan, seperti kedelai, kacang tanah dan kacang hijau merupakan sumber protein nabati dan sudah menjadi bagian dari pola makan masyarakat Indonesia, terutama kedelai dalam bentuk tahu dan tempe. Meskipun demikian, produksi kedelai di Indonesia pada tahun 2017 hanya sebesar 0,54 juta ton, sehingga perlu mengimpor sekitar 2,71 juta ton untuk memenuhi kebutuhan domestik (BPS, 2017).

Produk peternakan dan perikanan merupakan sumber protein utama yang penting. Pada tahun 2017, produksi daging sebesar 3,47 juta ton yang terdiri dari 2,51 juta ton unggas dan 0,96 ton daging ruminansia (BPS, 2017). Hal ini mengindikasikan bahwa produksi unggas yang terdiri dari ayam ras, ayam buras dan bebek, mendominasi produksi peternakan. Data NBM 2015 angka tetap menunjukkan bahwa kontribusi produksi unggas sebesar 72,24% dari total penyediaan protein hewani asal ternak di Indonesia (BKP, 2017). Produksi peternakan rata-rata tumbuh sebesar 5,56% selama 2008-2017 (BPS, 2017). Meningkatnya standar hidup dan bergesernya preferensi makanan masyarakat turut meningkatkan permintaan pangan bersumber dari daging. Oleh karena itu, pemerintah telah membuat kebijakan terobosan untuk mendukung pertumbuhan produksi peternakan, yaitu melalui program SIWAB (Sapi Indukan Wajib Bunting) termasuk mendukung sistem peternakan skala kecil. Produksi daging sapi pada tahun 2017 sebesar 0,49 juta ton, namun produksi ini masih belum bisa mencukupi kebutuhan nasional sehingga perlu mengimpor 0,12 juta ton daging sapi (BPS, 2017). Perkembangan produksi peternakan dapat dilihat di Tabel 2.1. Sebagian besar produksi ternak masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan diikuti Pulau Sumatera. Produksi ternak dalam skala kecil terdapat di pulau Maluku, Kalimantan dan Sulawesi.

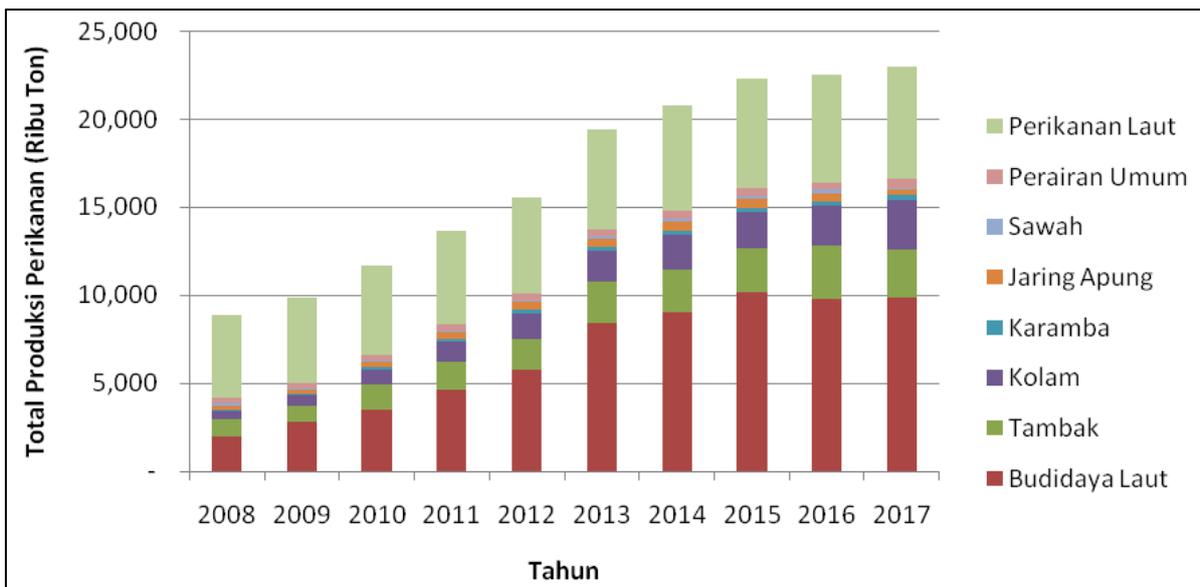
Gambar 2.1 Produksi Peternakan 2008-2017



Sumber: BPS, 2017

Produksi perikanan di Indonesia adalah salah satu yang terbesar di dunia dan diperkirakan telah menghasilkan lebih dari 22,98 juta ton tangkapan ikan pada tahun 2017(BPS, 2017) (Gambar 2.2). Berdasarkan data NBM 2015 angka tetap, ketersediaan ikan per kapita di Indonesia diperkirakan mencapai 45,61 kg per kapita per tahun (BKP, 2017), dimana sebagian besar produksi ikan terdapat di wilayah timur Indonesia. Hal ini menunjukkan pentingnya komoditas ikan dalam pola makan di daerah-daerah tersebut.

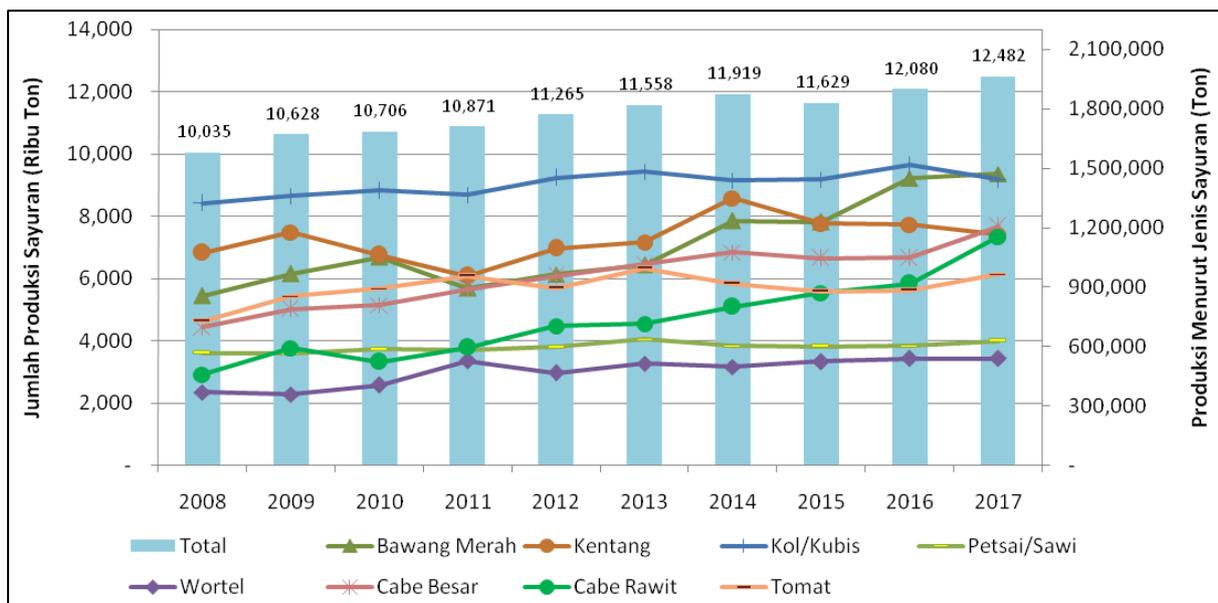
Gambar 2.2 Produksi Perikanan 2008-2017



Sumber: BPS, 2017

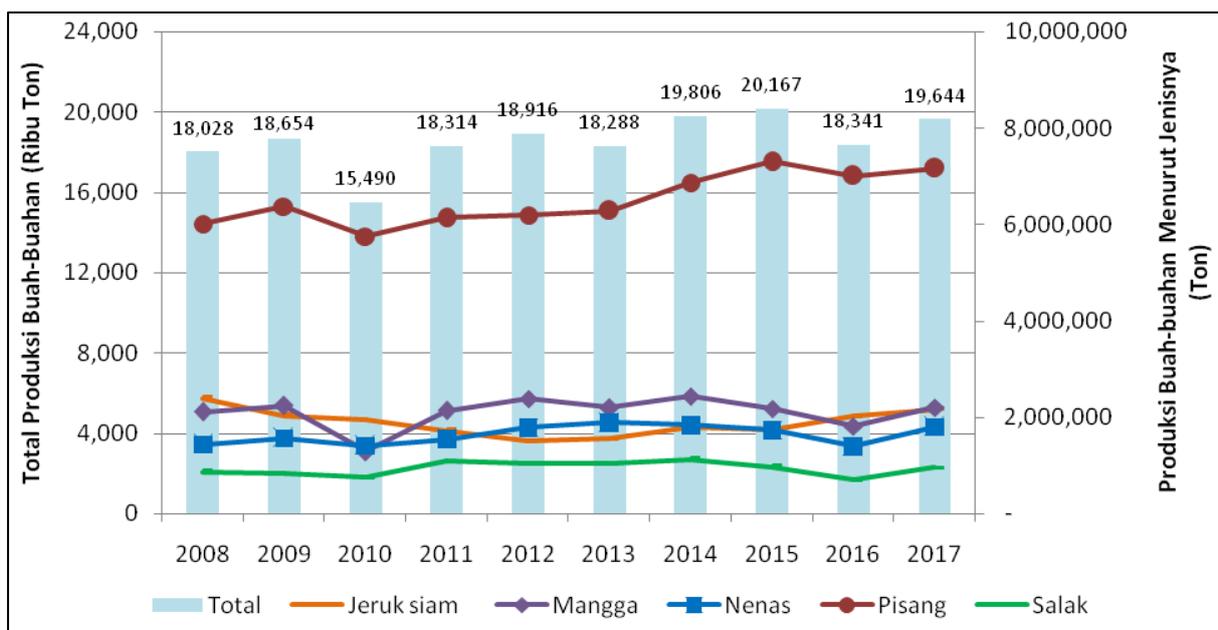
Sayuran dan buah-buahan merupakan sumber utama dalam penyediaan vitamin dan mineral. Antara tahun 2008 dan 2017, produksi sayuran dan buah-buahan telah meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,48% untuk sayuran dan 1,43% untuk buah-buahan (BPS, 2017). Sementara impor sayuran meningkat dengan rata-rata sebesar 5,02% dan buah-buahan sebesar 4,42% pada periode yang sama (BPS, 2017). Produksi untuk beberapa komoditas buah-buahan dan sayuran tersedia di Gambar 2.3 dan 2.4.

Gambar 2.3 Produksi Beberapa Komoditas Sayuran 2008-2017



Sumber: BPS, 2017

Gambar 2.4 Produksi Beberapa Komoditas Buah-buahan 2008-2017



Sumber: BPS, 2017

2.2. Produksi Sereal dan Umbi-umbian Utama

Selama sepuluh tahun terakhir, produksi padi, jagung dan ubi jalar terus meningkat, sementara ubi kayu memiliki tren produksi yang menurun (Lihat Tabel 2.1 dan Gambar 2.5). Peningkatan produksi padi, jagung dan ubi jalar terutama disebabkan oleh pola tanam yang lebih intensif dan produktivitas yang semakin meningkat. Jagung merupakan komoditas dengan rata-rata pertumbuhan produksi per tahun tertinggi, yaitu 6,93%, sedangkan produksi ubi kayu turun sekitar 1,35% per tahun (BPS, 2015 dan Pusdatin, 2017). Sementara pertumbuhan produksi padi sebesar 3,38% per tahun.

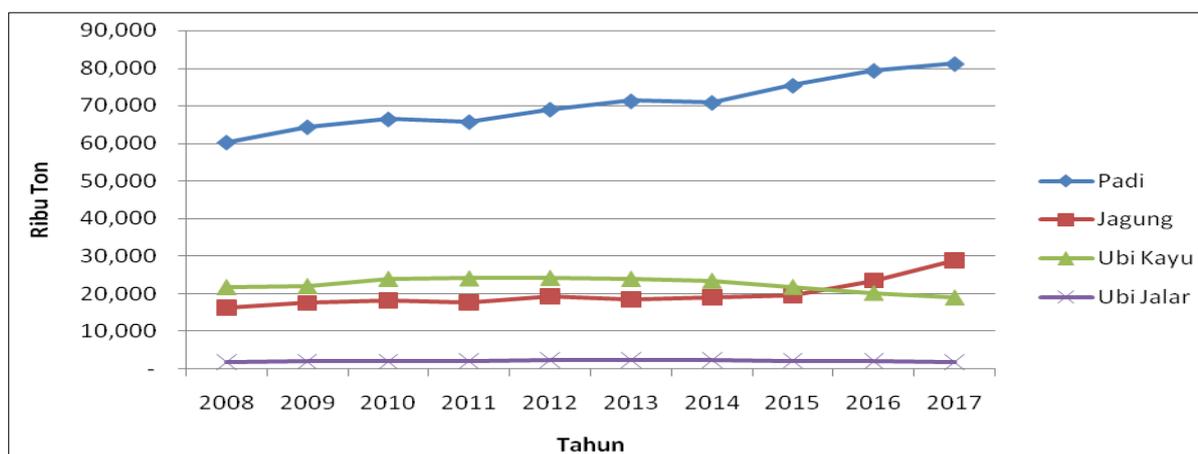
Pada tahun 2017, total produksi padi sebesar 81,15 juta ton, jagung sebesar 28,92 juta ton, ubi kayu sebesar 19,05 juta ton dan ubi jalar sebesar 1,91 juta ton (Pusdatin, 2017). Produksi padi dan jagung tersebut lebih tinggi dari angka produksi rata-rata selama 10 tahun terakhir, yaitu 70,40 juta ton untuk padi dan 19,90 juta ton untuk jagung.

Tabel 2.1 Produksi Sereal dan Umbi-umbian Utama 2008 – 2017 (Ribuan ton)

Komoditas	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata 10 tahun	Rata-rata pertumbuhan
Padi	60.326	64.399	66.469	65.757	69.056	71.280	70.846	75.398	79.354	81.149	70.403	3,38
Jagung	16.317	17.630	18.328	17.643	19.387	18.512	19.008	19.612	23.578	28.924	19.894	6,93
Ubi Kayu	21.757	22.039	23.918	24.044	24.177	23.937	23.436	21.801	20.260	19.054	22.442	-1,35
Ubi Jalar	1.882	2.058	2.051	2.196	2.483	2.387	2.383	2.298	2.169	1.914	2.182	0,47

Sumber: BPS, 2015 dan Pusdatin, 2017

Gambar 2.5 Produksi Sereal dan Umbi-umbian Utama 2008 – 2017



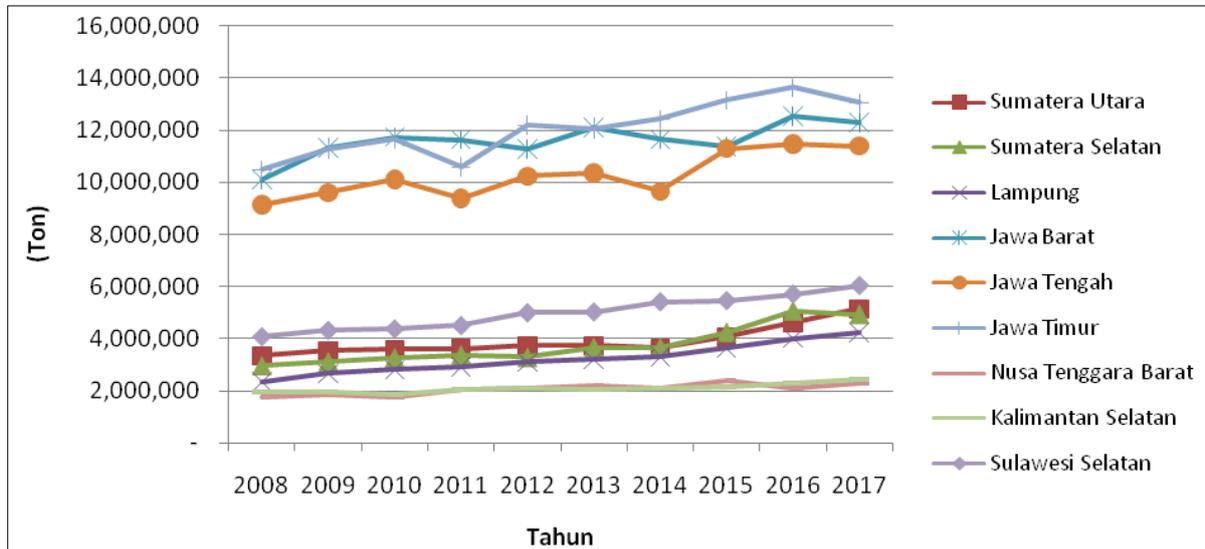
Sumber: BPS, 2015 dan Pusdatin, 2017

Padi

Data luas panen, produktivitas dan produksi padi tahun 2008-2017 bersumber dari BPS dan Pusdatin. Produksi padi meningkat dari 60,3 juta ton pada tahun 2008 menjadi 81,1 juta ton pada tahun 2017. Peningkatan produksi tersebut dikarenakan adanya peningkatan luas panen dan produktivitas. Pada periode yang sama, luas panen meningkat dari 12,3 juta ha menjadi 15,7 juta ha, sementara produktivitas meningkat dari 48,94 ku/ha menjadi 51,65 ku/ha. Sentra produksi padi di Pulau Jawa

adalah Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah; di Pulau Sumatera adalah Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Lampung; di Pulau Sulawesi adalah Sulawesi Selatan; di Pulau Kalimantan adalah Kalimantan Selatan; serta Kepulauan Nusa Tenggara adalah Nusa Tenggara Barat (Gambar 2.6).

Gambar 2.6 Produksi Jagung di Beberapa Provinsi di Indonesia 2008 – 2017



Sumber: BPS, 2015 dan Pusdatin, 2017

Kotak 2.1

Perbaikan Metodologi Perhitungan Potensi Luas Panen dan Produksi Padi 2018 oleh BPS

Pada bulan Oktober 2018, BPS mengumumkan data luas panen dan produksi padi tahun 2018 berdasarkan hasil perbaikan metodologi perhitungan menggunakan metode Kerangka Sampling Area (KSA). Penyempurnaan dalam berbagai tahapan perhitungan jumlah produksi beras telah dilakukan secara komprehensif mulai dari perhitungan luas lahan baku sawah hingga perbaikan perhitungan konversi gabah kering menjadi beras. Secara garis besar, tahapan dalam perhitungan produksi beras adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan Luas Lahan Baku Sawah Nasional dengan menggunakan Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN-RI No. 399/Kep-23.3/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018. Luas lahan baku sawah nasional tahun 2018 adalah sebesar 7.105.145 hektar. Sebagai perbandingan, luas lahan baku sawah nasional menurut SK Kepala BPN-RI No. 3296/Kep-100.18/IV/2013 tanggal 23 April 2013 adalah 7.750.999 hektar.
2. Menetapkan Luas Panen dengan KSA yang dikembangkan bersama BPPT dan telah mendapat pengakuan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
3. Menetapkan Produktivitas per Hektar. BPS juga melakukan penyempurnaan metodologi dalam menghitung produktivitas per hektar, dari metode ubinan berbasis rumah tangga menjadi metode ubinan berbasis sampel KSA.

4. Menetapkan Angka Konversi dari Gabah Kering Panen (GKP) ke Gabah Kering Giling (GKG) dan Angka Konversi dari GKG ke Beras. Penyempurnaan dilakukan untuk mendapatkan angka konversi yang lebih akurat dengan melakukan survei yang dilakukan oleh BPS di dua periode yang berbeda dengan basis provinsi sehingga didapatkan angka konversi untuk masing-masing provinsi. Sebelumnya konversi dilakukan hanya berdasarkan satu musim tanam dan secara nasional.

Berdasarkan hasil survei KSA, luas panen padi periode Januari–September 2018 sebesar 9,54 juta hektar. Luas panen tertinggi terjadi pada bulan Maret, yaitu sebesar 1,72 juta hektar, sementara luas panen terendah terjadi pada bulan Januari dengan luas panen sebesar 0,53 juta hektar. Selain menghitung luas panen pada saat pengamatan berdasarkan fase tumbuh tanaman padi, survei KSA juga dapat menghitung potensi luas panen hingga tiga bulan ke depan. Berdasarkan hasil survei KSA, total luas panen 2018 adalah sebesar 10,90 juta hektar.

Produksi Padi di Indonesia dari Januari hingga September 2018 sebesar 49,65 juta ton Gabah Kering Giling (GKG). Sementara itu, potensi produksi padi pada bulan Oktober, November, dan Desember masing-masing sebesar 2,66 juta ton, 2,10 juta ton, dan 2,13 juta ton. Dengan demikian, perkiraan total produksi padi 2018 adalah sebesar 56,54 juta ton atau 32,42 juta ton setara beras. Informasi lebih jelas dapat dilihat dalam Tabel 2.1.

Table 2.2 Perkembangan Luas Panen dan Produksi Padi 2018

No	Bulan	Luas Panen (juta ha)	Produksi (juta ton GKG)
1	Januari	0,53	2,71
2	Februari	1,04	5,60
3	Maret	1,72	9,46
4	April	1,35	7,32
5	Mei	0,96	4,74
6	Juni	0,87	4,43
7	Juli	1,05	5,35
8	Agustus	1,05	5,21
9	September	0,96	4,84
10	Oktober*	0,53	2,66
11	November*	0,41	2,10
12	Desember*	0,43	2,13
Total		10,90	56,54

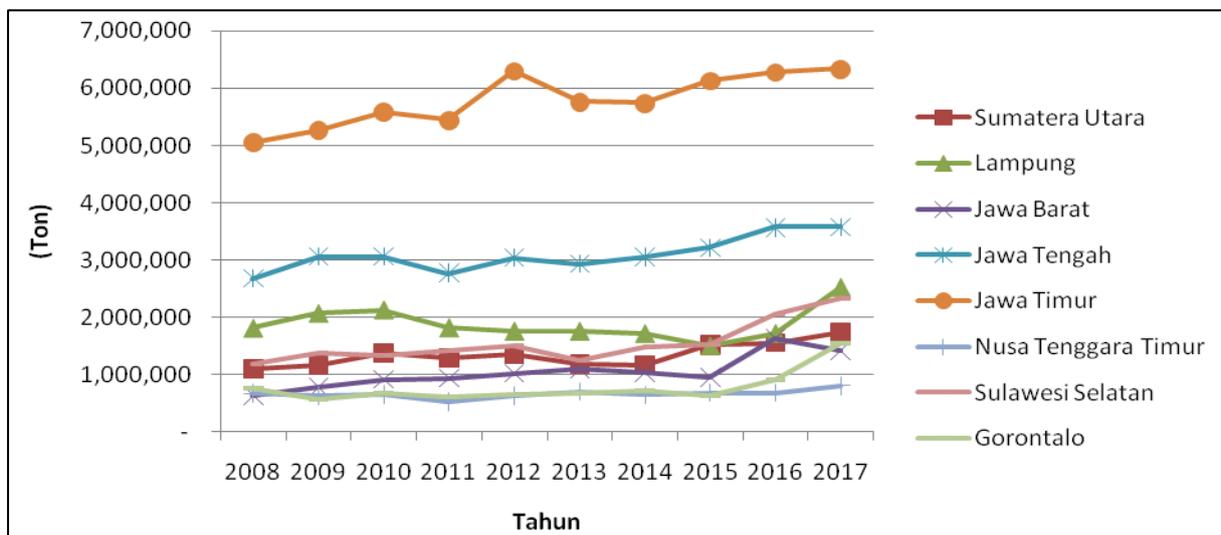
Keterangan: Bulan Oktober-Desember merupakan Angka Potensial

Konsumsi beras di Indonesia dari Januari hingga Desember 2018 diperkirakan sekitar 29,57 juta ton, lebih rendah jika dibandingkan dengan produksi beras dari Januari hingga Desember 2018. Dengan demikian, surplus produksi beras di Indonesia pada tahun 2018 diperkirakan sekitar 2,85 juta ton.

Jagung

Pada tahun 2017, produksi jagung mencapai 28,92 juta ton, menunjukkan peningkatan sebesar 12,61 juta ton dari tahun 2008. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan produktivitas dari 40,78 ku/ha pada tahun 2008 menjadi 52,27 ku/ha pada tahun 2017. Pada periode yang sama, luas panen jagung juga meningkat dari 4 juta ha menjadi 5,53 juta ha. Pada tahun 2017, Pulau Jawa merupakan penghasil jagung terbesar, mencakup 40,50% dari total produksi nasional. Penghasil terbesar kedua adalah Pulau Sumatera dengan produksi sebesar 23,53% dari total produksi nasional, diikuti oleh Pulau Sulawesi sebesar 23,51%. Pada tingkat provinsi, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat merupakan produsen jagung terbesar di Pulau Jawa, sementara di Pulau Sumatera adalah Provinsi Lampung dan Sumatera Utara (Gambar 2.7).

Gambar 2.7 Produksi Jagung di Beberapa Provinsi di Indonesia 2008 – 2017

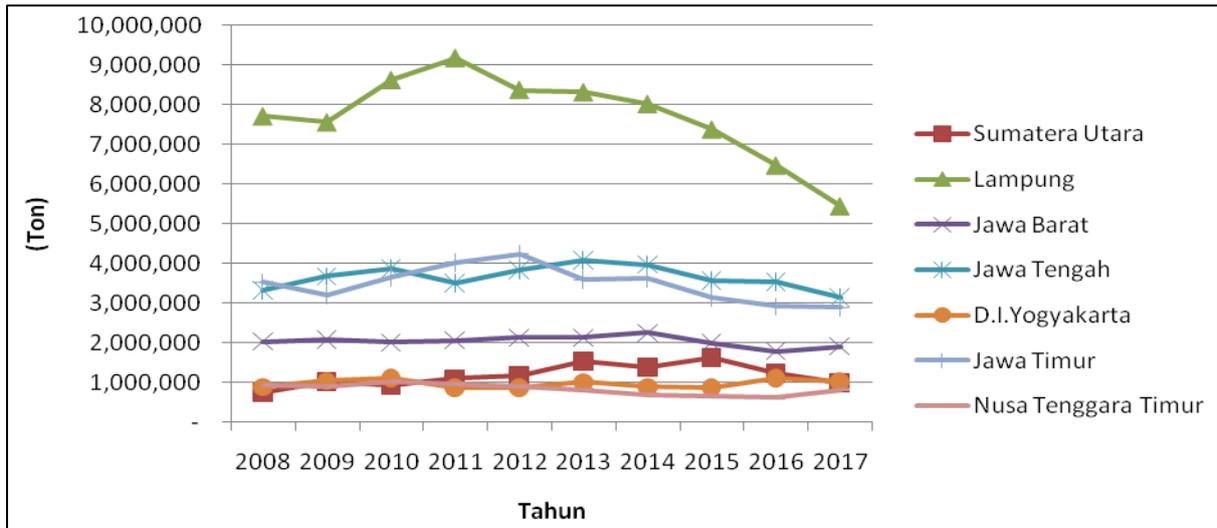


Sumber: BPS, 2015 dan Pusdatin, 2017

Ubi Kayu

Pada tahun 2013, produksi ubi kayu sebesar 19,05 juta ton. Produksi ubi kayu memiliki tren yang menurun selama 10 tahun terakhir. Penurunan produksi ini diakibatkan oleh penurunan luas panen dari 1,20 juta ha pada tahun 2008 menjadi 772,975 ha pada tahun 2017. Walaupun demikian, produktivitas ubi kayu meningkat dari 180,57 ku/ha menjadi 246,50 ku/ha pada periode yang sama. Provinsi Lampung merupakan produsen ubi kayu terbesar dengan menyumbang 28,61% dari total produksi nasional pada tahun 2017. Selain itu, Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Timur juga merupakan sentra produksi utama ubi kayu (Gambar 2.8).

Gambar 2.8 Produksi Ubi Kayu di Beberapa Provinsi di Indonesia 2008 – 2017

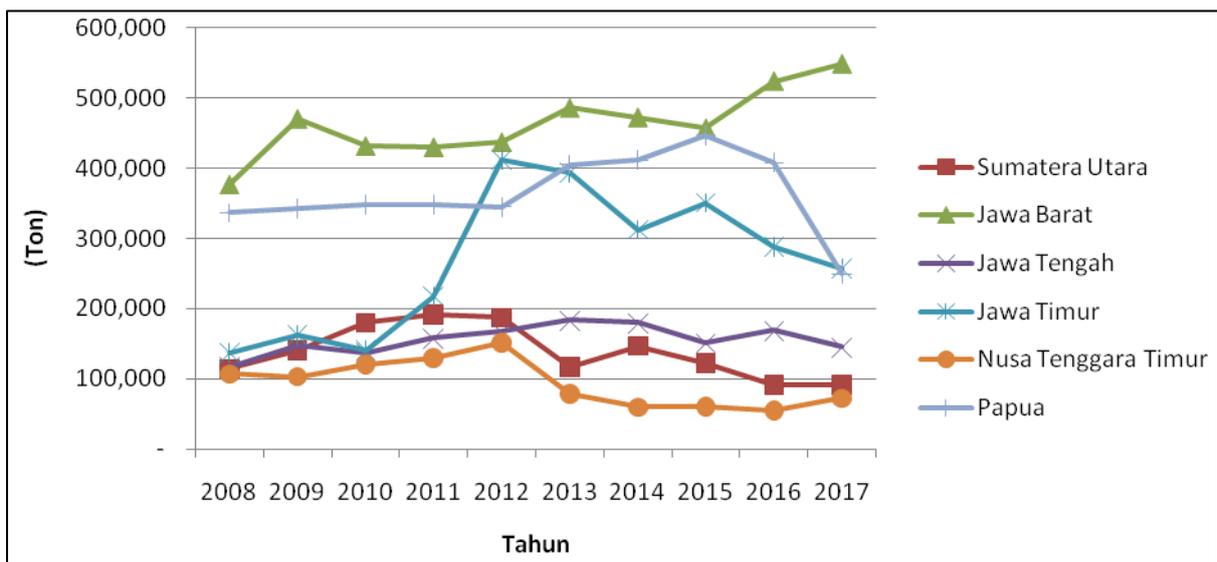


Sumber: BPS, 2015 dan Pusdatin, 2017

Ubi Jalar

Rata-rata pertumbuhan produksi ubi jalar di Indonesia mengalami peningkatan antara tahun 2008 dan 2017. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan produktivitas dari 107,80 ku/ha pada tahun 2008 menjadi 180,21 ku/ha pada tahun 2017. Meskipun demikian, luas panen ubi jalar mengalami penurunan dari 174.561 ha menjadi 106.226 ha pada periode yang sama. Selain beberapa provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera, Provinsi Papua juga merupakan sentra produksi ubi jalar. Provinsi Papua menyumbang 13,07% dari hasil produksi nasional, setelah Provinsi Jawa Barat sebesar 28,62% (Gambar 2.9).

Gambar 2.9 Produksi Ubi Jalar di Beberapa Provinsi di Indonesia 2004 – 2013



Sumber: BPS, 2015 dan Pusdatin, 2017

2.3. Rasio Konsumsi Normatif Per Kapita terhadap Produksi

Seperti yang telah dibahas dalam Bab I, indikator ketersediaan pangan yang digunakan untuk analisis ketahanan pangan komposit adalah rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih sereal dan umbi-umbian utama. Rasio tersebut menunjukkan apakah suatu daerah surplus atau defisit dalam produksi sereal dan umbi-umbian utama.

Indikator ini merupakan salah satu dari 9 indikator utama yang digunakan dalam analisis komposit kerentanan terhadap kerawanan pangan dan gizi yang mencerminkan ketersediaan pangan di 416 kabupaten. Produksi sereal dan umbi-umbian utama di tingkat kabupaten dihitung dengan mengambil rata-rata produksi padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar masing-masing selama tiga tahun produksi (2014-2016). Data produksi padi 2014-2016 yang digunakan dalam analisis ini selanjutnya disesuaikan dengan metode Kerangka Sampling Area (KSA) 2018. Data rata-rata produksi bersih sereal dihitung dengan menggunakan faktor konversi standar (benih, pakan dan tercecer). Khusus rata-rata produksi bersih ubi kayu dan ubi jalar dibagi dengan 3 (nilai kalori 3 kg ubi kayu atau ubi jalar setara dengan 1 kg beras atau jagung) untuk mendapatkan nilai yang ekuivalen dengan sereal (BKP, 2012). Selanjutnya dihitung total produksi sereal dan umbi-umbian utama yang tersedia untuk dikonsumsi. Ketersediaan bersih sereal per kapita dihitung dengan membagi total produksi sereal di kabupaten tertentu dengan perkiraan jumlah penduduk pada tahun tengah, yaitu tahun 2015. Kemudian dihitung rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih sereal dan umbi-umbian utama. Berdasarkan profil konsumsi Indonesia, konsumsi normatif sereal per kapita per hari adalah 300 gram. Data ketersediaan bersih sereal dan umbi-umbian utama dari perdagangan (ekspor dan impor) tidak dihitung karena data tersebut tidak tersedia di tingkat kabupaten.

Peta 2.1 menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia telah mencapai swasembada dalam produksi sereal dan umbi-umbian utama, yang digambarkan dalam kelompok gradasi warna hijau, sedangkan daerah defisit ditunjukkan dengan kelompok gradasi warna merah. Kondisi iklim, kesesuaian lahan, bencana alam (kekeringan, banjir, dan sebagainya) adalah faktor-faktor yang menjadi kendala terhadap kemampuan kabupaten-kabupaten yang mengalami defisit sereal untuk mencapai swasembada dalam produksi sereal. Walaupun demikian, hal yang penting untuk dicatat bahwa kurangnya swasembada pangan tidak selalu perlu dikhawatirkan. Hal ini disebabkan karena daerah yang mengalami defisit dalam produksi sereal dan umbi-umbian utama dapat menghasilkan produk-produk lain yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan penduduk untuk membeli produk pangan dari daerah surplus. Di negara kepulauan seperti Indonesia, distribusi dan logistik pangan memainkan peranan yang sangat penting sehingga implikasi dari defisit sereal harus mendapat prioritas penanganan yang segera.

Berdasarkan rasio konsumsi normatif terhadap produksi, 258 kabupaten (62%) mengalami surplus dan 158 kabupaten (38%) mengalami defisit dari total 416 kabupaten. Kabupaten di Provinsi Papua Barat, Papua dan sebagian besar di Provinsi Riau, Jambi, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah dan Maluku mengalami defisit dalam produksi sereal dan umbi-umbian. Penyebab defisit ketersediaan bervariasi antar kabupaten, tetapi pada umumnya meliputi: (i) Ketidaksihinggaan dan

kurangnya ketersediaan lahan untuk produksi sereal; (ii) Perluasan tanaman perkebunan terutama komoditas kelapa sawit; serta (iii) Perluasan areal pertambangan.

2.4. Pencapaian dalam Ketersediaan Pangan

Upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Pertanian berhasil meningkatkan produksi beberapa komoditas pangan, antara lain produksi padi dari sebesar 71,8 juta ton pada tahun 2013 menjadi 81,07 ton pada tahun 2017 atau meningkat sebesar 14,9%, produksi jagung meningkat sebesar 56,24%, produksi bawang merah meningkat sebesar 45,54% serta produksi cabai meningkat sebesar 36,42% (BPS, 2017 dan Pusdatin, 2017). Peningkatan produksi tersebut berimbas pada peningkatan nilai produksi pertanian. Pada tahun 2013, nilai produksi pertanian tercatat sebesar Rp 994,78 triliun dan meningkat menjadi Rp1.344,73 triliun pada tahun 2017 dengan laju peningkatan sebesar 9% per tahun (BPS, 2017). Selain itu, tren nilai ekspor sektor pertanian juga mengalami peningkatan pada periode 2013-2017. Ekspor pertanian sebesar Rp 334,34 triliun pada tahun 2013 dan pada tahun 2017 menjadi Rp 441,89 triliun atau naik 24% per tahun (BPS, 2017).

Seiring dengan peningkatan volume dan nilai produksi pertanian, kesejahteraan petani mengalami perbaikan sebagaimana ditunjukkan oleh Nilai Tukar Usaha Pertanian (NUTP) pertanian sempit (tidak termasuk perikanan). NTUP tahun 2014 sebesar 106,05 mengalami peningkatan menjadi 110,03 pada tahun 2017 (BPS, 2017). Peningkatan kesejahteraan petani juga ditunjukkan oleh menurunnya jumlah penduduk miskin pedesaan. Persentase penduduk miskin pedesaan tahun 2015 sebesar 14,21%, menurun menjadi 13,20% pada tahun 2018 (BPS, 2017). Sementara itu, persentase penduduk dengan konsumsi kalori kurang dari 1.400 kkal (70 persen AKG) per kapita mengalami trend yang menurun. Pada tahun 2013, persentase penduduk rawan sebesar 18,68% turun menjadi 12,69% pada tahun 2016 (BPS, 2016).

2.5. Tantangan untuk Meningkatkan Ketersediaan Pangan

Pencapaian keberhasilan penyediaan pangan di masa mendatang akan dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk. Hasil Sensus Penduduk 2010 mencatat bahwa jumlah penduduk Indonesia sebesar 237,6 juta jiwa dimana angka ini meningkat hampir dua kali lipat jika dibandingkan dengan tiga dekade yang lalu. Pada tahun 2045, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan akan meningkat menjadi sekitar 311,6–318,9 juta jiwa (Bappenas, 2018). Pertumbuhan penduduk ini tentunya akan meningkatkan jumlah permintaan pangan di masa depan.

Indonesia telah menjadi negara pengekspor hasil pertanian selama puluhan tahun terakhir yang didominasi oleh tanaman tahunan, terutama kelapa sawit, karet, kakao, kopi dan kelapa; serta komoditas ikan. Akan tetapi, Indonesia masih merupakan pengimpor beberapa komoditas pertanian, seperti gandum, daging sapi, buah-buahan, sayuran dan susu. Walaupun Indonesia telah mencapai swasembada beras, produksi komoditas lainnya (terutama gandum, daging sapi, buah-buahan, sayuran dan susu) tidak secepat pertumbuhan kebutuhan konsumsi nasional, sehingga meningkatkan ketergantungan pada impor dari luar negeri.

Pergeseran preferensi makanan merupakan faktor penyebab utama meningkatnya permintaan impor untuk produk-produk tersebut. Hal ini terjadi karena berubahnya pola konsumsi dan pola permintaan pangan pada kelas berpendapatan menengah di perkotaan yang melebihi kapasitas nasional untuk memproduksi sendiri. Pada tahun 2010, persentase penduduk kota sebesar 49,8%. Angka tersebut meningkat pada tahun 2015 menjadi 53,3% dan diproyeksikan akan mencapai lebih dari 60% pada tahun 2035 (BPS, 2013).

Indonesia kemungkinan tidak hanya akan lebih padat penduduk, tetapi juga secara demografi akan jauh lebih produktif. Populasi usia kerja di Indonesia akan terus meningkat. Kelompok angkatan kerja (usia 15-64 tahun) diproyeksikan akan tumbuh selama 30 tahun ke depan dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 0,7% (UN Population Division, 2015). Pada 2045, angkatan kerja Indonesia diprediksi akan mencapai 172,1 juta jiwa. Dalam hal ini, penyediaan pangan yang cukup baik secara kuantitas maupun kualitas sangat dibutuhkan untuk menopang kebutuhan gizi generasi masa depan bangsa. Hal ini juga merupakan salah satu bentuk investasi sebagai persiapan yang serius dalam rangka menyongsong bonus demografi yang diharapkan.

Sementara itu, dari sisi penyediaan pangan, pertanian Indonesia dihadapkan pada kenyataan bahwa telah terjadi penurunan jumlah petani. Sensus Pertanian 2013 mencatat terdapat sekitar 26,14 juta rumah tangga petani (RTP) (subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan dan jasa pertanian) atau terjadi penurunan sebanyak 5,04 juta RTP dari 31,17 juta RTP pada 2003, dengan laju penurunan sebesar 1,75% atau lebih dari 500 ribu rumah tangga per tahun. Apabila diklasifikasikan menurut golongan luas lahan, pada tahun 2013 terlihat bahwa jumlah rumah tangga petani gurem (RTP yang menguasai lahan kurang dari 0,50 Ha) mendominasi jumlah RTP di Indonesia. Tercatat bahwa jumlah rumah tangga petani gurem pada tahun 2013 adalah sebesar 14,25 juta rumah tangga atau 55,53 % dari total RTP di Indonesia. Selama empat dekade terakhir, ketimpangan distribusi penguasaan aset sumberdaya lahan sebagaimana diindikasikan oleh Gini Ratio kepemilikan lahan berfluktuasi pada rentang nilai 0,50-0,72, lebih besar dibanding Gini Ratio pendapatan yang berada pada kisaran nilai 0,37-0,41. Berdasarkan data Sensus Pertanian 2013, ketimpangan kepemilikan lahan pada 2013 mencapai 0,68. Artinya hanya 1% rakyat Indonesia menguasai 68% sumber daya lahan.

Tingginya kehilangan pangan (*food loss*) dan pangan yang terbuang (*food waste*) dalam sistem pangan juga menjadi tantangan tersendiri dalam penyediaan pangan di Indonesia. Bukti hingga saat ini menunjukkan bahwa rata-rata proporsi *food loss* dan *food waste* untuk negara-negara di Asia Tenggara lebih banyak terjadi di sisi hulu, yaitu 8,7% untuk proses panen dan 9,6% untuk proses pasca-panen (HLPE, 2011). Di sisi hilir, *food loss* dan *food waste* relatif lebih kecil, antara lain 2,7% untuk proses pengolahan dan pengemasan, 4,6% untuk proses transportasi dan 2,6% untuk proses konsumsi.

Selain itu, tantangan lainnya untuk penyediaan pangan di Indonesia antara lain: (i) Konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian akibat persaingan penggunaan lahan terutama dengan sektor perumahan dan industri; (ii) Meningkatnya kejadian kekeringan dan banjir sebagai dampak dari perubahan iklim global; (iii) Penurunan kualitas tanah dan kesuburan karena kerusakan lingkungan; (iv)

Hama dan penyakit pada tanaman dan ternak yang dapat berpotensi mengurangi tingkat produksi; serta (v) Produktivitas petani yang masih rendah terutama petani gurem yang disebabkan oleh kurangnya akses ke pasar untuk menjual hasil produksi dan kurangnya akses ke fasilitas modal.

2.6. Kebijakan dan Strategi dalam Pengembangan Ketersediaan Pangan

Undang-undang No 18 tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Nawa Cita sebagai agenda prioritas Kabinet Kerja di bawah Pemerintahan Jokowi-JK mengarahkan pembangunan pertanian ke depan untuk mewujudkan kedaulatan pangan supaya Indonesia sebagai bangsa dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat. Kedaulatan pangan diterjemahkan dalam bentuk kemampuan bangsa dalam hal: (1) Mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, (2) Mengatur kebijakan pangan secara mandiri, serta (3) Melindungi dan menyejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan. Dengan kata lain, kedaulatan pangan harus dimulai dari swasembada pangan yang secara bertahap diikuti dengan peningkatan nilai tambah usaha pertanian secara luas untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Hal ini kemudian dituangkan ke dalam kebijakan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Sasaran utama prioritas nasional bidang pangan dan pertanian di dalam RPJMN adalah sebagai berikut:

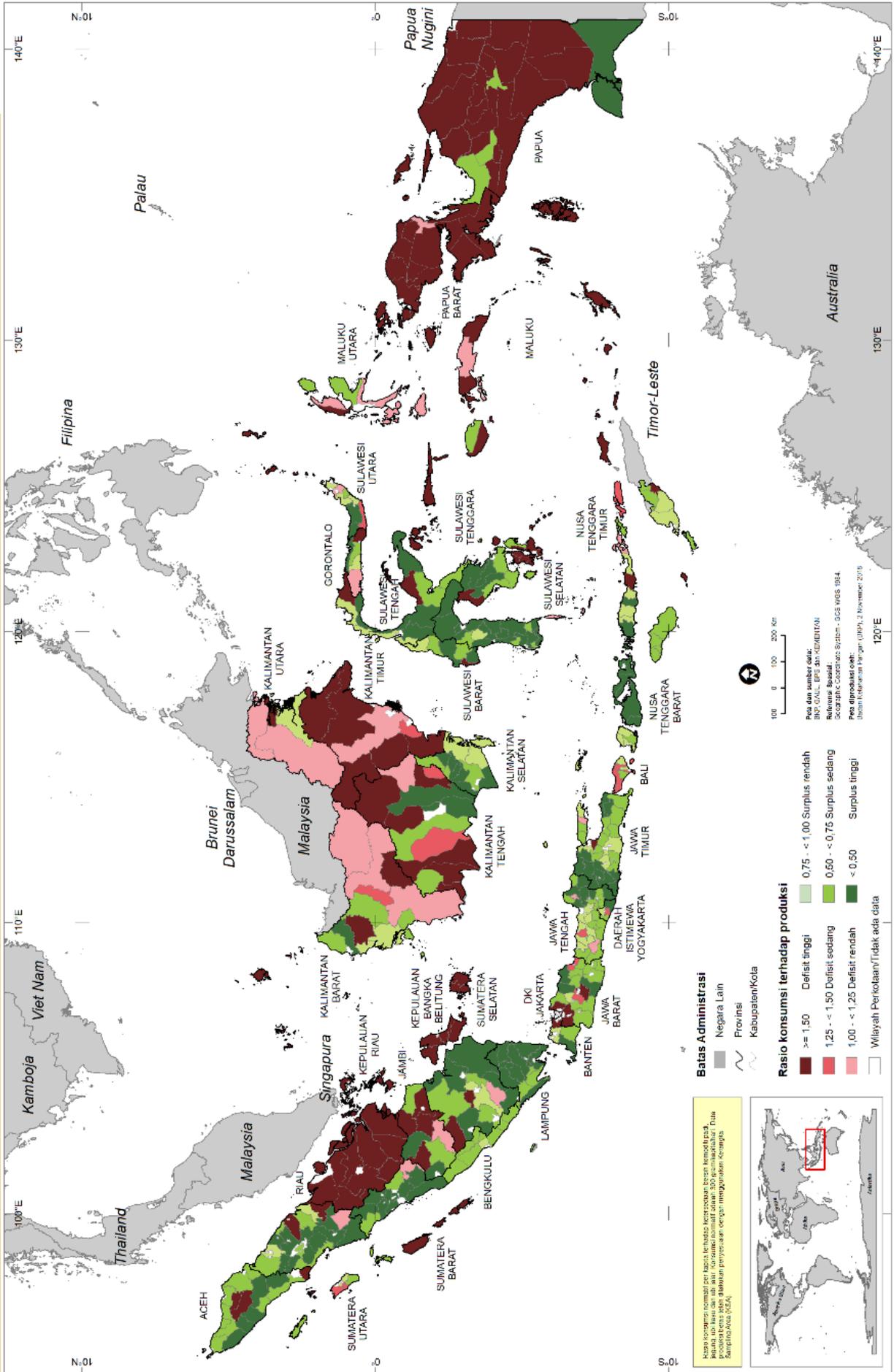
- a. Tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri untuk komoditas pangan utama: padi, jagung, kedelai, daging sapi, dan gula. Produksi padi diutamakan ditingkatkan dalam rangka swasembada agar kemandirian dapat dijaga.
- b. Terwujudnya peningkatan distribusi dan aksesibilitas pangan yang didukung dengan pengawasan distribusi pangan untuk mencegah spekulasi, serta didukung peningkatan cadangan beras pemerintah dalam rangka memperkuat stabilitas harga.
- c. Tercapainya peningkatan kualitas konsumsi pangan sehingga mencapai skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 92,5 pada tahun 2019.
- d. Terbangunnya dan meningkatnya layanan jaringan irigasi 600 ribu Ha untuk menggantikan alih fungsi lahan.
- e. Terlaksananya rehabilitasi 1,75 juta Ha jaringan irigasi sebagai bentuk rehabilitasi prasarana irigasi sesuai dengan laju deteriorasi.
- f. Beroperasinya dan terpeliharanya jaringan irigasi 2,95 juta Ha.
- g. Terbangunnya 132 ribu Ha layanan jaringan irigasi rawa untuk pembangunan lahan rawa yang adaptif dengan menyeimbangkan pertimbangan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- [Bappenas] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2016. Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan 2015-2020. Jakarta.
- [Bappenas] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2018. Pembangunan Kependudukan (disampaikan pada acara peluncuran buku Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 2015-2045). Jakarta.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. Statistik Produksi Pangan 2008-2017. Statistik Indonesia. Jakarta.
- [BKP] Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. 2017. Neraca Bahan Makanan 2017. Jakarta.
- [CBD] Convention on Biological Diversity. 2018. Indonesia – Country Profile. [online] <https://www.cbd.int/countries/profile/default.shtml?country=id>. (diakses pada 3 Oktober 2018)
- [HLPE] High Level Panel of Experts. 2011. Price volatility and food security. A report by the High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition of the Committee on World Food Security. Rome.
- Mongabay. 2018. The top 10 most biodiverse countries. [online] <https://news.mongabay.com/2016/05/top-10-biodiverse-countries/> (diakses pada 3 Oktober 2018)
- Pusdatin (Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian). 2017. Data Produksi Tanaman Pangan. Jakarta.



Peta 2.1: Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih serealialia



BAB 3

AKSES TERHADAP PANGAN

Akses pangan berhubungan dengan kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, stok, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia secara fisik di suatu daerah, akan tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu karena terbatasnya akses fisik, akses ekonomi, dan/atau akses sosial. Aspek akses pangan pada FSVA di proksi dari tiga indikator, yaitu: (i) persentase rumah tangga tanpa akses listrik; (ii) persentase rumah tangga dengan pangsa pengeluaran pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran; dan (iii) persentase penduduk di bawah garis kemiskinan.

3.1. Akses terhadap Listrik

Tersedianya fasilitas listrik di suatu wilayah akan membuka peluang yang lebih besar untuk akses pekerjaan. Hal ini merupakan indikasi kesejahteraan suatu wilayah atau rumah tangga yang pada akhirnya berdampak pada kondisi ketahanan pangan (DKP dan WFP 2013; Wiranthi *et al.* 2014; Sabarella 2005; dan Sofiati 2009). Akses rumah tangga terhadap listrik merupakan suatu indikator pendekatan yang baik untuk melihat tingkat kesejahteraan ekonomi dan peluang bagi kondisi kehidupan rumah tangga yang lebih baik.

Sesuai dengan SUSENAS 2017 (BPS 2017), rumah tangga yang memiliki akses listrik sebesar 98,14% atau meningkat 0,60% dari tahun 2015 (97,54%). Namun demikian, kesenjangan antar daerah sangat tinggi, di mana proporsi rumah tangga tanpa akses listrik yang terendah berada di DKI Jakarta (0%) dan tertinggi di Papua (44,19%) (Tabel 3.1).

Pada tingkat kabupaten, kabupaten Yahukimo (Papua) merupakan kabupaten yang rumah tangganya tidak memiliki akses terhadap listrik terbanyak (97,09%), sementara 59 kabupaten (14,18%) dan 54 kota (55,10%) semua rumah tangga telah memiliki akses listrik.

Tabel 3.1 Persentase Rumah Tangga Tanpa Akses Listrik per Provinsi 2015-2017

Provinsi	Persentase Rumah Tangga Tanpa Akses Listrik		
	2015	2016	2017
Aceh	1,56	1,26	0,98
Sumatera Utara	3,19	3,16	2,59
Sumatera Barat	3,83	2,98	2,19
Riau	4,48	3,43	3,31
Jambi	5,14	3,48	2,04
Sumatera Selatan	2,55	2,36	1,70
Bengkulu	3,09	3,11	1,89

Provinsi	Persentase Rumah Tangga Tanpa Akses Listrik		
	2015	2016	2017
Lampung	1,56	1,50	0,94
Kepulauan Bangka Belitung	1,43	1,20	0,83
Kepulauan Riau	1,04	0,90	0,90
DKI Jakarta	0,06	0,10	-
Jawa Barat	0,17	0,15	0,09
Jawa Tengah	0,08	0,12	0,09
DI Yogyakarta	0,18	0,07	0,10
Jawa Timur	0,13	0,15	0,08
Banten	0,26	0,28	0,05
Bali	0,33	0,27	0,15
Nusa Tenggara Barat	0,95	0,61	0,57
Nusa Tenggara Timur	26,09	27,86	22,64
Kalimantan Barat	11,71	10,83	8,49
Kalimantan Tengah	7,55	6,01	4,00
Kalimantan Selatan	1,50	1,26	0,84
Kalimantan Timur	1,27	1,33	0,86
Kalimantan Utara	4,02	2,00	2,38
Sulawesi Utara	0,87	0,64	0,70
Sulawesi Tengah	7,65	7,21	5,15
Sulawesi Selatan	2,67	2,42	1,47
Sulawesi Tenggara	6,55	5,89	3,45
Gorontalo	7,24	4,95	3,14
Sulawesi Barat	8,62	5,75	4,61
Maluku	11,93	11,86	8,65
Maluku Utara	11,64	10,01	5,77
Papua Barat	11,12	13,61	9,90
Papua	46,83	49,10	44,19
Indonesia	2,46	2,38	1,86

Sumber: SUSENAS 2015-2017, BPS

3.2. Kemiskinan

Akses ekonomi terhadap makanan bergizi adalah penentu utama kerawanan pangan dan gizi di Indonesia. Walaupun pangan tersedia di pasar, akan tetapi akses rumah tangga ke pangan tergantung pada pendapatan rumah tangga dan stabilitas harga pangan. Daya beli yang terbatas menyebabkan pilihan rumah tangga mendapatkan pangan yang beragam semakin terbatas.

Secara global, seseorang yang hidup di bawah ambang batas US\$ 1,25 – *Purchasing Power Parity* (PPP) Bank Dunia per hari dikategorikan sebagai penduduk miskin. Di Indonesia, pemerintah menggunakan garis kemiskinan nasional (Rp 415.614 per orang/bulan untuk daerah perkotaan dan Rp 383.908 per orang/bulan untuk pedesaan pada Maret 2018) untuk tujuan perencanaan dan penentuan tujuan pembangunan.

Persentase penduduk miskin Indonesia mengalami tren yang menurun selama lima tahun terakhir. Pada bulan Maret 2014 persentase penduduk miskin sebesar 11,25%, berkurang menjadi 9,82% dari jumlah penduduk secara nasional pada Maret 2018. Namun demikian, jumlah penduduk miskin pada tahun 2018 masih tinggi, yaitu sebesar 25,9 juta orang. Sekitar 51,40% atau sebanyak 13,34 juta jiwa penduduk di bawah garis kemiskinan tinggal di Pulau Jawa. Dari seluruh penduduk miskin di Indonesia, sekitar 15,8 juta jiwa (60,9%) tinggal di daerah pedesaan dan 10,14 juta jiwa (39,09%) tinggal di daerah perkotaan. Upaya-upaya yang efektif sangat dibutuhkan untuk mengatasi penyebab masalah kemiskinan, khususnya di wilayah pedesaan.

Secara umum, persentase penduduk miskin di tingkat provinsi telah mengalami penurunan sejak tahun 2014, kecuali Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Tengah yang mengalami sedikit peningkatan. Persentase penduduk miskin Provinsi NTT meningkat dari 19,82% pada tahun 2014 menjadi 21,35% pada tahun 2018. Sedangkan persentase penduduk miskin Provinsi Sulawesi Tengah meningkat dari 13,93% pada tahun 2014 menjadi 14,01% pada tahun 2018. Provinsi dengan tingkat persentase penduduk miskin tertinggi adalah Papua, yaitu sebesar 27,74%, diikuti oleh Papua Barat 23,01% dan Nusa Tenggara Timur 21,35%.

Tabel 3.2 Jumlah dan Persentase Penduduk Hidup di Bawah Garis Kemiskinan per Provinsi 2014-2018

Provinsi	2014		2015		2016		2017		2018	
	Jumlah (000)	%								
Aceh	881,26	18,05	851,59	17,08	848,44	16,73	872,61	16,89	839,49	15,97
Sumatera Utara	1.286,67	9,38	1.463,67	10,53	1.455,95	10,35	1.453,87	10,22	1.324,98	9,22
Sumatera Barat	379,20	7,41	379,61	7,31	371,56	7,09	364,51	6,87	357,13	6,65
Riau	499,88	8,12	531,39	8,42	515,40	7,98	514,62	7,78	500,44	7,39
Jambi	263,80	7,92	300,71	8,86	289,80	8,41	286,55	8,19	281,69	7,92
Sumatera Selatan	1.100,83	13,91	1.145,63	14,25	1.101,19	13,54	1.086,92	13,19	1.068,27	12,80
Bengkulu	320,95	17,48	334,07	17,88	328,61	17,32	316,98	16,45	301,81	15,43
Lampung	1.142,92	14,28	1.163,49	14,35	1.169,60	14,29	1.131,73	13,69	1.097,05	13,14
Bangka Belitung	71,64	5,36	74,09	5,40	72,76	5,22	74,09	5,20	76,26	5,25
Kep. Riau	127,80	6,70	122,40	6,24	120,41	5,98	125,37	6,06	131,68	6,20
DKI Jakarta	393,98	3,92	398,92	3,93	384,30	3,75	389,69	3,77	373,12	3,57
Jawa Barat	4.327,07	9,44	4.435,70	9,53	4.224,33	8,95	4.168,44	8,71	3.615,79	7,45
Jawa Tengah	4.836,45	14,46	4.577,04	13,58	4.506,89	13,27	4.450,72	13,01	3.897,20	11,32
DI Yogyakarta	544,87	15	550,23	14,91	494,94	13,34	488,53	13,02	460,10	12,13
Jawa Timur	4.786,79	12,42	4.789,12	12,34	4.703,30	12,05	4.617,01	11,77	4.332,59	10,98
Banten	622,84	5,35	702,40	5,90	658,11	5,42	675,04	5,45	661,36	5,24
Bali	185,20	4,53	196,71	4,74	178,18	4,25	180,13	4,25	171,76	4,01
NTB	820,82	17,25	823,89	17,10	804,44	16,48	793,78	16,07	737,46	14,75
NTT	994,67	19,82	1.159,84	22,61	1.149,92	22,19	1.150,79	21,85	1.142,17	21,35
Kalimantan Barat	401,51	8,54	383,70	8,03	381,35	7,87	387,43	7,88	387,08	7,77
Kalimantan Tengah	146,32	6,03	147,70	5,94	143,49	5,66	139,16	5,37	136,93	5,17
Kalimantan Selatan	182,88	4,68	198,44	4,99	195,70	4,85	193,92	4,73	189,03	4,54

Provinsi	2014		2015		2016		2017		2018	
	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%						
Kalimantan Timur	253,60	6,42	212,89	6,23	212,92	6,11	220,17	6,19	218,90	6,03
Kalimantan Utara	-	-	39,69	6,24	41,12	6,23	49,47	7,22	50,35	7,09
Sulawesi Utara	208,23	8,75	208,54	8,65	202,82	8,34	198,88	8,10	193,31	7,80
Sulawesi Tengah	392,65	13,93	421,62	14,66	420,52	14,45	417,87	14,14	420,21	14,01
Sulawesi Selatan	864,30	10,28	797,72	9,39	807,03	9,40	813,07	9,38	792,63	9,06
Sulawesi Tenggara	342,25	14,05	321,88	12,90	326,86	12,88	331,71	12,81	307,10	11,63
Gorontalo	194,17	17,44	206,84	18,32	203,19	17,72	205,37	17,65	198,51	16,81
Sulawesi Barat	153,89	12,27	160,48	12,40	152,73	11,74	149,76	11,30	151,78	11,25
Maluku	316,11	19,13	328,41	19,51	327,72	19,18	320,51	18,45	320,08	18,12
Maluku Utara	82,64	7,30	79,90	6,84	74,68	6,33	76,47	6,35	81,46	6,64
Papua Barat	229,43	27,13	225,36	25,82	225,80	25,43	228,38	25,10	214,47	23,01
Papua	924,40	30,05	859,15	28,17	911,33	28,54	897,69	27,62	917,63	27,74
Indonesia	28.280,0	11,25	28.592,8	11,22	28.005,4	10,86	27.771,2	10,64	25.949,8	9,82

Sumber: Diolah dari SUSENAS Modul Konsumsi 2014-2018, BPS

Pada level kabupaten, terlihat perbedaan tingkat kemiskinan yang jelas antar kabupaten. Diantara kabupaten-kabupaten tersebut, terdapat 15 kabupaten yang memiliki persentase penduduk miskin lebih dari 35 persen. Sebanyak 11 kabupaten tersebar di Provinsi Papua, tiga kabupaten di Papua Barat, dan satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur.

Penurunan kemiskinan di Indonesia juga diikuti dengan penurunan kesenjangan pendapatan yang diukur menggunakan koefisien gini. Koefisien gini mengalami penurunan, yaitu dari 0,46 pada tahun 2014 menjadi 0,39 pada tahun 2018 yang menunjukkan menurunnya kesenjangan antara yang kaya dengan miskin (lihat Gambar 3.1). Namun pada tingkat provinsi, terdapat tujuh provinsi yaitu Jambi, Bengkulu, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Barat dan Maluku Utara yang tingkat ketimpangan pendapatannya mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2014. Pada tahun 2018, Provinsi DI Yogyakarta memiliki koefisien gini tertinggi (0,441), diikuti oleh Sulawesi Tenggara (0,409), Jawa Barat (0,407) dan Gorontalo (0,403) (Tabel 3.3). Pemerataan pembangunan perlu terus dilakukan untuk mengurangi tingkat ketimpangan yang masih tinggi.

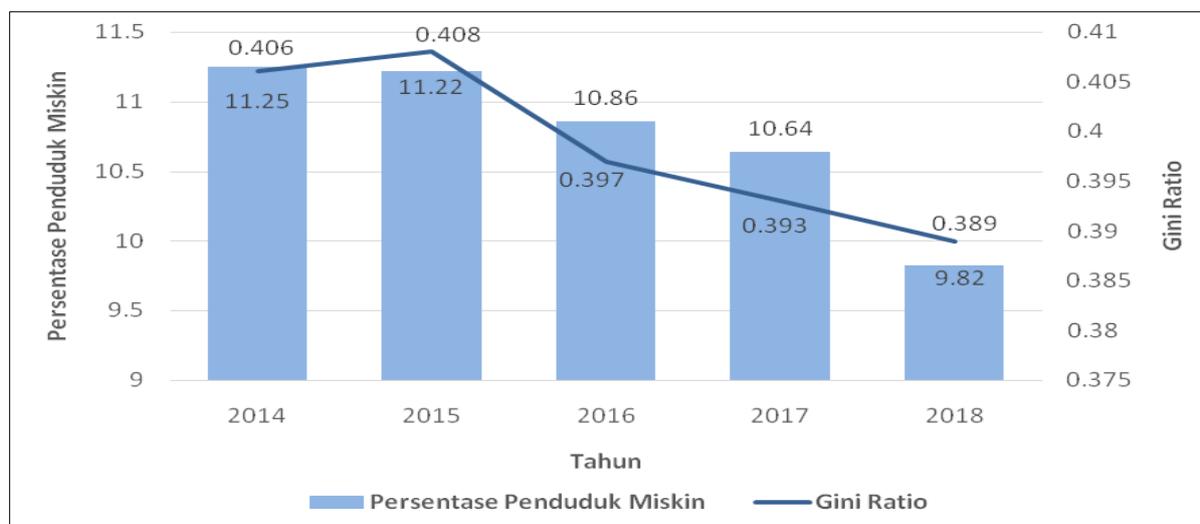
Tabel 3.3 Koefisien Gini per Provinsi 2014-2018

Provinsi	Gini Ratio				
	2014	2015	2016	2017	2018
Aceh	0,325	0,334	0,333	0,329	0,325
Sumatera Utara	0,321	0,336	0,319	0,315	0,318
Sumatera Barat	0,334	0,342	0,331	0,318	0,321
Riau	0,353	0,364	0,347	0,325	0,327
Jambi	0,329	0,361	0,349	0,335	0,334
Sumatera Selatan	0,399	0,360	0,348	0,361	0,358
Bengkulu	0,356	0,376	0,357	0,351	0,362
Lampung	0,347	0,376	0,364	0,334	0,346
Kep. Bangka Belitung	0,303	0,283	0,275	0,282	0,281

Provinsi	Gini Ratio				
	2014	2015	2016	2017	2018
Kep. Riau	0,402	0,364	0,354	0,334	0,330
DKI Jakarta	0,431	0,431	0,411	0,413	0,394
Jawa Barat	0,413	0,415	0,413	0,403	0,407
Jawa Tengah	0,376	0,382	0,366	0,365	0,378
DI Yogyakarta	0,419	0,433	0,420	0,432	0,441
Jawa Timur	0,369	0,415	0,402	0,396	0,379
Banten	0,395	0,401	0,394	0,382	0,385
Bali	0,415	0,377	0,366	0,384	0,377
Nusa Tenggara Barat	0,377	0,368	0,359	0,371	0,372
Nusa Tenggara Timur	0,355	0,339	0,336	0,359	0,351
Kalimantan Barat	0,391	0,334	0,341	0,327	0,339
Kalimantan Tengah	0,350	0,326	0,330	0,343	0,342
Kalimantan Selatan	0,359	0,353	0,332	0,347	0,344
Kalimantan Timur	0,348	0,316	0,315	0,330	0,342
Kalimantan Utara	-	0,294	0,300	0,308	0,303
Sulawesi Utara	0,424	0,368	0,386	0,396	0,394
Sulawesi Tengah	0,372	0,374	0,362	0,355	0,346
Sulawesi Selatan	0,425	0,424	0,426	0,407	0,397
Sulawesi Tenggara	0,409	0,399	0,402	0,394	0,409
Gorontalo	0,412	0,420	0,419	0,430	0,403
Sulawesi Barat	0,352	0,363	0,364	0,354	0,370
Maluku	0,351	0,340	0,348	0,343	0,343
Maluku Utara	0,325	0,280	0,286	0,317	0,328
Papua Barat	0,439	0,440	0,373	0,390	0,394
Papua	0,408	0,421	0,390	0,397	0,384
Indonesia	0,406	0,408	0,397	0,393	0,389

Sumber: BPS, 2018

Gambar 3.1 Koefisien Gini dan Angka Kemiskinan 2014 – 2018



Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat 2018, BPS

Kerentanan rumah tangga terhadap kemiskinan sebagian besar ditentukan oleh ketahanan strategi penghidupan dan peluang kerja di tingkat daerah dan lokal. Strategi penghidupan didefinisikan sebagai kemampuan, modal/aset - alam, fisik, manusia, ekonomi dan sosial - dan kegiatan yang digunakan oleh suatu rumah tangga untuk mendapatkan kebutuhan dasar seperti pangan, tempat tinggal, kesehatan dan pendidikan.

Strategi penghidupan rumah tangga bervariasi dan dapat mencakup pekerjaan baik di sektor formal maupun informal. Pada tahun 2017, BPS memperkirakan sebanyak 51,87 juta jiwa (41,65%) penduduk Indonesia bekerja di sektor formal dan 72,67 juta jiwa (58,35%) bekerja di sektor informal. Pekerja informal bertambah sebanyak 1,99 juta orang jika dibandingkan dengan tahun 2014 yang berjumlah 70,67 juta jiwa. Namun secara persentase, pekerja informal mengalami penurunan jika dibandingkan pekerja formal. Pekerja informal sebesar 60,17% pada tahun 2014 turun menjadi 58,35% pada tahun 2017.

Pada Agustus 2017, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebanyak 66,67% dimana angka ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2014 yang hanya sebesar 66,60%. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan sebesar 0,94% (dari 5,94% pada Agustus 2014 menjadi 5,50% pada Agustus 2017). Akan tetapi, perbedaan tingkat pengangguran antar wilayah masih tinggi (Tabel 3.4). Pada tahun 2017, provinsi Maluku memiliki TPT tertinggi (9,29%), diikuti oleh Banten (9,28%) dan Jawa Barat (8,22%), sedangkan yang terendah adalah Bali (1,48%).

Tabel 3.4 Tingkat Pengangguran Terbuka per Provinsi 2014-2017

Provinsi	2014	2015	2016	2017
Aceh	9,02	9,93	7,57	6,57
Sumatera Utara	6,23	6,71	5,84	5,60
Sumatera Barat	6,50	6,89	5,09	5,58
Riau	6,56	7,83	7,43	6,22
Jambi	5,08	4,34	4,00	3,87
Sumatera Selatan	4,96	6,07	4,31	4,39
Bengkulu	3,47	4,91	3,30	3,74
Lampung	4,79	5,14	4,62	4,33
Kepulauan Bangka Belitung	5,14	6,29	2,60	3,78
Kepulauan Riau	6,69	6,20	7,69	7,16
DKI Jakarta	8,47	7,23	6,12	7,14
Jawa Barat	8,45	8,72	8,89	8,22
Jawa Tengah	5,68	4,99	4,63	4,57
DI Yogyakarta	3,33	4,07	2,72	3,02
Jawa Timur	4,19	4,47	4,21	4,00
Banten	9,07	9,55	8,92	9,28
Bali	1,90	1,99	1,89	1,48
Nusa Tenggara Barat	5,75	5,69	3,94	3,32
Nusa Tenggara Timur	3,26	3,83	3,25	3,27
Kalimantan Barat	4,04	5,15	4,23	4,36
Kalimantan Tengah	3,24	4,54	4,82	4,23

Provinsi	2014	2015	2016	2017
Kalimantan Selatan	3,80	4,92	5,45	4,77
Kalimantan Timur	7,38	7,50	7,95	6,91
Kalimantan Utara	-	5,68	5,23	5,54
Sulawesi Utara	7,54	9,03	6,18	7,18
Sulawesi Tengah	3,68	4,10	3,29	3,81
Sulawesi Selatan	5,08	5,95	4,80	5,61
Sulawesi Tenggara	4,43	5,55	2,72	3,30
Gorontalo	4,18	4,65	2,76	4,28
Sulawesi Barat	2,08	3,35	3,33	3,21
Maluku	10,51	9,93	7,05	9,29
Maluku Utara	5,29	6,05	4,01	5,33
Papua Barat	5,02	8,08	7,46	6,49
Papua	3,44	3,99	3,35	3,62
Indonesia	5,94	6,18	5,61	5,50

Sumber: Statistik Indonesia 2018, BPS

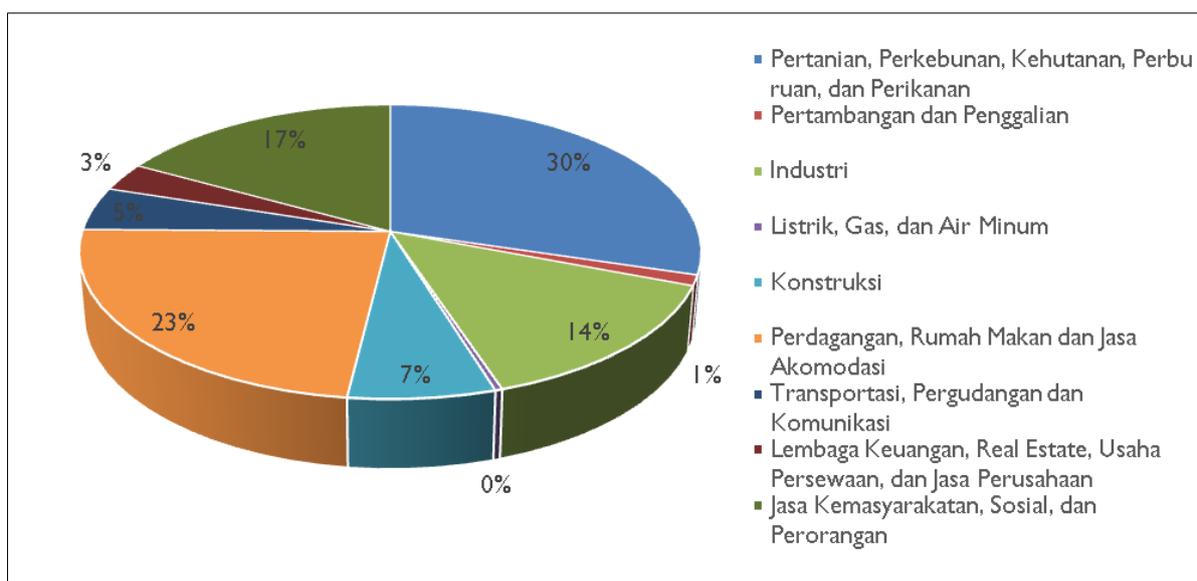
Dari total angkatan kerja, proporsi terbesar (30%) bekerja disektor pertanian, peternakan, kehutanan, perburuan dan perikanan, diikuti sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi sebanyak 23%. Dibandingkan dengan tahun 2014, perubahan yang paling signifikan dalam ketenagakerjaan terlihat pada sektor pertanian (turun 4,32%) dan sektor pertambangan dan penggalian (turun 0,1%). Sementara itu, sektor yang mengalami peningkatan terbesar adalah perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi (naik 1,62%), diikuti oleh sektor jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan (naik 0,85%) (Tabel 3.5).

Tabel 3.5 Penduduk 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama 2014 - 2017

No.	Lapangan Pekerjaan Utama	2014	2015	2016	2017
1	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	38.973.033	37.748.228	37.770.165	35.923.886
2	Pertambangan dan Penggalian	1.436.370	1.320.466	1.476.484	1.391.690
3	Industri	15.254.674	15.255.099	15.540.234	17.008.865
4	Listrik, Gas dan Air Minum	289.193	288.697	357.207	393.873
5	Konstruksi	7.280.086	8.208.086	7.978.567	8.136.636
6	Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	24.829.734	25.686.342	26.689.630	28.173.571
7	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	5.113.188	5.106.817	5.608.749	5.759.684
8	Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	3.031.038	3.266.538	3.531.525	3.752.262
9	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	18.420.710	17.938.926	19.459.412	20.481.956
	Total	114.628.026	114.819.199	118.411.973	121.022.423

Sumber: SAKERNAS 2014-2017, BPS

Gambar 3.2 Ketenagakerjaan Nasional per Sektor Agustus 2017



Sumber: SAKERNAS 2017, BPS

3.3. Pangsa Pengeluaran Pangan

Pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran keadaan kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi pendapatan suatu rumah tangga, maka porsi pengeluaran akan bergeser dari pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi.

Distribusi pengeluaran untuk pangan dari total pengeluaran merupakan indikator proksi dari ketahanan pangan rumah tangga. Teori Engel menyatakan semakin tinggi tingkat pendapatan maka persentase pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi pangan akan mengalami penurunan. Shan (1994) menyatakan bahwa pengeluaran pangan merupakan proksi yang baik untuk pendapatan permanen, selain itu juga merupakan indikator yang penting untuk melihat malnutrisi kronis dalam jangka panjang. Menurut Suhardjo (1996) dan Azwar (2004), pangsa pengeluaran pangan merupakan salah satu indikator ketahanan pangan, makin besar pangsa pengeluaran untuk pangan berarti ketahanan pangan semakin berkurang. Makin tinggi kesejahteraan masyarakat suatu negara pangsa, pengeluaran pangan penduduknya semakin kecil, demikian sebaliknya (Deaton dan Muellbauer 1980). Apabila distribusi pengeluaran untuk pangan lebih besar dari 65% dari total pengeluaran maka distribusi pengeluaran rumah tangga tersebut dikategorikan buruk (BKP dan WFP 2010; WFP 2009).

Persentase jumlah rumah tangga di Indonesia yang memiliki distribusi pengeluaran pangan terhadap total pengeluaran pada kategori buruk (lebih dari 65%) berdasarkan data Susenas Maret 2017 adalah sebesar 33,55%. Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki persentase rumah tangga dengan pangsa pengeluaran lebih dari 65% terbesar, yaitu 55,76%, diikuti oleh Aceh 48,26% dan Papua 44,08%. Tingginya persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran pangan yang besar mengindikasikan

tingkat kesejahteraan masyarakat di tiga provinsi tersebut masih tergolong rendah. Perlu upaya-upaya peningkatan pendapatan melalui penciptaan lapangan kerja dan usaha produktif sehingga terjadi peningkatan pendapatan yang tidak hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan tetapi juga non pangan.

Tabel 3.6 Persentase Rumah Tangga dengan Pangsa Pengeluaran Pangan lebih dari 65% 2017

Provinsi	Persentase
Aceh	48,26
Sumatera Utara	43,39
Sumatera Barat	40,45
Riau	30,96
Jambi	41,00
Sumatera Selatan	36,58
Bengkulu	35,83
Lampung	35,46
Kepulauan Bangka Belitung	22,33
Kepulauan Riau	11,88
DKI Jakarta	15,06
Jawa Barat	35,61
Jawa Tengah	31,31
DI Yogyakarta	25,96
Jawa Timur	38,12
Banten	25,44
Bali	12,85
Nusa Tenggara Barat	39,28
Nusa Tenggara Timur	55,76
Kalimantan Barat	36,69
Kalimantan Tengah	35,01
Kalimantan Selatan	32,22
Kalimantan Timur	13,01
Kalimantan Utara	18,90
Sulawesi Utara	38,14
Sulawesi Tengah	31,98
Sulawesi Selatan	26,44
Sulawesi Tenggara	17,81
Gorontalo	22,88
Sulawesi Barat	38,29
Maluku	29,60
Maluku Utara	24,07
Papua Barat	20,57
Papua	44,08
Total	33,55

Sumber: BPS, 2017

3.4. Bantuan Sosial untuk Akses terhadap Pangan

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai program bantuan sosial dan subsidi dalam upaya untuk memenuhi hak dasar, mengurangi beban hidup, serta memperbaiki kualitas hidup masyarakat kurang mampu. Berbagai bantuan sosial diberikan secara langsung kepada individu, keluarga, atau kelompok dari masyarakat kurang mampu melalui berbagai Kementerian/Lembaga pelaksana. Subsidi juga diberikan langsung kepada keluarga atau kelompok masyarakat, namun sebagian besar subsidi masih dalam bentuk subsidi barang. Sedikitnya terdapat 89 program yang digolongkan sebagai program untuk masyarakat kurang mampu (TNP2K 2018). Program-program tersebut sudah dilaksanakan secara reguler oleh berbagai Kementerian/Lembaga mencakup bidang pangan, pendidikan, kesehatan, energi, ekonomi dan sosial, perumahan, pertanian, dan kelautan perikanan.

Dalam rangka meningkatkan akses terhadap pangan, terdapat dua program utama yang dilakukan oleh pemerintah yaitu Beras Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program Rastra memberikan subsidi pangan (beras) bagi masyarakat yang termasuk miskin dan rentan miskin. Program ini dimulai sejak 1998 dengan nama Operasi Pasar Khusus (OPK) yang merupakan program darurat untuk merespon krisis ekonomi. Pada tahun 2002, program OPK berubah menjadi program Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin). Pada tahun 2016, program Raskin mulai disosialisasikan dengan nama baru, yaitu Program Beras Sejahtera (Rastra). Penerima manfaat program Rastra adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah. Jumlah KPM pada tahun 2017 adalah sebanyak 14,2 juta keluarga dengan total subsidi sebesar Rp 19 triliun. Beras Rastra 15 kg/bulan/KPM dengan harga Rp 1.600/kg di titik bagi (TNP2K 2018).

Sementara itu, program BPNT memberikan bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan tertentu di pedagang bahan pangan dan/atau e-warung yang bekerjasama dengan bank. BPNT diberlakukan sejak tahun 2017. Penerima manfaat adalah KPM dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah. Total anggaran tahun 2017 adalah sebesar Rp 1,6 triliun. Setiap KPM memperoleh voucher elektronik untuk mendapatkan pangan sebesar Rp 110.000/bulan.

3.5. Strategi untuk Peningkatan Akses

Strategi utama untuk meningkatkan akses pangan dan mencapai ketahanan pangan dan gizi dilakukan dengan cara meningkatkan dan menjaga daya beli rumah tangga, menjaga stabilisasi harga, dan menjamin ketersediaan pangan di pasar. Meningkatkan kapasitas penghasilan dan mata pencaharian merupakan faktor yang penting juga untuk meningkatkan daya beli rumah tangga. Program penanggulangan atau pengentasan kemiskinan dirancang dengan baik dan memiliki target kunci untuk mencapai tujuan ini.

Dalam empat dekade terakhir, tren persentase penduduk miskin di Indonesia menunjukkan penurunan dari 60% pada tahun 1970 menjadi 11,4% pada tahun 2013. Namun demikian, terjadi perlambatan penurunan kemiskinan sejak tahun 2010, dari 1,2% per tahun pada periode 2006-2010 menjadi 0,5% per tahun pada periode 2010-2013. Selain itu, ketimpangan yang ditunjukkan oleh rasio

gini meningkat dari 0,341 pada tahun 2002 menjadi 0,393 pada Maret 2017. Untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan tersebut, Pemerintah Indonesia telah mengadakan berbagai program bantuan kepada individu, keluarga, atau kelompok masyarakat kurang mampu.

Program pengentasan kemiskinan tingkat rumah tangga dan masyarakat adalah: i) Memberikan bantuan diversifikasi mata pencaharian bagi petani di pedesaan yang dapat meningkatkan ketahanan rumah tangga rentan terhadap guncangan, menjadi perhatian serius di negara rawan bencana seperti Indonesia; ii) Meningkatkan akses terhadap kredit mikro, terutama bagi perempuan dan pemilik usaha kecil dan menengah; iii) Meningkatkan akses di masyarakat miskin pedesaan terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan pelayanan gizi, termasuk keluarga berencana, dan infrastruktur dasar seperti sanitasi, air bersih, jalan, pasar, dan listrik; dan iv) Memperkuat program jaring pengaman sosial. Strategi adaptasi perubahan iklim dan diversifikasi penghidupan berkelanjutan yang melindungi lingkungan hidup merupakan program kunci lintas sektor dalam pendekatan pengentasan kemiskinan.

Sebagai langkah awal untuk mengurangi angka kemiskinan, pemerintah telah menetapkan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan atau Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) sebagai strategi jangka panjang 2005-2025. Implementasi SNPK dilakukan melalui program-program penanggulangan kemiskinan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah. Demikian pula halnya di tingkat daerah, dengan mengacu pada SNPK, pemerintah daerah telah menetapkan strategi penanggulangan kemiskinan daerah. Substansi inti program aksi penanggulangan kemiskinan pemerintah adalah sebagai berikut (BAPPENAS, 2014):

- Penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif;
- Menciptakan lapangan kerja yang berkualitas;
- Perluasan dan peningkatan layanan dasar; dan
- Pengembangan penghidupan berkelanjutan.

Indonesia telah memperluas jaring pengaman sosial yang menggunakan berbagai mekanisme, termasuk bantuan sosial bersyarat dan tanpa syarat (bantuan tunai), pelayanan kesehatan gratis, beasiswa untuk siswa miskin, beras bersubsidi, hibah masyarakat dan kredit. Pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat kerap dikenal sebagai pembayaran dengan skema *Government to Person* (G2P). Pembayaran dengan skema G2P dapat meliputi pembayaran bantuan sosial, subsidi, gaji, pensiun serta insentif bagi pegawai negeri. Indonesia sendiri memiliki berbagai program yang disalurkan dengan skema G2P, termasuk bantuan sosial dan bantuan pemerintah. Di Indonesia, program-program dengan skema G2P masih diselenggarakan secara terpisah oleh berbagai Kementerian/Lembaga (K/L). Sebagai contoh, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyalurkan dana untuk Program Indonesia Pintar (PIP) untuk sekolah umum, Kementerian Agama menyalurkan dana untuk PIP untuk sekolah berbasis agama, dan Kementerian Sosial menyalurkan dana untuk program rehabilitasi sosial untuk kelompok masyarakat yang rentan terhadap masalah sosial. Selain itu, program skema G2P juga banyak disalurkan oleh kementerian teknis lainnya yang secara umum ditargetkan kepada kelompok masyarakat yang rentan.

Tabel 3.7 Program Bantuan Pemerintah untuk Individu, Keluarga dan Kelompok Kurang Mampu 2017

No.	Program	Kementerian/Lembaga Pelaksana
Program di Bidang Pangan		
1	Beras Sejahtera (Rastra)/Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Renda	Kementerian Sosial
2	Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	Kementerian Sosial
Program di Bidang Pendidikan		
3	Program Indonesia Pintar (PIP)	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
4	PIP untuk Siswa Sekolah Agama	Kementerian Agama
5	Bidikmisi	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
6	Bidikmisi Keagamaan (PTKIN/S)	Kementerian Agama
7	Program Keterampilan Hidup	
7a	Program Pendidikan Kecakapan Kerja Unggulan (PKKU)	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
7b	Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha unggulan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Program di Bidang Kesehatan		
8	Program Indonesia Sehat (PIS)	Kementerian Kesehatan
Program di Bidang Energi		
9	Program Subsidi Listrik	Kementerian ESDM
10	Program Subsidi ELPIJI 3 Kg	Kementerian ESDM
11	Bantuan Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE)	Kementerian ESDM
Program di Bidang Sosial dan Ekonomi		
12	Program Keluarga Harapan (PKH)	Kementerian Sosial
13	Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Kementerian Sosial
14	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Kementerian Sosial
15	Program Temu Penguatan Kapasitas Anak dan Keluarga (TEPAK)	Kementerian Sosial
16	Asistensi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB)	Kementerian Sosial
17	Asistensi Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar (ASLUT)	Kementerian Sosial
Program di Bidang Perumahan		
18	Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) dan Sarana Lingkungan (Sarling)	Kementerian Sosial
19	Bantuan Pembiayaan Perumahan	
19a	Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)	Kementerian PU dan Perumahan Rakyat
19b	Subsidi Selisih Bunga (SSB)	Kementerian PU dan Perumahan Rakyat
19c	Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM)	Kementerian PU dan Perumahan Rakyat
20	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	Kementerian PU dan Perumahan Rakyat
Program di Bidang Pertanian		
21	Subsidi Pupuk	Kementerian Pertanian
22	Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi (BP-AUTP)	Kementerian Pertanian
23	Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi (BP-AUTS)	Kementerian Pertanian
Program di Bidang Kelautan dan Perikanan		
24	Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN)	Kementerian Kelautan dan Perikanan
25	Bantuan Premi Asuransi Perikanan bagi Pembudidaya Ikan Kecil (BP-APPIK)	Kementerian Kelautan dan Perikanan

Sumber: TNP2K 2018

Dalam rangka peningkatan penganeekaragaman dan akses pangan, Badan Ketahanan Pangan juga telah mengembangkan program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), Kawasan Mandiri Pangan (KMP), dan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM). KRPL bertujuan untuk optimalisasi pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga serta pendapatan secara berkelanjutan. KRPL memberdayakan kelompok wanita/masyarakat lainnya dengan kelompok sasaran pada tahun 2018 sebanyak 2.300 kelompok. Kegiatan KRPL meliputi: (1) Kebun bibit desa demplot; (2) Pengembangan lahan pekarangan; (3) Pengembanan kebun sekolah; dan (4) Pengolahan hasil pekarangan (Menu B2SA).

KRPL dapat mengurangi pengeluaran pangan sebesar Rp 750 ribu – 1,5 juta per bulan, mendukung diversifikasi pangan berbasis pangan lokal, meningkatkan ketahanan dan kemandirian pangan keluarga, konservasi sumberdaya genetik lokal (lebih dari 300 komoditas), serta mengurangi jejak karbon dan emisi dengan target penurunan 29% pada tahun 2030. Program yang dilakukan dinilai mampu memberikan manfaat dalam meningkatkan keberagaman konsumsi dan akses pangan. Hal ini telah sejalan dengan hasil berbagai kajian. Berdasarkan kajian Bertiet *al.* (2004), program intervensi *home garden* yang melibatkan pemberdayaan wanita dan pendidikan gizi dapat memperbaiki status gizi keluarga. Kajian Webb Girard *et al.* (2012) menunjukkan bahwa intervensi *home garden* dapat meningkatkan keragaman konsumsi pangan dan meningkatkan konsumsi sayur dan buah. Masset *et al.* (2017) menunjukkan pula bahwa *home garden* dapat meningkatkan asupan vitamin A pada balita.

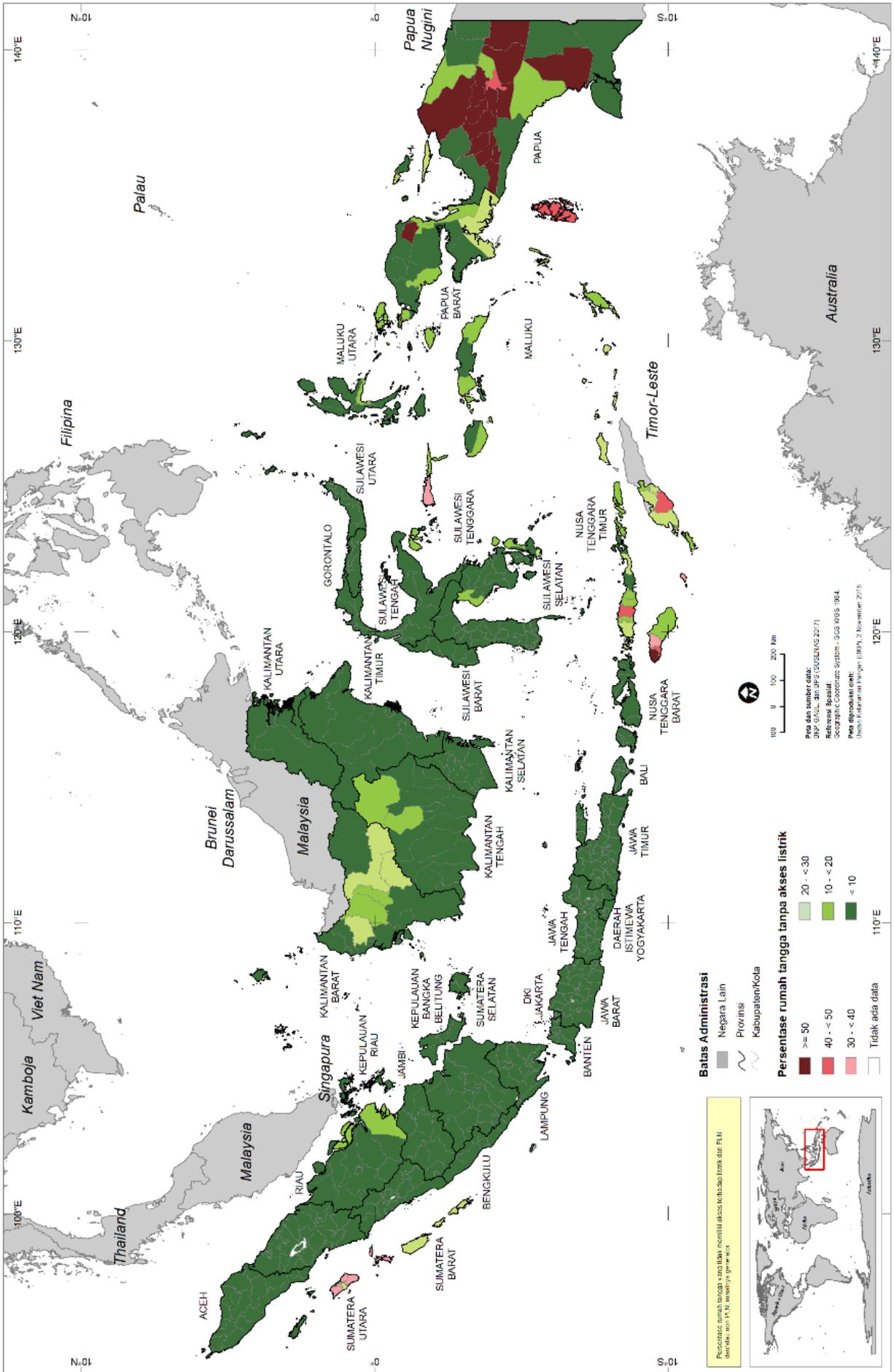
BKP juga melaksanakan program Kawasan Mandiri Pangan (KMP). Kegiatan KMP yang dilakukan sejak 2015 bertujuan untuk mendorong ketersediaan pangan di pedesaan, sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dalam melakukan usaha, penguatan kelembagaan ekonomi, dan integrasi dukungan lintas sektor. Kegiatan lain yang dilakukan adalah Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) melalui Toko Tani Indonesia (TTI). Tujuan kegiatan PUPM melalui TTI adalah: (1) Menyerap produk pertanian nasional dengan harga yang layak dan menguntungkan petani; (2) Mendukung stabilisasi pasokan dan harga; dan (3) Memberikan kemudahan akses konsumen/masyarakat terhadap bahan pangan pokok dan strategis yang berkualitas dengan harga yang wajar. Selain itu juga dikembangkan kegiatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM). LPM bertujuan untuk mengembangkan cadangan pangan masyarakat. Dengan adanya LPM, masyarakat akan lebih mudah untuk mengakses pangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar A. 2004. Aspek Kesehatan dan Gizi dalam Ketahanan Pangan. Dalam Prosiding Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VIII: Ketahanan Pangan dan Gizi di Era Otonomi Daerah dan Globalisasi. Jakarta: BPS, Departemen Kesehatan, Badan POM, Bappenas, Departemen Pertanian dan Ristek.
- [BKP dan WFP] Badan Ketahanan Pangan dan World Food Programme. 2010. *Percontohan Monitoring Sistem Ketahanan Pangan dan Gizi (SKPG Plus)*. Jakarta (ID): Badan Ketahanan Pangan dan World Food Programme.
- Berti et al., 2004. P.R. Berti, J. Krasevec, S. Fitzgerald. 2004. *A review of the effectiveness of agriculture interventions in improving nutrition outcomes*. Public Health Nutr., 7 (2004), pp. 599-609.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2018. *Statistik Indonesia 2018*. Jakarta: BPS.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2018. *Indikator Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: BPS.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2017. *Survey Angkatan Kerja Nasional*. Jakarta: BPS.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2017. *Survey Sosial Ekonomi Nasional*. Jakarta: BPS.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2016. *Survey Sosial Ekonomi Nasional*. Jakarta: BPS.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2015. *Survey Sosial Ekonomi Nasional*. Jakarta: BPS.
- Deaton A. and J. Muellbauer. 1980. *Economics and Consumer Behavior*. London: Cambridge University Press.
- [DKP dan WFP] Dewan Ketahanan Pangan dan World Food Programme. 2013. *Panduan Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia*. Jakarta (ID): Dewan Ketahanan Pangan dan World Food Programme.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS. 2014. *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2015-2019*. Jakarta: Bappenas.
- Masset E, L. Haddad, A. Cornelius, J. Isaza-Castro. 2012. *Effectiveness of agricultural interventions that aim to improve nutritional status of children: systematic review (d8222–d8222)*. BMJ, 344.
- Sabarella. 2005. *Model persamaan struktural kerawanan pangan*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Sofiati EL. 2010. *Analisis kerawanan pangan di tingkat kecamatan Kota Bogor*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Suhardjo. 1996. *Pengertian dan kerangka pikir ketahanan pangan rumah tangga*. Makalah disampaikan pada Lokakarya Ketahanan Pangan Rumah Tangga, 20 – 30 Mei 1996, Yogyakarta.
- [TNP2K] Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 2018. *Program Bantuan Pemerintah Untuk Individu, Keluarga, dan Kelompok Tidak Mampu Menuju Bantuan Sosial Terintegrasi*. Jakarta: TNP2K.
- [WEF] World Economic Forum. 2018. *The Global Competitiveness Report 2017–2018*. Genewa: WEF.
- [WFP] World Food Programme. 2009. *Comprehensive Food Security and Vulnerability Analysis Guidelines*. First edition. Roma: World Food Programme.
- Webb-Girard, J.L. Self, C. McAuliffe, O. Olude. 2012. *The effects of household food production strategies on the health and nutrition outcomes of women and young children: a systematic review*. Paediatr. Perinat. Epidemiol., 26, pp. 205-222.
- Wiranthi PE, Suwarsinah HK and Adhi AK. 2002. *Determinants of household food security: a comparative analysis of Eastern and Western Indonesia*. Indones J Agric Sci. 15(1):17-28.



Peta 3.1: Rumah tangga tanpa akses terhadap listrik



BAB 4

PEMANFAATAN PANGAN

Pemanfaatan pangan merupakan salah satu dari 3 pilar ketahanan pangan. Pemanfaatan pangan didefinisikan sebagai kemampuan tubuh manusia untuk mencerna dan mengatur metabolisme makanan. Dengan perawatan kesehatan dan praktek pemberian makanan yang baik, penyiapan makanan, keragaman diet/pangan, dan pola distribusi makanan di dalam rumah tangga, maka akan menghasilkan asupan energi dan gizi yang cukup. Oleh karena itu, untuk menjalankan fungsi pemanfaatan pangan yang baik prasyarat seperti asupan pangan yang bergizi, air bersih, sanitasi serta layanan kesehatan harus tersedia dalam jumlah yang cukup.

Dalam penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan, aspek pemanfaatan pangan diukur berdasarkan indikator tenaga kesehatan; akses air bersih; lama sekolah perempuan; prevalensi stunting dan angka harapan hidup pada saat lahir. Karena ketersediaan data yang terbatas, maka indikator langsung pemanfaatan pangan seperti angka konsumsi pangan tidak digunakan dalam penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan. Namun demikian sub bab mengenai konsumsi pangan tetap dimasukkan dalam bab pemanfaatan pangan untuk mengetahui situasi konsumsi pangan nasional secara umum.

4.1. Konsumsi Pangan

Berdasarkan Susenas 2017, rata-rata konsumsi energi harian nasional dilaporkan sebesar 2.152 kkal/kapita/hari sedikit lebih tinggi dari Angka Kecukupan Gizi (AKG) nasional yang direkomendasikan dalam Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi X tahun 2012 sebesar 2.150 kkal/kapita/hari (Tabel 4.1). Sementara itu, rata-rata asupan protein nasional sebesar 62,2 gram/kapita/hari lebih tinggi dibandingkan angka kecukupan protein nasional sebesar 57 gram/kapita/hari¹.

Rata-rata konsumsi energi harian per kapita di 16 provinsi juga dilaporkan lebih tinggi dari AKG nasional. Rata-rata konsumsi tertinggi dimiliki oleh provinsi Sulawesi Utara, yaitu sebesar 2.291,67 kkal/kap/hari atau 106,59% AKG nasional dan rata-rata konsumsi terendah adalah Provinsi Maluku Utara sebesar 1.783,27 kkal/kap/hari atau hanya 82,94 persen AKG nasional. Berbeda dengan konsumsi energi, mayoritas provinsi (27 dari 34 provinsi) memiliki asupan protein yang lebih tinggi dari AKG nasional. Provinsi yang tercatat memiliki asupan protein lebih rendah dari AKG nasional adalah provinsi Papua (46,03), Maluku Utara (49,77), Papua Barat (53,20) dan Maluku (53,90).

Konsumsi energi dan protein yang dihitung dengan menggunakan data survey rumah tangga SUSENAS tidak menghitung konsumsi di luar rumah tangga, seperti hotel, restoran, kafe, warung makan, dll.

¹ Estimasi kilo kalori dan protein tahun 2017 berdasarkan data dari Susenas, BPS bulan Maret 2017

Apabila konsumsi di luar rumah tangga tersebut ikut diperhitungkan, maka asupan energi dan protein aktual akan lebih besar dibandingkan dengan angka konsumsi yang dilaporkan pada saat ini.

Tabel 4.1 Konsumsi Energi per Kapita per Hari Menurut Provinsi 2017

No.	Provinsi	Kalori (kkal/kap/hari)	% AKG	Protein (gram/kap/hari)	% AKG
1	Aceh	2.115,09	98,38%	59,63	104,61%
2	Sumatera Utara	2.133,84	99,25%	61,03	107,07%
3	Sumatera Barat	2.163,52	100,63%	58,40	102,46%
4	Riau	2.112,58	98,26%	59,44	104,28%
5	Jambi	2.108,89	98,09%	57,18	100,32%
6	Sumatera Selatan	2.250,05	104,65%	63,12	110,74%
7	Bengkulu	2.106,82	97,99%	57,51	100,89%
8	Lampung	2.150,83	100,04%	58,57	102,75%
9	Kep. Bangka Belitung	2.164,98	100,70%	65,27	114,51%
10	Kep. Riau	2.180,00	101,40%	66,35	116,40%
11	Dki Jakarta	2.153,62	100,17%	68,44	120,07%
12	Jawa Barat	2.230,92	103,76%	65,59	115,07%
13	Jawa Tengah	2.080,76	96,78%	59,96	105,19%
14	Di Yogyakarta	2.254,22	104,85%	69,78	122,42%
15	Jawa Timur	2.140,55	99,56%	61,93	108,65%
16	Banten	2.249,33	104,62%	66,53	116,72%
17	Bali	2.239,32	104,15%	64,11	112,47%
18	Nusa Tenggara Barat	2.187,31	101,74%	62,85	110,26%
19	Nusa Tenggara Timur	2.031,60	94,49%	55,92	98,11%
20	Kalimantan Barat	1.960,58	91,19%	56,16	98,53%
21	Kalimantan Tengah	2.162,87	100,60%	63,14	110,77%
22	Kalimantan Selatan	2.286,87	106,37%	67,19	117,88%
23	Kalimantan Timur	1.997,46	92,91%	61,11	107,21%
24	Kalimantan Utara	1.977,32	91,97%	62,61	109,84%
25	Sulawesi Utara	2.291,67	106,59%	67,42	118,28%
26	Sulawesi Tengah	2.165,32	100,71%	59,63	104,61%
27	Sulawesi Selatan	2.209,75	102,78%	63,73	111,81%
28	Sulawesi Tenggara	2.131,69	99,15%	61,95	108,68%
29	Gorontalo	2.143,18	99,68%	60,16	105,54%
30	Sulawesi Barat	2.057,51	95,70%	55,41	97,21%
31	Maluku	1.886,52	87,75%	53,90	94,56%
32	Maluku Utara	1.783,27	82,94%	49,77	87,32%
33	Papua Barat	1.875,44	87,23%	53,20	93,33%
34	Papua	1.924,39	89,51%	46,03	80,75%
INDONESIA		2.152,64	100,12%	62,20	109,12%

Sumber: BPS, 2017(a)

Berdasarkan komposisinya, padi-padian dan umbi-umbian masih menjadi penyumbang terbesar dari total konsumsi energi harian sebesar 41,77% (Tabel 4.2). Selanjutnya makanan dan minuman jadi penyumbang terbesar kedua dengan kontribusi sebesar 23,15%. Minyak dan lemak menyumbang 11,7%; ikan, daging, telur dan susu menyumbang 8,23%; kacang-kacangan menyumbang 2,75% sedangkan sayuran dan buah menyumbang 4,26%. Kontribusi dari masing-masing kelompok bahan makanan tersebut relatif lebih kecil apabila dibandingkan dengan rekomendasi WNPG X tahun 2012. Namun demikian, kontribusi dari masing-masing kelompok bahan makanan yang terkandung dalam makanan dan minuman jadi belum diperhitungkan, sehingga mengecilkan kontribusi aktual masing-masing kelompok bahan makanan terhadap total asupan energi harian.

Sebagian besar asupan protein harian juga masih bergantung pada kelompok padi-padian, yaitu sebesar 39,12% dari total asupan protein harian (Tabel 4.3). Selain padi-padian, asupan protein juga dipenuhi dari pangan sumber protein hewani dan kacang-kacangan masing-masing sebesar 25,37% dan 9,05%; dan kelompok makanan dan minuman jadi sebesar 23,41%.

Secara umum, kontribusi padi-padian dan umbi-umbian terhadap total asupan energi menunjukkan tren yang menurun selama 10 tahun terakhir. Kontribusi padi-padian dan umbi-umbian terhadap asupan energi harian mengalami penurunan dari 53,1% pada tahun 2005 menjadi 48,1% pada tahun 2014 dan 41,77% pada tahun 2017. Berbeda dengan konsumsi padi-padian dan umbi-umbian yang terus mengalami penurunan, konsumsi makanan dan minuman jadi terus mengalami peningkatan sejak tahun 2005. Pada tahun 2017, kontribusi makanan dan minuman jadi terhadap asupan energi harian meningkat menjadi 23,15% dibandingkan sebelumnya sebesar 11,6% pada tahun 2005 dan 16,4% pada 2014.

Untuk mengetahui hubungan antara tingkat kesejahteraan dengan pola konsumsi pangan penduduk, maka pola konsumsi pangan dipisahkan berdasarkan kuintil pengeluaran. Kuintil pengeluaran diperoleh dengan mengurutkan pengeluaran per kapita dari yang terkecil hingga yang terbesar kemudian dibagi rata menjadi lima kelompok. Pada umumnya, dengan semakin tingginya kuintil pengeluaran maka semakin sejahtera penduduk tersebut dan semakin tinggi konsumsinya.

Berdasarkan Tabel 4.2, penduduk yang berada pada kuintil pengeluaran 1-2 belum memenuhi angka konsumsi energi dan protein yang direkomendasikan oleh WNPG X tahun 2012. Sebaliknya konsumsi energi dan protein penduduk pada kuintil pengeluaran 3-5 sudah di atas angka yang direkomendasikan untuk energi dan protein sebesar 2.150 kkal/kapita/hari dan 57 gram/kapita/hari. Namun demikian, asupan energi dan protein terbesar dari semua kuintil pengeluaran masih bersumber dari kelompok padi-padian dengan kecenderungan yang menurun dengan semakin tingginya kuintil. Penduduk pada kuintil lima, yang merupakan kelompok paling sejahtera, mengkonsumsi paling sedikit padi-padian dibandingkan empat kelompok lainnya. Rendahnya konsumsi padi-padian ini dibarengi dengan meningkatnya konsumsi daging, telur dan susu, minyak serta makanan dan minuman jadi. Perbedaan sumber konsumsi protein antar kuintil terlihat jelas untuk kelompok ikan, telur dan susu, makanan dan minuman jadi serta daging. Konsumsi protein yang bersumber dari ikan, telur dan susu, makanan dan minuman jadi serta daging pada kuintil kelima antara 2-6 kali lipat lebih besar dari konsumsi pada kuintil pertama.

Tabel 4.2 Konsumsi Energi per Kapita per Hari Menurut Kelompok Makanan dan Kuintil Pengeluaran 2017

No	Kelompok Makanan	Kuintil 1	%	Kuintil 2	%	Kuintil 3	%	Kuintil 4	%	Kuintil 5	%	Rata-rata	%
1	Padi-padian	850,0	49,6	882,7	44,7	884,8	41,0	869,3	36,9	770,34	30,0	851,4	39,6
2	Umbi-umbian	50,1	2,9	43,7	2,2	46,0	2,1	51,3	2,2	47,2	1,8	47,7	2,2
3	Ikan	30,3	1,8	41,1	2,1	49,7	2,3	58,3	2,5	66,5	2,6	49,2	2,3
4	Daging	23,4	1,4	41,3	2,1	59,7	2,8	83,9	3,6	130,2	5,1	67,7	3,1
5	Telur dan susu	27,9	1,6	42,1	2,1	55,0	2,6	72,2	3,1	105,2	4,1	60,5	2,8
6	Sayur-sayuran	32,3	1,9	36,0	1,8	39,4	1,8	43,0	1,8	43,9	1,7	38,9	1,8
7	Kacang-kacangan	45,3	2,6	53,2	2,7	58,7	2,7	66,7	2,8	72,4	2,8	59,2	2,8
8	Buah-buahan	32,3	1,9	41,4	2,1	50,2	2,3	61,6	2,6	78,1	3,0	52,7	2,5
9	Minyak dan kelapa	187,2	10,9	228,6	11,6	258,2	12,0	285,1	12,1	303,0	11,8	252,4	11,7
10	Bahan minuman	75,4	4,4	91,1	4,6	100,8	4,7	110,0	4,7	113,3	4,4	98,1	4,6
11	Bumbu-bumbuan	8,4	0,5	10,8	0,6	12,5	0,6	14,4	0,6	15,5	0,6	12,3	0,6
12	Konsumsi lainnya	41,4	2,4	54,7	2,8	64,5	3,0	75,7	3,2	84,5	3,3	64,1	3,0
13	Makanan dan minuman jadi	309,8	18,1	409,2	20,7	476,4	22,1	561,9	23,9	734,3	28,6	498,3	23,2
Total		1.713,8	100	1.975,8	100	2.155,8	100	2.353,3	100	2.564,5	100	2.152,6	100
% AKG Nasional (2.150 kkal)		79,71%		91,90%		100,27%		109,45%		119,28%		100,12%	

Sumber: BPS, 2017(a)

Tabel 4.3 Konsumsi Protein per Kapita per Hari Menurut Kelompok Makanan dan Kuintil Pengeluaran 2017

No	Kelompok Makanan	Kuintil 1	%	Kuintil 2	%	Kuintil 3	%	Kuintil 4	%	Kuintil 5	%	Rata-rata	%
1	Padi-padian	20,0	44,0	20,7	38,3	20,79	34,2	20,4	29,6	18,1	22,3	20,0	32,2
2	Umbi-umbian	0,4	0,8	0,4	0,7	0,41	0,7	0,5	0,7	0,5	0,6	0,4	0,7
3	Ikan	5,0	10,9	6,8	12,5	8,26	13,6	9,8	14,2	11,4	14,0	8,2	13,2
4	Daging	1,4	3,2	2,5	4,7	3,67	6,0	5,2	7,5	8,2	10,0	4,2	6,8
5	Telur dan susu	1,7	3,7	2,4	4,4	3,07	5,0	3,9	5,7	5,7	7,0	3,4	5,4
6	Sayur-sayuran	2,2	4,8	2,3	4,3	2,48	4,0	2,7	3,8	2,6	3,2	2,4	3,9
7	Kacang-kacangan	4,4	9,7	5,1	9,5	5,58	9,2	6,3	9,1	6,7	8,3	5,6	9,1
8	Buah-buahan	0,3	0,7	0,4	0,7	0,49	0,8	0,6	0,9	0,8	1,0	0,5	0,9
9	Minyak dan kelapa	0,2	0,4	0,2	0,4	0,23	0,4	0,2	0,4	0,2	0,3	0,2	0,3
10	Bahan minuman	0,7	1,5	0,8	1,4	0,83	1,4	0,9	1,3	0,9	1,1	0,8	1,3
11	Bumbu-bumbuan	0,4	0,8	0,5	0,9	0,54	0,9	0,6	0,9	0,7	0,8	0,5	0,9
12	Konsumsi lainnya	0,8	1,8	1,1	2,0	1,27	2,1	1,5	2,2	1,6	2,0	1,3	2,0
13	Makanan dan minuman jadi	8,1	17,8	11,0	20,3	13,24	21,8	16,5	23,9	24,0	29,5	14,6	23,4
Total		45,4	100	54,2	100	60,86	100	69,1	100	81,5	100	62,2	100
% AKG Nasional (57 gram)		79,68%		95,07%		106,77%		121,19%		142,95%		109,12%	

Sumber: BPS, 2017(a)

4.2. Tenaga Kesehatan

Untuk dapat menjalankan fungsi pemanfaatan pangan yang baik, tubuh harus memiliki status kesehatan yang baik. Apabila kesehatan terganggu, sistem pencernaan dan metabolisme makanan tidak akan bisa berlangsung secara optimal. Oleh karena itu, pembangunan dan peningkatan kualitas sektor kesehatan harus terus diupayakan untuk meningkatkan status kesehatan setiap individu. Namun demikian, tantangan yang dihadapi dalam pembangunan sektor kesehatan cukup banyak antara lain terkait dengan kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan. Sarana prasana dan infrastruktur yang kurang memadai hingga jumlah tenaga medis yang terbatas menjadi kendala dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Selain itu pelayanan kesehatan di Indonesia masih belum cukup menjangkau seluruh penduduk terutama di wilayah timur Indonesia. Luasnya wilayah Indonesia dan kondisi geografis yang sulit menjadi salah satu penghambat upaya pemerataan pelayanan kesehatan di daerah tersebut.

Pembangunan sektor kesehatan merupakan salah satu tujuan dari *Sustainable Development Goals*, yaitu tujuan 3: kesehatan dan kesejahteraan yang baik. Dua diantara tiga belas targetnya yang terkait dengan pembangunan sektor kesehatan adalah meningkatkan pembiayaan kesehatan dan perekrutan, pengembangan, pelatihan dan retensi tenaga kerja kesehatan di negara berkembang, terutama di negara-negara terbelakang dan negara-negara kepulauan kecil yang sedang berkembang serta memperkuat kapasitas semua negara, khususnya negara-negara berkembang untuk peringatan dini, pengurangan risiko dan manajemen risiko kesehatan nasional dan global.

Berdasarkan Data dan Informasi Profil Kesehatan Indonesia 2017 (Kementerian Kesehatan, 2017), jumlah lembaga pelayanan kesehatan mengalami peningkatan sejak tahun 2014. Jumlah rumah sakit di Indonesia meningkat dari 2.406 rumah sakit pada tahun 2014 menjadi 2.776 rumah sakit pada tahun 2017 yang terdiri dari 2.198 Rumah Sakit Umum (RSU) dan 578 Rumah Sakit Khusus (RSK). Lembaga pelayanan kesehatan lainnya adalah Puskesmas berjumlah 9.825 unit yang terdiri dari 3.454 unit Puskesmas rawat inap dan 6.371 unit Puskesmas non rawat inap. Disamping melalui penambahan infrastruktur kesehatan, pembangunan sektor kesehatan juga dilakukan melalui penambahan dan pengembangan kapasitas tenaga kesehatan. Dalam Undang-Undang nomor 36 tahun 2014, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan yang dimaksud dalam buku ini meliputi dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, perawat, bidan dan tenaga gizi.

Berdasarkan rasio antara jumlah penduduk per tenaga kesehatan dengan kepadatan penduduk, rata-rata 1 orang tenaga kesehatan di Indonesia bekerja melayani wilayah seluas 2,84 km² dengan rata-rata kepadatan penduduk sebesar 136 jiwa/km² (Tabel 4.4). Rasio terendah berada di Provinsi DKI Jakarta yang memiliki nilai rasio sebesar 0,015, artinya masing-masing tenaga kesehatannya melayani wilayah seluas 0,015 km² dengan rata-rata kepadatan penduduk sebesar 15.624 jiwa/km² atau menangani sebanyak 234 jiwa penduduk. Sebagai perbandingan, rasio tertinggi berada di Provinsi Papua Barat yang memiliki nilai rasio sebesar 29,41 yang berarti masing-masing tenaga kesehatannya bekerja di wilayah seluas 29,41 km² dengan rata-rata kepadatan penduduk sebesar 33 jiwa/km² atau menangani sebanyak 970 jiwa penduduk. Sementara itu, Provinsi Papua dengan rasio 27,02 menunjukkan masing-masing tenaga kesehatannya melayani wilayah seluas 27,02 km² dengan kepadatan penduduk 3 jiwa/km² atau menangani sebanyak 81 jiwa penduduk.

Tabel 4.4 Rasio Jumlah Penduduk per Tenaga Kesehatan terhadap Kepadatan Penduduk 2017

No.	Provinsi	Jumlah Tenaga Kesehatan (Jiwa)*	Jumlah Penduduk 2017 (Jiwa)**	Luas Wilayah (Km ²)**	Kepadatan Penduduk 2017 (Jiwa/Km ²)**	Rasio (d/c/f)
a	b	c	d	e	f	g
1	Aceh	28.179	5.189.466	57.956	90	2,06
2	Sumatera Utara	40.530	14.262.147	72.981	195	1,80
3	Sumatera Barat	16.914	5.321.489	42.013	127	2,48
4	Riau	18.190	6.657.911	87.024	77	4,78
5	Jambi	13.188	3.515.017	50.058	70	3,80
6	Sumatera Selatan	27.086	8.266.983	91.592	90	3,38
7	Bengkulu	8.853	1.934.269	19.919	97	2,25
8	Lampung	18.615	8.289.577	34.624	239	1,86
9	Bangka Belitung	5.112	1.430.865	16.424	87	3,21
10	Kepulauan Riau	6.034	2.082.694	8.202	254	1,36
11	DKI Jakarta	45.036	10.374.235	664	15.624	0,01
12	Jawa Barat	76.393	48.037.827	35.378	1.358	0,46
13	Jawa Tengah	73.443	34.257.865	32.801	1.044	0,45
14	DI Yogyakarta	14.209	3.762.167	3.133	1.201	0,22
15	Jawa Timur	75.625	39.292.972	47.800	822	0,63
16	Banten	19.680	12.448.160	9.663	1.288	0,49
17	Bali	16.696	4.246.528	5.780	735	0,35
18	NTB	11.986	4.955.578	18.572	267	1,55
19	NTT	13.202	5.287.302	48.718	109	3,69
20	Kalimantan Barat	13.553	4.932.499	147.307	33	10,87
21	Kalimantan Tengah	9.730	2.605.274	153.565	17	15,78
22	Kalimantan Selatan	15.515	4.119.794	38.744	106	2,50
23	Kalimantan Timur	14.009	3.575.449	129.067	28	9,21
24	Kalimantan Utara	3.429	691.058	75.468	9	22,01
25	Sulawesi Utara	9.699	2.461.028	13.852	178	1,43
26	Sulawesi Tengah	12.639	2.966.325	61.841	48	4,89
27	Sulawesi Selatan	25.238	8.690.294	64.717	134	2,56
28	Sulawesi Tenggara	11.487	2.602.389	38.068	68	3,31
29	Gorontalo	4.079	1.168.190	11.257	104	2,76
30	Sulawesi Barat	4.243	1.330.961	16.787	79	3,96
31	Maluku	6.565	1.744.654	46.914	37	7,15
32	Maluku Utara	4.681	1.209.342	31.983	38	6,83
33	Papua Barat	3.389	3.265.202	99.672	33	29,41
34	Papua	11.806	915.361	319.036	3	27,02
INDONESIA		679.033	261.890.872	1.931.579	136	2,84

Sumber: * Data dan Informasi Profil Kesehatan Indonesia 2017, Kementerian Kesehatan; ** BPS

4.3. Akses ke Air Bersih

Akses terhadap air bersih memegang peranan yang penting dalam pencapaian ketahanan pangan. Air yang tidak bersih dapat menimbulkan penyakit dan menurunkan kemampuan dalam menyerap nutrisi dan pada akhirnya mempengaruhi status gizi seseorang. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya pada daerah dengan akses terhadap air bersih rendah ditemukan kejadian malnutrisi yang tinggi (DKP dan WFP 2009; Sofianti 2009). Akses terhadap fasilitas sanitasi dan air layak minum sangat penting untuk mengurangi masalah kesehatan khususnya diare, sehingga perlu memperbaiki status gizi melalui peningkatan penyerapan zat-zat gizi oleh tubuh (DKP dan WFP 2015; Pemprov NTT *et al.* 2015; Kavosi *et al.* 2014; Khan dan Gill 2009; Burger dan Esrey 1995; serta Thomas dan Strauss 1992).

Pada tahun 2017, sebanyak 38,86% rumah tangga tidak memiliki akses yang memadai terhadap air bersih, yaitu air minum yang berasal dari air leding/PAM, pompa air, sumur atau mata air yang terlindung dan air hujan (termasuk air kemasan) dengan memperhatikan jarak ke jamban minimal 10 meter. Provinsi dengan akses ke air bersih yang buruk adalah Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Bengkulu, Maluku Utara dan Lampung dimana lebih dari separuh rumah tangga di wilayah tersebut tidak dapat mengakses air bersih secara memadai. Sedangkan provinsi dengan tingkat akses masyarakat ke air bersih yang paling baik adalah DKI Jakarta, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Jika dibandingkan antara kondisi tahun 2016 dan 2017, terlihat bahwa tren perbaikan air bersih terjadi hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Provinsi yang mengalami peningkatan penyediaan fasilitas air bersih tertinggi jika dibandingkan tahun 2016 adalah Provinsi Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Barat dan Jawa Tengah. Sedangkan dua provinsi mengalami penurunan persentase rumah tangga dalam mengakses air bersih secara memadai, yaitu Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Secara keseluruhan, terdapat 14 dari 34 provinsi dengan persentase rumah tangga yang dapat mengakses air bersih dibawah rata-rata nasional (38,86%) (Tabel 4.5).

Tabel 4.5 Persentase Rumah Tangga tanpa Akses ke Air Bersih 2016 - 2017

No	Provinsi	2016	2017
1	Aceh	42,04	38,98
2	Sumatera Utara	44,17	42,22
3	Sumatera Barat	35,52	32,97
4	Riau	34,24	30,01
5	Jambi	41,23	37,54
6	Sumatera Selatan	52,26	48,90
7	Bengkulu	53,51	53,29
8	Lampung	54,59	51,73
9	Kepulauan Bangka Belitung	27,85	24,33
10	Kepulauan Riau	34,14	30,66
11	DKI Jakarta	8,77	7,69
12	Jawa Barat	40,12	36,10
13	Jawa Tengah	43,50	37,59
14	DI Yogyakarta	45,51	41,10

No	Provinsi	2016	2017
15	Jawa Timur	40,71	36,42
16	Banten	35,82	35,13
17	Bali	27,98	25,12
18	Nusa Tenggara Barat	45,33	38,60
19	Nusa Tenggara Timur	60,32	53,63
20	Kalimantan Barat	50,41	44,95
21	Kalimantan Tengah	28,61	29,00
22	Kalimantan Selatan	25,87	26,77
23	Kalimantan Timur	13,90	13,30
24	Kalimantan Utara	22,07	17,15
25	Sulawesi Utara	43,34	38,32
26	Sulawesi Tengah	45,38	40,79
27	Sulawesi Selatan	40,60	35,67
28	Sulawesi Tenggara	39,89	34,72
29	Gorontalo	38,17	33,23
30	Sulawesi Barat	50,54	49,49
31	Maluku	61,10	54,94
32	Maluku Utara	56,39	51,95
33	Papua Barat	47,07	45,47
34	Papua	59,95	55,87
Indonesia		39,06	38,86

Sumber: Susenas 2017, BPS

4.4. Lama Sekolah Perempuan di Atas 15 Tahun

Studi di berbagai negara menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan pengetahuan perempuan terutama ibu dan pengasuh anak tentang gizi berkorelasi kuat dengan status gizi anaknya (Abuya et al., 2012; Adnan and Muniandy, 2012; Miller and Rodgers, 2009). Glewwe (2009) mengidentifikasi 3 kemungkinan mekanisme hubungan antara tingkat pendidikan ibu dan status gizi serta kesehatan, yaitu: (1) Pendidikan formal secara langsung akan mentransfer pengetahuan terkait kesehatan kepada calon ibu; (2) Kemampuan membaca dan berhitung yang diperoleh perempuan di sekolah akan meningkatkan kemampuan mereka mengenali penyakit dan mencari pengobatan yang tepat untuk anak-anak mereka. Selain itu kemampuan membaca yang baik akan memudahkan mereka mengikuti instruksi medis untuk penanganan kesehatan dan menerapkannya (Abuya et al., 2012); dan (3) Lamanya sekolah perempuan meningkatkan penerimaan mereka terhadap pengobatan modern. Perempuan yang bersekolah juga memiliki kemungkinan besar untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji tinggi, menikah dengan pria yang memiliki pendidikan dan gaji tinggi maupun tinggal di lingkungan yang lebih baik sehingga mempengaruhi status kesehatan anak-anak mereka (Abuya et al., 2012; Frost et al., 2005; Desai and Alva, 1998; Cleland and Van Ginneken, 1988).

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pendidikan dan pengetahuan ibu di Indonesia adalah dengan melihat durasi pendidikan formal yang dijalani oleh penduduk perempuan berusia 15 tahun ke atas. Berdasarkan ketersediaan data, durasi pendidikan tersedia untuk

perempuan berusia di atas 15 tahun dan di atas 21 tahun. Usia 15 tahun dipilih karena berdasarkan data BPS tahun 2017 ada 25,71% perempuan berusia 20-24 tahun menikah pada saat mereka masih berusia di bawah 18 tahun.

Tabel 4.6 menunjukkan rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun di setiap provinsi. Semakin lama durasi sekolah maka tingkat pendidikan dan pengetahuan ibu diasumsikan semakin baik. Rata-rata lama sekolah tertinggi terdapat di Provinsi DKI Jakarta, yaitu 10,64 tahun diikuti oleh Kepulauan Riau (9,88 tahun), Maluku (9,61 tahun) dan Sulawesi Utara (9,49 tahun).

Rata-rata lama sekolah perempuan terpendek terdapat di Provinsi Papua, yaitu 5,86 tahun, diikuti Kalimantan Barat (7,20 tahun) dan Nusa Tenggara Barat (7,13 tahun). Secara umum, terdapat 12 provinsi yang rata-rata lama sekolah perempuan usia di atas 15 tahun dibawah rata-rata nasional sebesar 8,17 tahun. Pada tingkat kabupaten, rata-rata lama sekolah perempuan di 137 kabupaten berada di atas rata-rata nasional. Rata-rata nasional sebesar 8,17 tahun masih jauh dari target pemerintah yang mencanangkan wajib belajar selama 12 tahun yang terdiri dari pendidikan sekolah dasar selama 6 tahun dan pendidikan sekolah menengah selama 6 tahun.

Tabel 4.6 Rata-rata Lama Sekolah Perempuan di Atas 15 Tahun 2017

No.	Provinsi	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		
		Perkotaan	Perdesaan	Total
1	Aceh	10,62	8,58	9,20
2	Sumatera Utara	10,30	8,32	9,36
3	Sumatera Barat	10,63	7,89	9,05
4	Riau	10,36	7,92	8,91
5	Jambi	9,77	7,58	8,29
6	Sumatera Selatan	9,72	7,31	8,22
7	Bengkulu	11,07	7,60	8,76
8	Lampung	9,55	7,39	8,00
9	Kepulauan Bangka Belitung	9,09	6,59	7,92
10	Kepulauan Riau	10,44	6,62	9,88
11	DKI Jakarta	10,64	0	10,64
12	Jawa Barat	8,74	6,63	8,15
13	Jawa Tengah	8,28	6,49	7,38
14	DI Yogyakarta	10,15	7,21	9,27
15	Jawa Timur	8,49	6,30	7,41
16	Banten	9,30	6,45	8,47
17	Bali	9,31	6,43	8,27
18	Nusa Tenggara Barat	7,75	6,61	7,13
19	Nusa Tenggara Timur	9,86	6,75	7,45
20	Kalimantan Barat	9,02	6,30	7,20
21	Kalimantan Tengah	9,56	7,57	8,30
22	Kalimantan Selatan	9,28	7,03	8,03
23	Kalimantan Timur	9,89	8,04	9,28
24	Kalimantan Utara	9,56	7,72	8,80
25	Sulawesi Utara	10,36	8,68	9,49

No.	Provinsi	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		
		Perkotaan	Perdesaan	Total
26	Sulawesi Tengah	10,24	7,79	8,46
27	Sulawesi Selatan	9,89	7,11	8,22
28	Sulawesi Tenggara	10,13	7,87	8,62
29	Gorontalo	9,51	7,22	8,09
30	Sulawesi Barat	9,16	7,31	7,71
31	Maluku	11,00	8,58	9,61
32	Maluku Utara	10,73	7,84	8,68
33	Papua Barat	10,95	8,33	9,37
34	Papua	9,38	4,52	5,86
INDONESIA		9,21	6,96	8,17

Sumber: Susenas 2017, BPS

4.5. Kebijakan dan Program

Pembangunan di bidang pangan dan gizi sangat diperlukan untuk tercapainya sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Tiga dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) berkaitan erat dengan pemanfaatan pangan, diantaranya adalah kesehatan dan kesejahteraan yang baik, pendidikan berkualitas serta air bersih dan sanitasi. Program terkait peningkatan kualitas pemanfaatan pangan telah dan terus diupayakan dengan melibatkan lintas sektor. Beberapa kebijakan dan program yang telah dan sampai saat ini masih dilaksanakan antara lain :

- (i) Program Diversifikasi/Penganekaragaman Pangan. Selain penyediaan pangan yang cukup kuantitasnya, kualitas konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) diperlukan agar kebutuhan zat gizi dapat terpenuhi dengan baik. Upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan terus digalakkan untuk mencapai target skor PPH sebesar 92,5 pada tahun 2019 (Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015 – 2019). Program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan salah satunya ditempuh melalui optimalisasi pemanfaatan sumberdaya pangan lokal. Kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya pangan lokal tertuang dalam Perpres No. 22 tahun 2009 dan ditindaklanjuti dengan Permentan No. 43 Tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Pangan Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Pangan Lokal. Kualitas konsumsi pangan juga ditentukan dari keamanan pangan yang dikonsumsi oleh individu. Untuk itu, Badan POM menginisiasi pengembangan model desa Pangan Aman (desa PAMAN) melalui program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) untuk dapat direplikasi oleh desa/kelurahan di kabupaten/kota lainnya secara swadaya melalui program dan anggaran masing-masing (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa). Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat di bidang keamanan pangan yang mencakup rumah tangga dan pos pelayanan terpadu (posyandu). Kegiatan ini dilakukan oleh Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) yang berasal dari kelembagaan desa atau kader pendamping desa, seperti ibu PKK, karang taruna, guru, Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan (PSP3), dll. Para KKPD tersebut akan membina komunitasnya agar mampu menjadi konsumen

dan produsen cerdas yang secara mandiri mampu memilih, menyiapkan/mengolah dan menyajikan pangan yang aman.

- (ii) Pengembangan Desa PAMAN ini diharapkan dapat menghasilkan \pm 7.500 Kader Keamanan Pangan Desa yang diharapkan dapat membimbing dan mengedukasi komunitas desa sebanyak \pm 15.000 masyarakat desa, termasuk usaha pangan yang ada di desa seperti Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Pedagang Kreatif Lapangan (PKL), koperasi dan ritel pangan desa, termasuk pasar desa. Untuk mencegah dan mengatasi penyakit infeksi terdapat beberapa program untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dengan peningkatan layanan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan peningkatan sanitasi melalui Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
- (iii) Adanya JKN meningkatkan kunjungan masyarakat ke fasilitas kesehatan secara signifikan, dimana hal ini seharusnya dapat meningkatkan angka pengobatan yang berhubungan langsung dengan status gizi. Sementara itu, untuk meningkatkan sanitasi terdapat berbagai kebijakan yang telah dilakukan, diantaranya adalah edukasi kepada masyarakat terkait 10 pesan PHBS yang berisi tentang anjuran untuk menerapkan hidup bersih dan sehat, termasuk buang air besar di jamban, mencuci tangan serta tidak merokok di dalam rumah. Upaya lainnya untuk meningkatkan sanitasi adalah program STBM yang merupakan pendekatan untuk merubah perilaku *higiene* dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan. Pendekatan ini membutuhkan adanya dukungan dari program lainnya untuk mengadakan sarana dan prasarana sanitasi.
- (iv) Program Hibah Air Minum dan Sanitasi yang digagas oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai salah satu upaya percepatan penambahan jumlah sambungan rumah (SR) baru melalui penerapan *output based* atau berdasarkan kinerja yang terukur. Program Hibah Air Minum yang dimaksud di sini adalah pemberian hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah baik yang bersumber dari pendapatan murni APBN atau pinjaman dan/atau hibah luar negeri. Sejak program ini dimulai pada 2012, sudah terbangun 927.000 SR dengan dana mencapai Rp 3,3 triliun di 212 kabupaten/kota dengan jumlah pelayanan bagi 4,5 juta jiwa Masyarakat Berpendapatan rendah (MBR). Pada 2018, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Kementerian Keuangan menyiapkan alokasi Rp 800 miliar untuk program hibah air minum yang terbagi menjadi Rp 650 miliar untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan bagi 215.000 SR dan Rp 150 miliar untuk Program Hibah Air Minum Perdesaan bagi 75.000 SR.
- (v) Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang dilaksanakan di 34 provinsi, yang tersebar di 11.067 desa/kelurahan yang terdapat di 269 kabupaten/kota. Sebagai implementasi percepatan penanganan kumuh, Program Kotaku akan melakukan peningkatan kualitas, pengelolaan serta pencegahan timbulnya permukiman kumuh baru dengan kegiatan-kegiatan pada entitas desa/kelurahan, serta kawasan dan kabupaten/kota. Kegiatan penanganan kumuh ini meliputi pembangunan infrastruktur serta pendampingan sosial dan ekonomi untuk keberlanjutan penghidupan masyarakat yang lebih baik di lokasi permukiman kumuh.
- (vi) Peningkatan pelayanan kesehatan melalui peningkatan jumlah dan distribusi tenaga kesehatan serta fasilitas kesehatan yang memenuhi standar pelayanan minimal. Peningkatan infrastruktur kesehatan salah satunya dengan pelaksanaan pembangunan Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal.

Kegiatan tersebut berupa pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan di daerah perbatasan dan tertinggal. Pada tahun 2018–dilakukan di 257 puskesmas daerah tertinggal dan 7 puskesmas perbatasan.

- (vii) Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan melalui program “Indonesia Pintar” sejalan dengan salah satu butir Nawacita Joko Widodo-Jusuf Kalla 2014-2019, yaitu “Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program “Indonesia Pintar”; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program “Indonesia Kerja” dan “Indonesia Sejahtera” dengan mendorong *land reform* dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah Kampung Deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019. Program Indonesia Pintar adalah salah satu program nasional (tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019) yang bertujuan untuk: 1) Meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah; 2) Meningkatkan angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah dan meningkatnya angka melanjutkan; 3) Menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antara wilayah perkotaan dan perdesaan, dan antar daerah; 4) Meningkatkan kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.
- (viii) Selain itu dalam rangka mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pangan dan gizi secara multisektor dalam skala nasional dan daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengkoordinasi penyusunan Rencana Aksi Pangan dan Gizi (RAN-PG) di Pusat dan Daerah. RAN-PG Tahun 2015-2019 menggunakan pendekatan multisektor yang melibatkan 20 Kementerian/Lembaga dan 3 Kementerian Koordinator dan dalam pelaksanaannya menggunakan 5 pilar; yaitu: 1) Perbaikan gizi masyarakat; 2) Peningkatan aksesibilitas pangan yang beragam; 3) Peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan; 4) Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat; serta 5) Kelembagaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Benta A Abuya, James Ciera and Elizabeth Kimani-Murage. 2012. Effect of mother's education on child's nutritional status in the slums of Nairobi. *BMC Pediatrics* **12**:80.
- Burger SE. and Esrey SA. 1995. Water and sanitation: health and nutrition benefits to children. In Pinstrop-Andersen P, Pelletier D, and Alderman H, editor. *Child Growth and Nutrition in Developing Countries*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- [BPS] Badan Pusat Statistik (a). 2017. Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Indonesia dan Provinsi 2017. Jakarta: BPS.
- [BPS] Badan Pusat Statistik (b). 2017. Potret Pendidikan Indonesia Statistik Pendidikan 2017. Jakarta: BPS.
- Cleland JG, Van Ginneken JK: *Maternal education and child survival in developing countries: the search for pathways of influence*. *SocSci Med*. 1988, 27 (12): 1357-1368. 10.1016/0277-9536(88)90201-8.
- Desai S, Alva S: *Maternal education and child health: is there a strong causal relationship?*. *Demography*. 1998, 35 (1): 71-81. 10.2307/3004028. View Article PubMed Google Scholar
- [DKP dan WFP] Dewan Ketahanan Pangan dan World Food Programme. 2015. *Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia 2015*. Jakarta: Dewan Ketahanan Pangan dan World Food Programme.
- Frost MB, Forste R, Haas DW: *Maternal education and child nutritional status in Bolivia: finding the links*. *SocSci Med*. 2005, 60 (2): 395-407. 10.1016/j.socscimed.2004.05.010.
- Glewwe P: *Why Does Mother's Schooling Raise Child Health in Developing Countries?*. Evidence from Morocco. *J. Human Res*. 1999, 34 (1): 124-159.
- Kavosi E, Rostami ZH, Kavosi Z, Nasihatkon A, Moghadami M, Heidari M. 2014. Prevalence and determinants of under-nutrition among children under six: a cross-sectional survey in Fars province. *Int J Health Policy Manag*. 3(2):71-76.
- Khan REA and Gill AR. 2009. Determinants of food security in rural areas of Pakistan. *MPRAPaper No. 17146*.
- Kementerian Kesehatan. 2018. *Data dan Informasi Profil Kesehatan Indonesia 2017*. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- Kementerian Kesehatan. *Pemenuhan Sarana Prasarana Alat Kesehatan (SPA) pada Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal*. Jakarta: <http://www.yankes.kemkes.go.id/read-pemenuhan-sarana-prasarana-alat-kesehatan-spa-pada-puskesmas-perbatasan-dan-tertinggal-3487.html>.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. *Program Hibah Air Minum Kementerian PUPR Berikan Akses Air Bagi 4,5 Juta Jiwa MBR*. Jakarta. <https://www.pu.go.id/berita/view/18/program-hibah-air-minum-kementerian-pupr-berikan-akses-air-bagi-4-5-juta-jiwa-mbr>.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. *Tentang Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)*. Jakarta. <http://kotaku.pu.go.id/page/6880/tentang-program-kota-tanpa-kumuh-kotaku>.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS. 2015. *Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2015-2019 (RANPG 2015-2019)*. Jakarta: Bappenas.
- Miller, Jane E. & Rodgers, Yana V. (2009). Mother's Education and Children's Nutritional Status: New Evidence from Cambodia. *Asian Development Review* 26(1), 131-165. Retrieved from doi:10.7282/T3WQ05W4.

Norshahida Adnan and Naleena Devi Muniandy, 2012. The Relationship between Mothers' Educational Level and Feeding Practices among Children in Selected Kindergartens in Selangor, Malaysia: A Cross-sectional Study. *Asian Journal of Clinical Nutrition*, 4: 39-52.

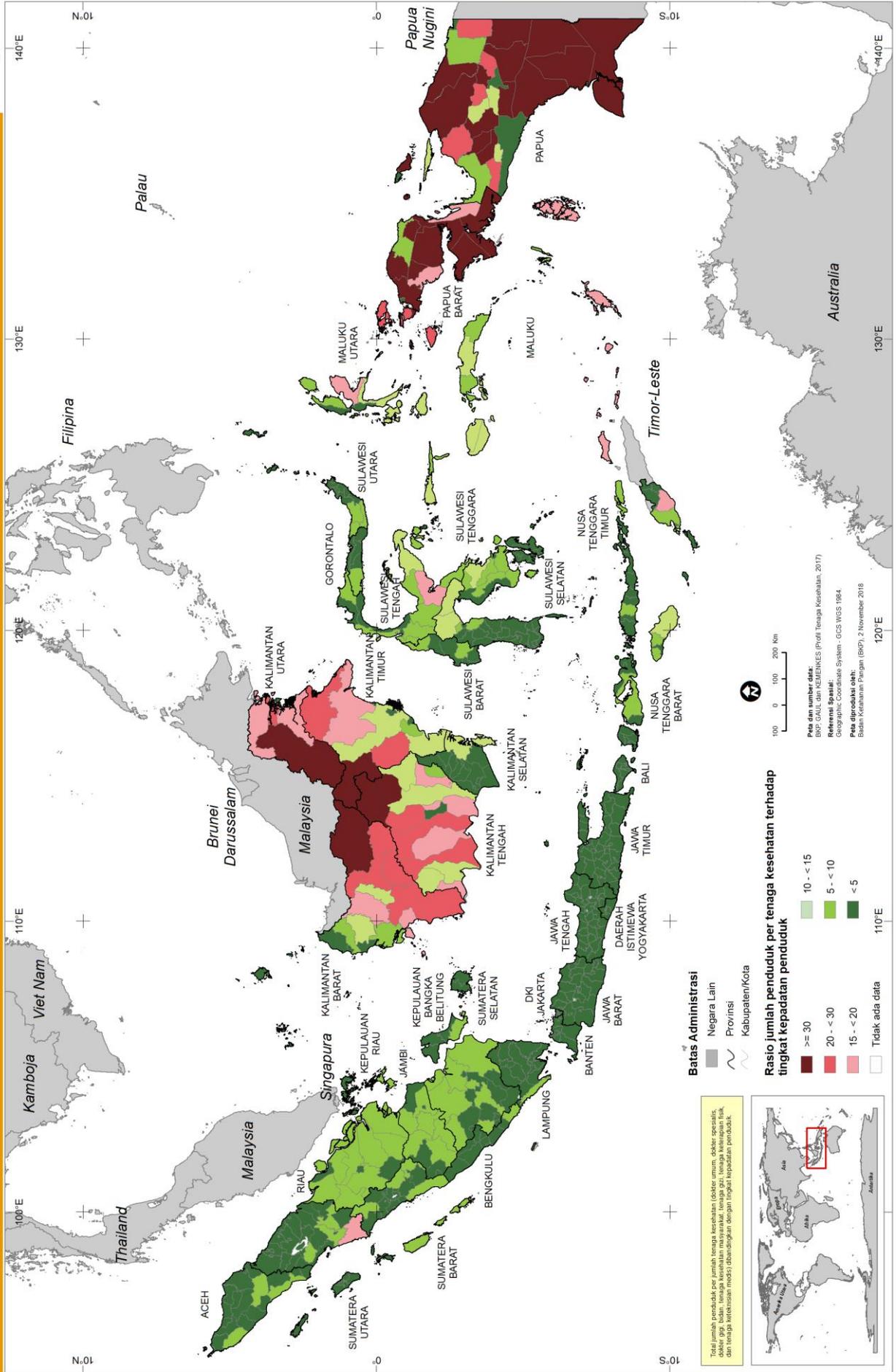
[Pemprov NTT, DKP, WFP] Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dewan Ketahanan Pangan, dan World Food Programme. 2015. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2015. Jakarta: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dewan Ketahanan Pangan, dan World Food Programme.

Sofiati EL. 2010. Analisis kerawanan pangan di tingkat kecamatan Kota Bogor. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Thomas D and Strauss J. 1992. Prices, infrastructure, household characteristics and child height. *J Dev Econ*. 39(2):301-331.

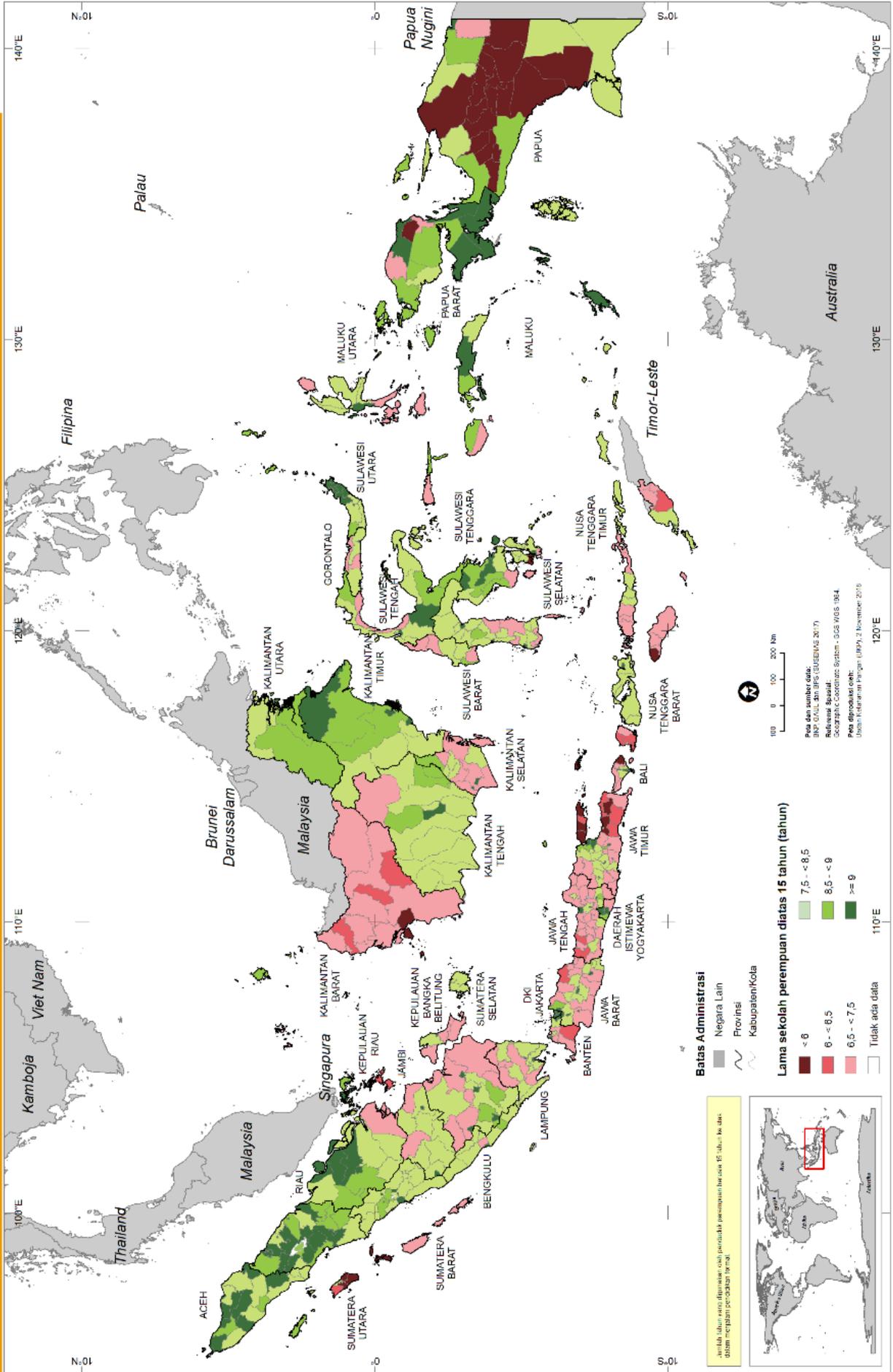


Peta 4.1: Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk





Peta 4.3: Rata-rata lama sekolah perempuan diatas 15 tahun



BAB 5

DAMPAK DARI STATUS GIZI DAN KESEHATAN

Status gizi adalah keadaan kesehatan hasil interaksi antara makanan, metabolisme tubuh dan lingkungan hidup manusia. Gizi mempengaruhi kekebalan tubuh, kerentanan terhadap penyakit, serta pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental. Terpenuhinya kecukupan gizi menurunkan terjadinya kesakitan, kecacatan dan kematian sehingga meningkatkan kualitas kesehatan individu.

Kekurangan gizi menyebabkan sistem kekebalan tubuh melemah sehingga meningkatkan kemungkinan terkena infeksi dan penyakit. Jika seorang anak sering terkena penyakit/infeksi maka masalah kekurangan gizi yang dialaminya pun akan semakin parah. Bila seseorang mengalami masalah gizi saat ini, bisa jadi berdampak meluas hingga kualitas sumberdaya generasi penerusnya. Bila hal ini tidak segera diatasi, dalam jangka panjang akan mengakibatkan hilangnya potensi generasi muda yang cerdas dan berkualitas (*lost generation*) karena tidak produktif dan tidak mampu bersaing di masa depan.

Permasalahan yang dihadapi banyak negara saat ini adalah gizi ganda. Masalah gizi ganda tidak hanya menyerang negara-negara maju, tetapi juga dialami beberapa negara yang sedang berkembang, seperti Indonesia. Sebagian masyarakat mengalami kekurangan gizi, namun sebagian lainnya karena kecukupan ekonomi dan pola konsumsi yang salah menyebabkan kelebihan gizi. Dua kondisi ekstrem asupan gizi yang sama-sama berdampak buruk bagi kesehatan.

Seseorang yang kelebihan gizi dicirikan oleh berat badan yang meningkat melampaui rata-rata batas normal (obesitas). Penderita obesitas lebih berisiko terhadap penyakit degenerative, seperti diabetes melitus, hipertensi, gagal ginjal, penyakit jantung koroner, penyakit kardiovaskuler maupun gangguan fungsi organ vital tubuh lainnya. Kelebihan gizi juga merupakan risiko utama penyakit tidak menular yang juga merupakan salah satu penyebab utama kematian di Indonesia.

Di sisi yang lain, asupan gizi yang kurang menyebabkan anak mengalami stunting. Kekurangan gizi erat kaitannya dengan kemiskinan, kurang tersedianya bahan pangan, buruknya sanitasi, kesalahan pola asuh, rendahnya pemahaman terhadap menu seimbang dan masih terbatasnya fasilitas infrastruktur. Sedangkan masalah gizi lebih disebabkan oleh kemajuan ekonomi pada lapisan masyarakat tertentu namun belum disertai pemahaman yang cukup mengenai pengetahuan gizi, menu seimbang, dan kesehatan. Oleh karena itu, sebelum program perbaikan gizi dan kesehatan dilaksanakan di suatu wilayah terlebih dahulu telah memperhatikan data dan informasi spesifik terkait permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian, masyarakat dapat menerima manfaat sesuai dengan kebutuhannya dan permasalahan gizi dan kesehatan segera terselesaikan. Jika penanganannya tidak tepat, dapat menimbulkan dampak yang semakin meluas dan menimbulkan beban bagi negara baik secara ekonomi maupun sosial.

5.1. Dampak (*Outcome*) dari Status Gizi

Status gizi dipengaruhi oleh penyebab langsung dan tidak langsung. Penyebab langsung adalah makanan dan penyakit infeksi yang mungkin diderita. Seorang anak yang mendapat makanan yang cukup baik tetapi sering diserang penyakit infeksi dapat berpengaruh terhadap status gizinya. Begitu juga sebaliknya, anak yang makannya tidak cukup baik, daya tahan tubuhnya pasti lemah dan pada akhirnya mempengaruhi status gizinya. Sedangkan penyebab tidak langsung terdiri dari :

- (i) Ketahanan pangan di keluarga, terkait dengan ketersediaan pangan (baik dari hasil produksi sendiri maupun dari pasar atau sumber lain), harga pangan dan daya beli keluarga, serta pengetahuan tentang gizi dan kesehatan.
- (ii) Pola pengasuhan anak, berupa sikap dan perilaku ibu atau pengasuh lain dalam hal keterdekataannya dengan anak, memberikan makan, merawat, kebersihan, memberi kasih sayang dan sebagainya. Kesemuanya berhubungan dengan keadaan ibu dalam hal kesehatan (fisik dan mental), status gizi, pendidikan umum, pengetahuan tentang pengasuhan yang baik, peran dalam keluarga atau di masyarakat, sifat pekerjaan sehari-hari, adat kebiasaan keluarga dan masyarakat, dan sebagainya dari si ibu atau pengasuh anak.
- (iii) Akses atau keterjangkauan anak dan keluarga terhadap air bersih dan pelayanan kesehatan yang baik seperti imunisasi, pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, penimbangan anak, pendidikan kesehatan dan gizi, serta sarana kesehatan yang baik seperti posyandu, puskesmas, praktek bidan atau dokter, dan rumah sakit. Makin tersedia air bersih yang cukup untuk keluarga serta makin dekat jangkauan keluarga terhadap pelayanan dan sarana kesehatan, ditambah dengan pemahaman ibu tentang kesehatan, makin kecil risiko anak terkena penyakit dan kekurangan gizi (Soekirman, 2001)

Penilaian status gizi paling mudah dilakukan pada anak Balita. Status gizi anak balita diukur dengan 3 indikator, yaitu prevalensi *stunting* (tinggi badan menurut umur), *underweight* (berat badan menurut umur) dan *wasting* (berat badan menurut tinggi badan).

1. Pendek atau *stunting*: rasio tinggi badan menurut umur -TB/U- di bawah -2 standar deviasi dari mean referensi populasi WHO 2005, yang menggambarkan kurang gizi yang terjadi secara terus-menerus, dalam jangka panjang dan kronis.
2. Gizi kurang dan buruk atau *underweight*: rasio berat badan menurut umur -BB/U- di bawah -2 standar deviasi dari mean referensi populasi WHO 2005, yang menggambarkan kurang gizi.
3. Kurus atau *wasting*: rasio berat badan menurut tinggi badan -BB/TB- di bawah - 2 standar deviasi dari mean referensi populasi WHO 2005, yang menggambarkan kurang gizi yang terjadi secara akut atau baru terjadi.

WHO mengklasifikasikan masalah gizi sebagai masalah kesehatan berdasarkan prevalensi *underweight*, *stunting* dan *wasting* dalam populasi seperti pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Klasifikasi WHO tentang Masalah Kesehatan Masyarakat untuk Prevalensi Kurang Gizi

Klasifikasi	Underweight	Stunting	Wasting
Baik	<10%	<20%	<5%
Kurang	10-19%	20-29%	5-9%
Buruk	20-29%	30-39%	10-14%
Sangat Buruk	≥30%	≥40%	≥15%

Sumber: WHO, 2000

Pada FSVA 2018 data *underweight*, *stunting* dan *wasting* menggunakan data hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) dari Kementerian Kesehatan. Hal tersebut berdasarkan pada pertimbangan bahwa data hasil PSG 2017 merupakan data kesehatan terbaru dibanding dengan data hasil Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) terakhir tahun 2014.

Tabel 5.2 Prevalensi Kurang Gizi pada Balita menurut Provinsi 2017

No	Provinsi	Underweight	Stunting	Wasting
1	Aceh	24,8	35,7	12,7
2	Sumatera Utara	18,2	28,4	13,4
3	Sumatera Barat	17,5	30,7	10,1
4	Riau	18,2	29,8	12,7
5	Jambi	13,5	25,1	10,6
6	Sumatera Selatan	12,2	22,8	7,8
7	Bengkulu	14,2	29,5	8,3
8	Lampung	18,5	31,5	9,3
9	Kep Bangka Belitung	16,7	27,3	10,4
10	Kep Riau	16,4	20,9	14,2
11	DKI Jakarta	14,1	22,6	9,9
12	Jawa Barat	15,1	29,3	6,5
13	Jawa Tengah	17,0	28,5	9,3
14	DI Yogyakarta	12,5	19,8	8,4
15	Jawa Timur	15,6	26,9	6,9
16	Banten	19,8	29,6	10,4
17	Bali	8,6	19,0	6,3
18	Nusa Tenggara Barat	22,5	37,2	8,5
19	Nusa Tenggara Timur	28,3	40,3	15,9
20	Kalimantan Barat	26,0	36,5	13,2
21	Kalimantan Tengah	23,6	38,9	10,7
22	Kalimantan Selatan	20,9	34,1	10,1
23	Kalimantan Timur	19,3	30,7	9,3
24	Kalimantan Utara	19,6	33,2	9,1
25	Sulawesi Utara	15,3	33,2	12,1
26	Sulawesi Tengah	26,1	36,2	12,5
27	Sulawesi Selatan	22,8	34,9	8,7

No	Provinsi	Underweight	Stunting	Wasting
28	Sulawesi Tenggara	23,9	36,4	13,5
29	Gorontalo	23,4	31,6	12,9
30	Sulawesi Barat	24,8	40,1	8,9
31	Maluku	23,7	30,1	16,8
32	Maluku Utara	17,5	24,9	10,3
33	Papua Barat	23,9	33,2	16,2
34	Papua	19,8	33,0	13,9
INDONESIA		17,9	29,6	9,6

Sumber : PSG 2017, Kementerian Kesehatan

Menurut data PSG 2017 Kementerian Kesehatan, angka *underweight* pada anak balita secara nasional termasuk dalam katagori kurang, yaitu sebesar 17,9% meningkat dibandingkan hasil PSG 2016 sebesar 17,8%. Terdapat 20 provinsi dengan angka *underweight* diatas angka nasional. Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi dengan angka *underweight* paling besar (28,3%). Sebanyak 13 provinsi yang diklasifikasikan pada kondisi buruk (20-29%); 21 provinsi pada tingkat kurang (10-19%) dan 1 provinsi pada tingkat baik (<10%).

Prevalensi balita *stunting* di tingkat nasional tahun 2017 adalah 29,6%, meningkat dibandingkan tahun 2016 (27,5%) termasuk dalam katagori kurang (20-29%). Terdapat 21 provinsi yang mempunyai prevalensi *stunting* diatas angka nasional. Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi dengan angka *stunting* paling tinggi (40,3%). Terdapat 2 provinsi yang memiliki prevalensi *stunting* pada tingkat sangat buruk ($\geq 40\%$), 17 provinsi memiliki prevalensi *stunting* pada tingkat buruk (30-39%) dan 14 provinsi memiliki prevalensi pada tingkat kurang (20-29%) serta 2 provinsi dengan prevalensi *stunting* baik (< 20%).

Pada tahun 2017, sebanyak 9,6 persen balita yang mengalami *wasting* (kurus) atau turun sebesar 1,5 persen dari tahun 2016. Sebanyak 21 provinsi memiliki nilai presentase balita *wasting* diatas angka nasional. Provinsi Maluku merupakan provinsi dengan angka *wasting* paling tinggi (16,8 persen). Terdapat 3 provinsi memiliki prevalensi *wasting* sangat buruk (≥ 15 persen), 17 provinsi termasuk katagori buruk (10-14 persen) dan 14 provinsi dengan katagori kurang (5-9 persen).

Stunting

Stunting merupakan masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak, yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya. *Stunting* mencerminkan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis yang muncul karena asupan zat gizi yang kurang, sering mengalami sakit/infeksi serta praktek pola asuh yang kurang baik. *Stunting* merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Hal ini dikarenakan anak *stunting* bukan hanya terganggu pertumbuhan fisiknya (bertubuh pendek/kerdil) saja, tetapi juga terganggu perkembangan otaknya yang akan mempengaruhi kemampuan dan prestasi di sekolah, produktivitas dan kreativitas di usia produktif sehingga akan mempengaruhi kapasitas

untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi saat dewasa dan berpotensi untuk meningkatkan kemiskinan.

Dalam rangka pencegahan *stunting* terdapat tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu perbaikan pola makan, pola asuh serta sanitasi dan akses air bersih. Pola makan dengan gizi seimbang perlu diperkenalkan sejak anak usia dini dan dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari agar ketika dewasa terbiasa mengonsumsi makanan yang beragam dan bergizi seimbang untuk hidup aktif, sehat dan bugar. *Stunting* juga dipengaruhi aspek perilaku, terutama pola asuh yang kurang baik dalam praktek pemberian makan bagi bayi dan balita. Pola asuh dipengaruhi oleh pemahaman orang tua (khususnya ibu) dalam mengatur kesehatan dan gizi di keluarganya. Oleh karena itu, edukasi dan pendampingan diperlukan agar dapat mengubah perilaku yang bisa mengarahkan pada peningkatan kesehatan gizi atau ibu dan anaknya. Akses terhadap pelayanan kesehatan, termasuk di dalamnya adalah akses sanitasi dan air bersih, mendekatkan anak pada risiko ancaman penyakit infeksi. Penyediaan fasilitas dan tenaga kesehatan, perbaikan sanitasi serta penyediaan air bersih sangat diperlukan terutama di lokasi-lokasi yang jauh dari pusat pemerintahan dan di daerah pemukiman yang padat penduduknya.

Dalam rangka intervensi penanganan *stunting* di 2018, telah ditentukan 100 kabupaten/kota prioritas di seluruh Indonesia. Kerangka Intervensi *stunting* yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu **Intervensi Gizi Spesifik** dan **Intervensi Gizi Sensitif**.

Intervensi Gizi Spesifik. Hal ini merupakan intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan berkontribusi pada 30% penurunan *stunting*. Kerangka kegiatan intervensi gizi spesifik umumnya dilakukan pada sektor kesehatan. Intervensi ini bersifat jangka pendek dimana hasilnya dapat dicatat dalam waktu relatif pendek.

Intervensi Gizi Sensitif. Kerangka ini dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan diluar sektor kesehatan dan berkontribusi dalam 70% intervensi *stunting*. Sasaran dari intervensi gizi spesifik adalah masyarakat secara umum yang dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yang bersifat makro.

Tabel 5.3 100 Kabupaten/Kota Prioritas untuk Intervensi Stunting 2018

No	Provinsi	No.	Kabupaten
1	Aceh	1	Aceh Tengah
		2	Pidie
2	Sumatera Utara	3	Langkat
		4	Padang Lawas
		5	Nias Utara
		6	Gunung Sitoli
		7	Pasaman
3	Sumatera Barat	8	Pasaman Barat
		9	Rokan Hulu
4	Riau	10	Kerinci
5	Jambi	11	Ogan Kemiring Ilir
6	Sumatera Selatan	12	Kaur
7	Bengkulu	13	Lampung Selatan
8	Lampung	14	Lampun Timur

No	Provinsi	No.	Kabupaten
		15	Lampung Tengah
9	Kep. Bangka Belitung	16	Bangka Barat
10	Kep. Riau	17	Natuna
11	DKI Jakarta	18	Kep. Seribu
12	Jawa Barat	19	Bogor
		20	Sukabumi
		21	Cianjur
		22	Bandung
		23	Garut
		24	Tasikmalaya
		25	Kuningan
		26	Cirebon
		27	Sumedang
		28	Indramayu
		29	Subang
		30	Karawang
		31	Bandung Barat
13	Jawa Tengah	32	Cilacap
		33	Banyumas
		34	Purbalingga
		35	Kebumen
		36	Wonosobo
		37	Klaten
		38	Grobongan
		39	Blora
		40	Demak
		41	Pemalang
		42	Brebes
14	DI. Yogyakarta	43	Kulonprogo
15	Jawa Barat	44	Trenggalek
		45	Malang
		46	Jember
		47	Bondowoso
		48	Probolinggo
		49	Nganjuk
		50	Lamongan
		51	Bangkalan
		52	Sampang
		53	Pamekasan
		54	Sumenep
16	Banten	55	Pandeglang
17	Bali	56	Gianyar
18	NTB	57	Lombok Barat
		58	Lombok Tengah
		59	Lombok Timur
		60	Sumbawa

No	Provinsi	No.	Kabupaten
		61	Dompu
		62	Lombok Utara
19	NTT	63	Sumba Barat
		64	Sumba Timur
		65	TTS
		66	TTU
		67	Alor
		68	Lembata
		69	Ngada
		70	Manggarai
		71	Rote Ndao
		72	Sumba Tengah
		73	Sumba Barat Daya
		74	Manggarai Timur
		75	Sabu Raijua
19	Kalimantan Barat	76	Ketapang
20	Kalimantan Tengah	77	Barito Timur
21	Kalimantan Selatan	78	HSU
22	Kalimantan Timur	79	PPU
23	Kalimantan Utara	80	Malinau
24	Sulawesi Utara	81	Bolmong Utara
25	Sulawesi Tengah	82	Banggai
26	Sulawesi Selatan	83	Enrekang
27	Sulawesi Tenggara	84	Buton
28	Gorontalo	85	Boalemo
29		86	Gorontalo
30	Sulawesi Barat	87	Majene
		88	Polewali Mandar
		89	Mamuju
31	Maluku	90	Maluku Tengah
		91	Seram Bagian Barat
32	Maluku Utara	92	Halmahera Selatan
33	Papua Barat	93	Sorong Selatan
		94	Tambrau
34	Papua	95	Jayawijaya
		96	Tolikara
		97	Nduga
		98	Lanny Jaya
		99	Dogiyai
		100	Intan Jaya

Sumber: TNP2K, 2018

Obesitas

Obesitas terjadi ketika tubuh mengonsumsi lebih banyak kalori daripada membakar kalori. Di masa lalu, banyak orang berpikir bahwa obesitas itu hanya disebabkan oleh makan berlebihan dan kurangnya berolahraga karena kurangnya kemauan dan kontrol diri. Meskipun hal tersebut juga berkontribusi dalam menyebabkan obesitas, para ahli mengakui bahwa obesitas merupakan masalah medis yang kompleks dan melibatkan faktor genetik (keturunan), lingkungan, perilaku dan sosial. Semua faktor ini berperan dalam menentukan berat badan seseorang.

Menurut data terakhir dari Riskesdas 2013, ada 16 wilayah di Indonesia yang memiliki angka obesitas lebih tinggi dibanding angka nasional, yaitu 27%. Wilayah tersebut mencakup Jawa Barat, Bali, Papua, DI Yogyakarta, Aceh, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, Bangka Belitung, Sumatera Utara, Papua Barat, Kepulauan Riau, Maluku Utara, Kalimantan Timur, DKI Jakarta, Gorontalo dan Sulawesi Utara. Selain itu, data Riskesdas juga menyebut sepertiga wanita Indonesia di atas usia 18 tahun mengalami kelebihan berat badan atau obesitas. Data juga menunjukkan bahwa lima dari anak usia 5-12 tahun juga mengalami hal yang sama.

Data menunjukkan bahwa anak-anak yang dulu mengalami status gizi kurang ternyata cenderung mengidap status gizi lebih di kemudian hari. Oleh karena itu, menjadi sangat penting di 1000 hari pertama kehidupan untuk memastikan anak-anak mencapai potensi mereka. Malnutrisi selama periode ini menjadi salah satu penentu utama agar anak-anak tidak *stunting*, tetapi juga tidak menderita obesitas atau penyakit lainnya saat dewasa.

5.2. Dampak (*Outcome*) dari Status Kesehatan

Memperhatikan pendapat beberapa pakar mengenai pengertian sehat, dapat disimpulkan bahwa sehat merupakan keadaan yang tidak hanya terbebas dari penyakit akan tetapi juga meliputi seluruh aspek kehidupan manusia yang meliputi aspek fisik, emosi, sosial dan spiritual. Dengan demikian, status kesehatan merupakan nilai/refleksi seseorang dalam tingkatan sehat atau sakit.

Status kesehatan di masyarakat, memiliki perbedaan antara masyarakat kota dengan masyarakat desa, terutama dalam pengambilan keputusan ketika mengalami sakit. Pada masyarakat kota, cenderung memilih dokter untuk pelayanan kesehatan. Sedangkan pada masyarakat desa lebih menggunakan pramerta dari pada biomedis. Dikarenakan faktor ekonomi, ketersediaan tenaga medis dan ketidaktahuan mereka kepada tenaga medis.

Indikator status kesehatan masyarakat menurut WHO:

Indikator Komprehensif:

1. Angka kematian menurun
2. Rasio angka mortalitas proporsional rendah
3. Umur harapan hidup meningkat

Indikator Spesifik:

1. Angka kematian ibu dan anak menurun
2. Angka kematian karena penyakit menular menurun
3. Angka kelahiran menurun

Angka harapan hidup merupakan salah satu dampak dari status kesehatan dan gizi. Rata-rata angka harapan hidup di Indonesia pada tahun 2017 adalah 71,06 tahun. Angka harapan hidup tertinggi terdapat di DI. Yogyakarta (74,74 tahun) dan terendah terdapat di Sulawesi Barat (64,34 tahun). Terdapat 7 provinsi yang memiliki angka harapan hidup diatas angka nasional yaitu Bali, Kalimantan Utara, Jawa Barat, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Jawa Tengah dan DI Yogyakarta.

Tabel 5.4 Angka Harapan Hidup Tingkat Provinsi 2017

No	Provinsi	AHH (Tahun)
1	Aceh	69.52
2	Sumatera Utara	68.37
3	Sumatera Barat	68.78
4	Riau	70.99
5	Jambi	70.76
6	Sumatera Selatan	69.18
7	Bengkulu	68.59
8	Lampung	69.95
9	Kep. Bangka Belitung	69.95
10	Kep. Riau	69.48
11	DKI Jakarta	72.55
12	Jawa Barat	72.47
13	Jawa Tengah	74.08
14	DI Yogyakarta	74.74
15	Jawa Timur	70.80
16	Banten	69.49
17	Bali	71.46
18	Nusa Tenggara Barat	65.55
19	Nusa Tenggara Timur	66.07
20	Kalimantan Barat	69.92
21	Kalimantan Tengah	69.59
22	Kalimantan Selatan	68.02
23	Kalimantan Timur	73.70
24	Kalimantan Utara	72.47
25	Sulawesi Utara	71.04
26	Sulawesi Tengah	67.32
27	Sulawesi Selatan	69.84
28	Sulawesi Tenggara	70.47
29	Gorontalo	67.14
30	Sulawesi Barat	64.34
31	Maluku	65.40
32	Maluku Utara	67.54
33	Papua Barat	65.32
34	Papua	65.14
Indonesia		71.06

Sumber: BPS, 2017

Disamping angka harapan hidup, tingkat kesehatan masyarakat secara umum yang dapat dilihat dari angka kesakitan/morbiditas/persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan. Keluhan kesehatan adalah gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk karena kecelakaan atau hal lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Pengetahuan mengenai derajat kesehatan suatu masyarakat dapat menjadi pertimbangan dalam pembangunan bidang kesehatan yang bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata.

Tabel 5.4 Persentase Penduduk yang mempunyai Keluhan Kesehatan Tingkat Provinsi 2014-2016

No	Provinsi	2014	2015	2016
1	Aceh	30,55	27,92	25,78
2	Sumatera Utara	23,55	23,04	22,88
3	Sumatera Barat	31,80	28,92	29,38
4	Riau	26,19	29,71	27,89
5	Jambi	21,91	24,45	23,68
6	Sumatera Selatan	26,75	29,41	26,63
7	Bengkulu	29,96	27,96	27,66
8	Lampung	28,63	31,42	27,39
9	Kep. Bangka Belitung	26,27	30,42	31,33
10	Kep. Riau	22,82	21,28	22,17
11	DKI Jakarta	30,45	33,39	30,45
12	Jawa Barat	28,23	28,11	28,32
13	Jawa Tengah	32,92	35,52	33,39
14	DI Yogyakarta	42,28	39,58	35,98
15	Jawa Timur	30,21	33,45	29,88
16	Banten	29,48	30,34	28,30
17	Bali	36,24	35,29	31,18
18	Nusa Tenggara Barat	37,13	34,78	34,64
19	Nusa Tenggara Timur	33,85	37,03	31,81
20	Kalimantan Barat	26,53	25,62	24,93
21	Kalimantan Tengah	26,57	25,39	25,47
22	Kalimantan Selatan	34,79	39,27	34,35
23	Kalimantan Timur	21,22	21,98	21,76
24	Kalimantan Utara	-	23,65	22,38
25	Sulawesi Utara	26,38	27,31	25,79
26	Sulawesi Tengah	30,47	29,21	26,14
27	Sulawesi Selatan	24,78	26,30	23,58
28	Sulawesi Tenggara	28,94	25,86	26,84
29	Gorontalo	36,81	37,43	33,69
30	Sulawesi Barat	31,48	29,60	26,73
31	Maluku	20,10	17,59	17,67
32	Maluku Utara	15,70	16,71	16,25
33	Papua Barat	20,45	20,39	18,86
34	Papua	18,44	17,79	16,64
	Indonesia	29,22	30,35	28,53

Sumber: BPS, 2017

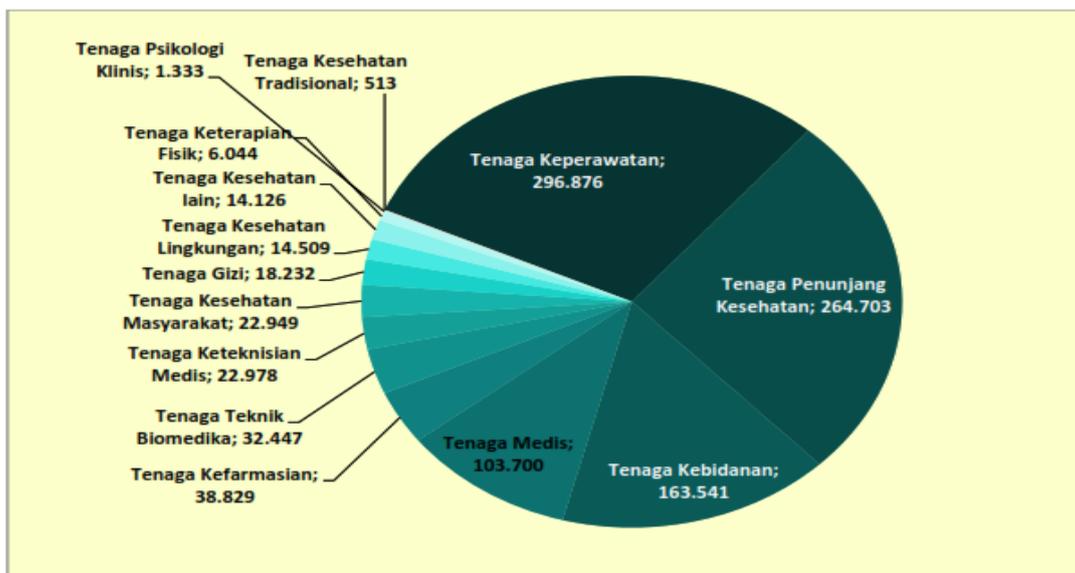
Persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan di Indonesia pada tahun 2016 adalah 28,53%, menurun sebesar 6,38% dari tahun 2015 (30,35%). Provinsi dengan persentase tertinggi adalah DI. Yogyakarta (35,98%) dan terendah terdapat di Maluku Utara (16,25%). Terdapat 11 provinsi yang memiliki persentase diatas angka nasional, yaitu Sumatera Barat, Jawa Timur Timur, DKI Jakarta, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, Gorontalo, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat dan DI Yogyakarta.

5.3. Pencapaian Bidang Kesehatan

Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) merupakan salah satu subsistem dalam Sistem Kesehatan Nasional yang mempunyai peranan penting dalam mencapai tujuan pembangunan kesehatan sebagai pelaksana upaya dan pelayanan kesehatan. Sumber daya manusia kesehatan adalah tenaga kesehatan (termasuk tenaga kesehatan strategis) dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen kesehatan (PP 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional).

Jumlah SDMK di Indonesia pada tahun 2016 sebanyak 1.000.780 orang yang terdiri dari 736.077 orang tenaga kesehatan (73,6%) dan 264.703 orang tenaga penunjang kesehatan (26,4%) (Gambar 5.1). Proporsi tenaga kesehatan terbanyak adalah tenaga keperawatan sebanyak 29,66% dari total tenaga kesehatan, sedangkan proporsi tenaga kesehatan yang paling sedikit adalah tenaga kesehatan tradisional sebesar 0,05% dari total tenaga kesehatan. Provinsi dengan SDMK paling banyak terpusat di Pulau Jawa, yaitu Jawa Barat (117.674 orang), Jawa Timur (116.303 orang), dan Jawa Tengah (113.872 orang). Provinsi dengan jumlah SDMK paling sedikit adalah Kalimantan Utara (3.148 orang), Papua Barat (4.693 orang) dan Sulawesi Barat (5.202 orang).

Gambar 5.1 Jumlah SDMK di Indonesia 2016

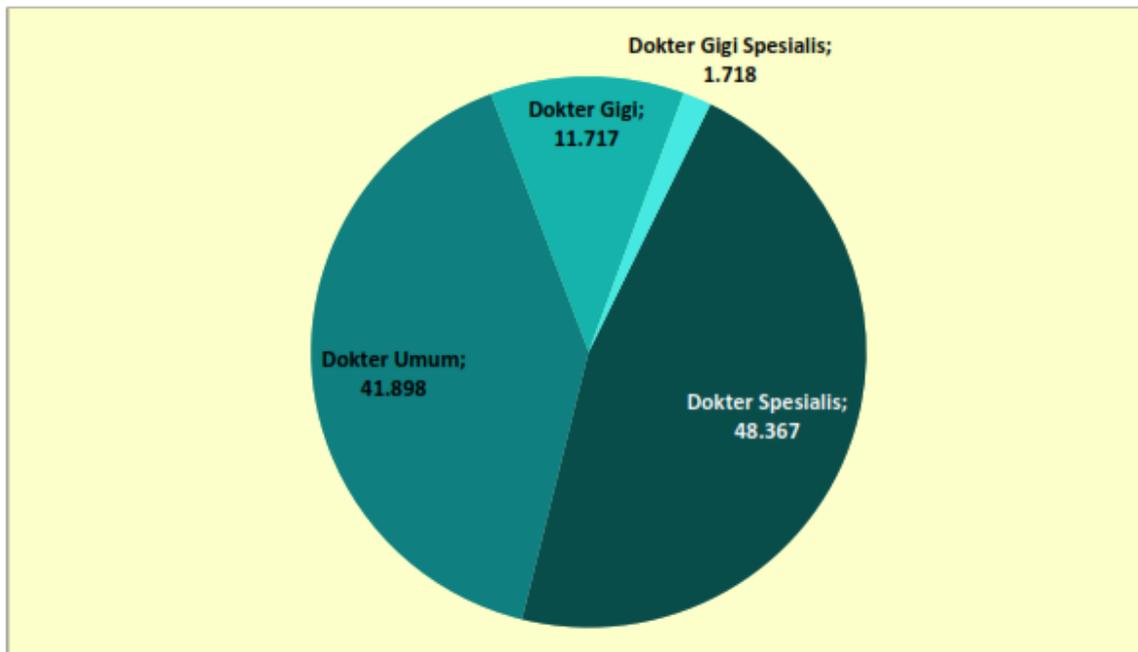


Sumber: Profil Tenaga Kesehatan 2017, Kementerian Kesehatan

Tenaga medis berdasarkan fungsi adalah tenaga medis yang memberikan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai fungsinya. Proporsi tenaga medis terbanyak yaitu dokter spesialis sebanyak 46,6%, data ini belum termasuk data dokter praktik mandiri. Sebanyak 55% tenaga medis

berada di Pulau Jawa dengan jumlah terbanyak berada di Provinsi Jawa Barat (15.139 orang), Jawa Timur (12.061 orang), dan Jawa Tengah (11.247 orang). Provinsi dengan tenaga medis paling sedikit adalah Kalimantan Utara (301 orang), Sulawesi Barat (316 orang) dan Papua Barat (340 orang) (Gambar 5.2).

Gambar 5.2 Jumlah Tenaga Medis di Indonesia 2016

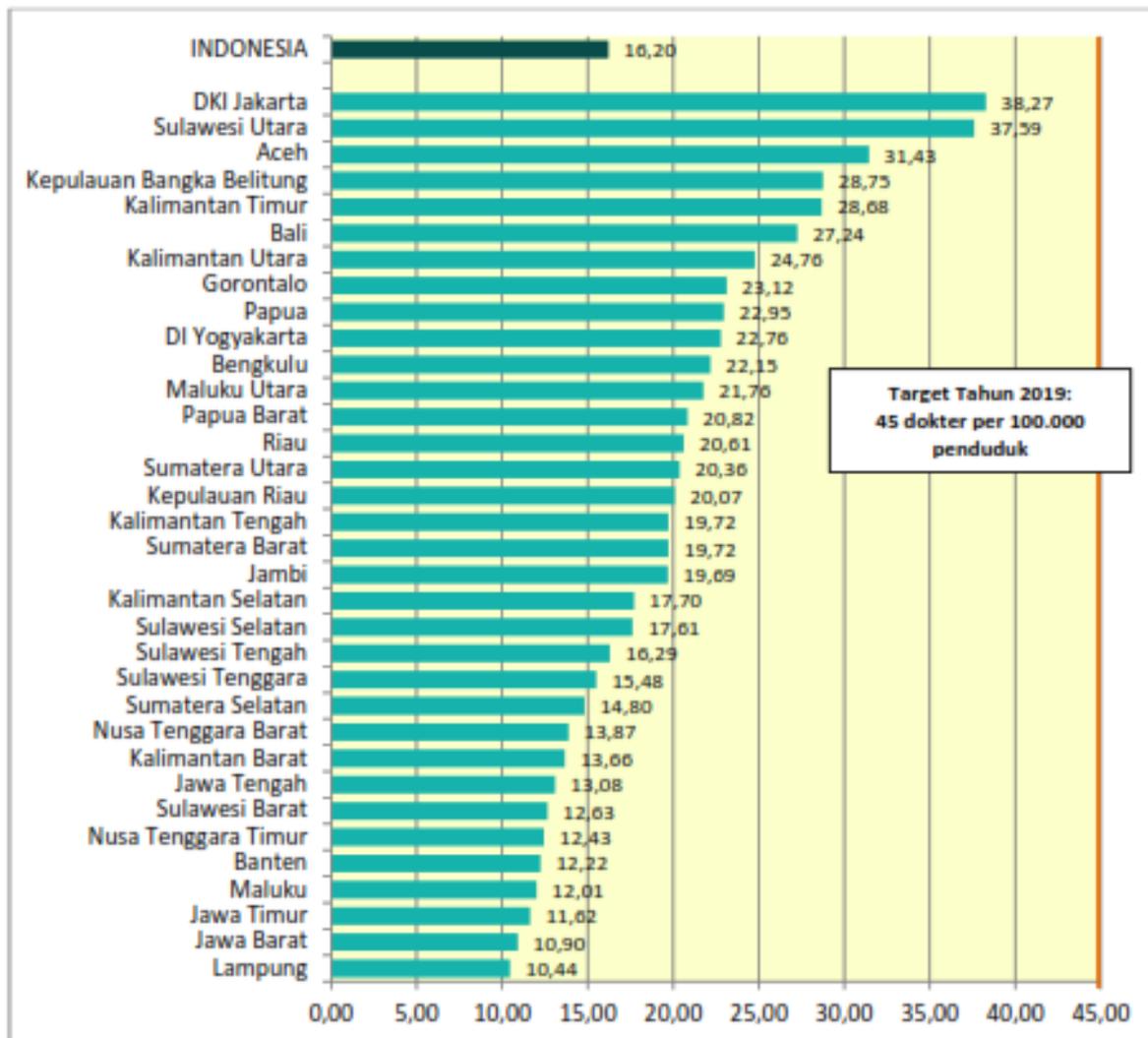


Sumber: *Profil Tenaga Kesehatan 2017, Kementerian Kesehatan*

Rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk merupakan indikator untuk mengukur ketersediaan tenaga kesehatan untuk mencapai target pembangunan kesehatan tertentu. Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2013 tentang Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011 – 2025, target rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk pada tahun 2019 di antaranya rasio dokter umum 45 per 100.000 penduduk, rasio dokter gigi 13 per 100.000 penduduk, rasio perawat 180 per 100.000 penduduk, dan rasio bidan 120 per 100.000 penduduk.

Rasio dokter terhadap 100.000 penduduk baik secara nasional maupun provinsi masih jauh dari target rasio dokter pada tahun 2019 yaitu 45 per 100.000 penduduk. Secara nasional, rasio dokter di Indonesia sebesar 16,02 per 100.000 penduduk (Gambar 5.3). Provinsi dengan rasio tertinggi yaitu DKI Jakarta (38,27 per 100.000 penduduk) dan provinsi dengan rasio terendah yaitu Lampung (10,44 per 100.000 penduduk).

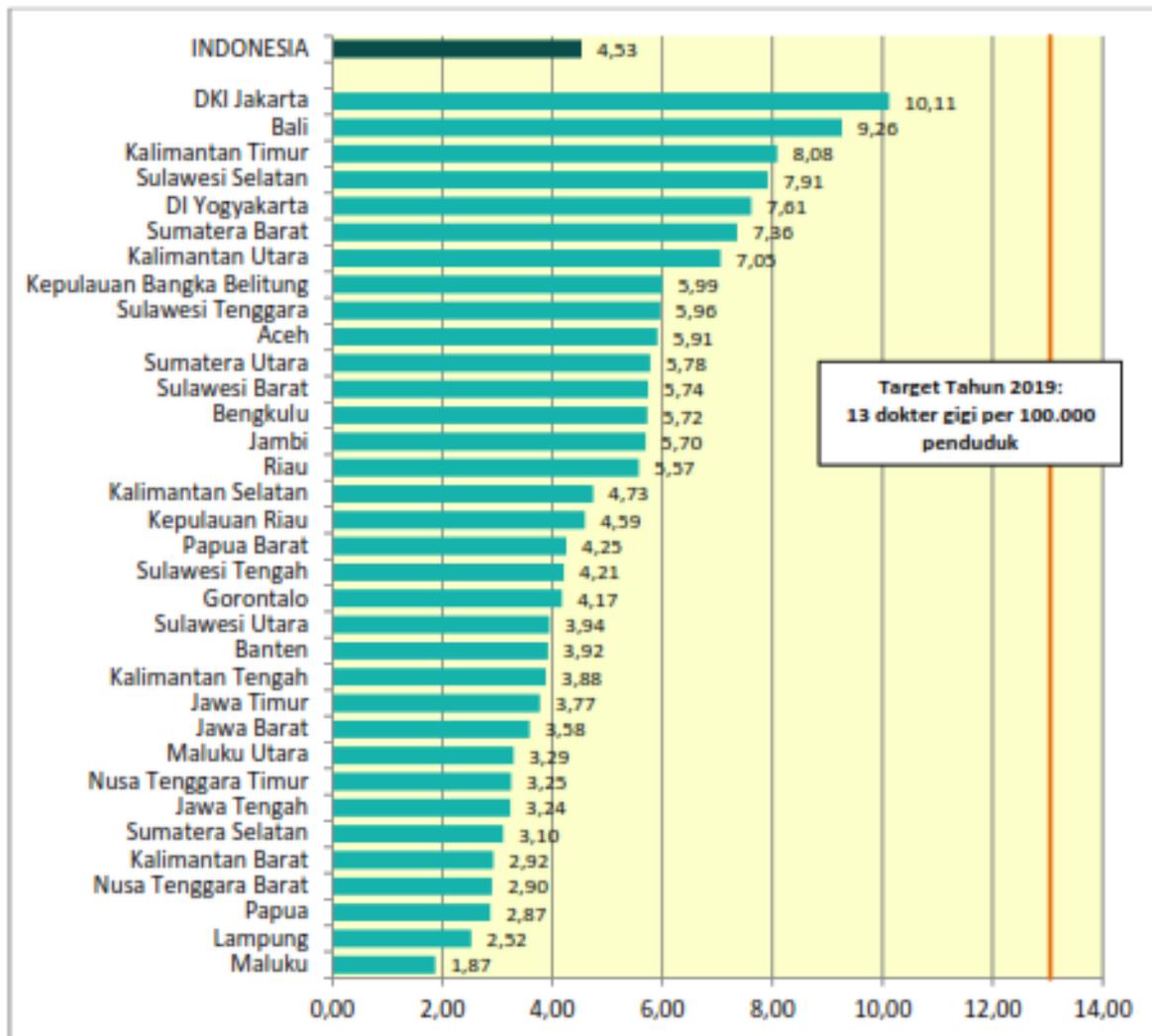
Gambar 5.3 Rasio Dokter terhadap 100.000 Penduduk di Indonesia 2016



Sumber: Profil Tenaga Kesehatan 2017, Kementerian Kesehatan

Rasio dokter gigi di Indonesia pada tahun 2016 adalah 4,53 per 100.000 penduduk. Angka ini masih jauh dari target rasio dokter gigi tahun 2019 yaitu 13 per 100.000 penduduk. Provinsi dengan rasio tertinggi yaitu DKI Jakarta sebesar 10,11 per 100.000 penduduk dan provinsi dengan rasio terendah adalah Maluku sebesar 1,87 per 100.000 penduduk.

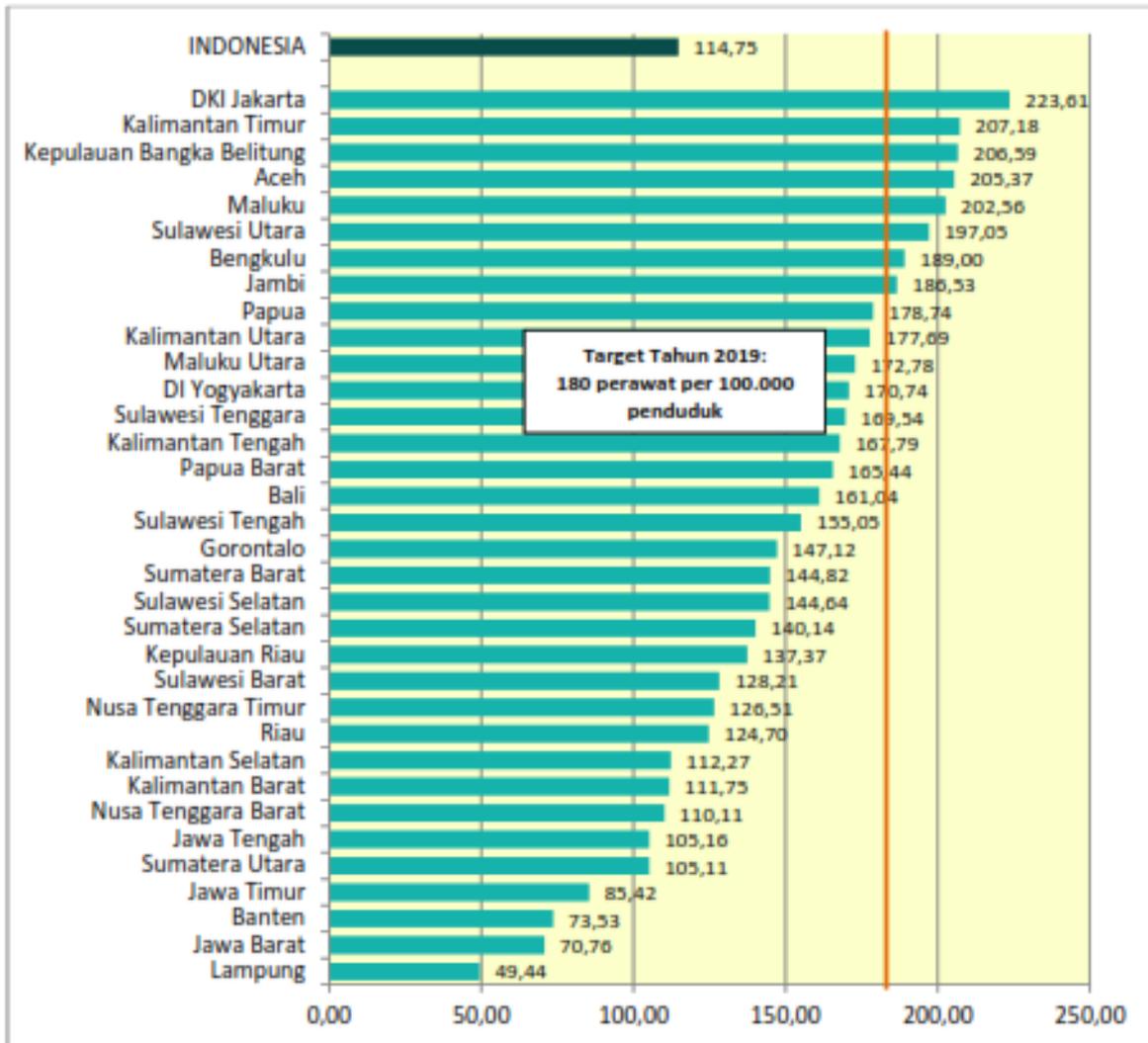
Gambar 5.4 Rasio Dokter Gigi per 100.000 Penduduk di Indonesia 2016



Sumber: Profil Tenaga Kesehatan 2017, Kementerian Kesehatan

Secara nasional, rasio perawat pada tahun 2016 adalah 114,75 per 100.000 penduduk (Gambar 5.5). Hal ini masih jauh dari target tahun 2019 sebesar 180 per 100.000 penduduk. Namun ada delapan provinsi dengan rasio perawat yang sudah memenuhi target tahun 2019 yaitu DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Aceh, Maluku, Sulawesi Utara, Bengkulu, dan Jambi. Provinsi dengan rasio perawat terendah yaitu Lampung sebesar 49,44 per 100.000 penduduk.

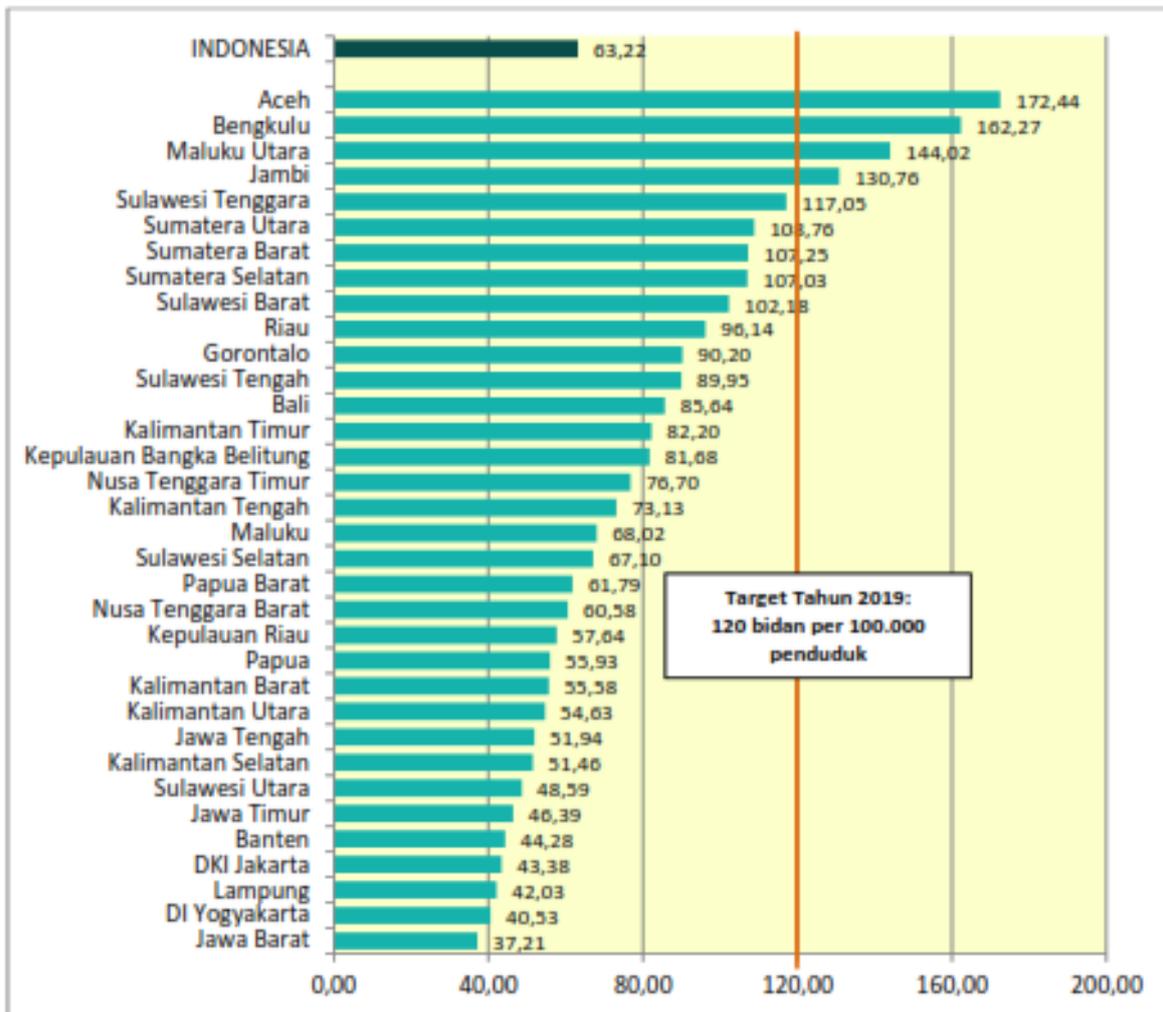
Gambar 5.5 Rasio Perawat per 100.000 Penduduk di Indonesia 2016



Sumber: Profil Tenaga Kesehatan 2017, Kementerian Kesehatan

Rasio bidan di Indonesia pada tahun 2016 adalah sebesar 63,22 per 100.000 penduduk (Gambar 5.6). Angka ini masih jauh dari target 2019 sebesar 120 per 100.000 penduduk. Ada empat provinsi yang telah memenuhi target tahun 2019 yaitu Aceh, Bengkulu, Maluku Utara, dan Jambi. Provinsi dengan rasio terendah yaitu Jawa Barat sebesar 37,21 per 100.000 penduduk.

Gambar 5.6 Rasio Bidan per 100.000 Penduduk di Indonesia 2016



Sumber: Profil Tenaga Kesehatan 2017, Kementerian Kesehatan

5.4. Strategi untuk Memperbaiki Status Gizi dan Kesehatan

Dalam rangka meningkatkan koordinasi lintas sektor yang efektif dan efisien melalui berbagai kebijakan, program, dan kegiatan di bidang pangan dan gizi telah disusun Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi 2017 – 2019. Perpres ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi yang berkelanjutan guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Kebijakan di bidang perbaikan gizi masyarakat sebagaimana tertuang dalam Perpres meliputi: 1. Perbaikan pola konsumsi pangan perseorangan dan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang, dan aman; 2. Perbaikan atau pengayaan gizi pangan tertentu; 3. Penguatan pelaksanaan dan pengawasan regulasi dan standar gizi; 4. Penetapan persyaratan khusus mengenai komposisi pangan untuk meningkatkan kandungan gizi pangan olahan tertentu yang diperdagangkan; 5. Perbaikan gizi bagi ibu

hamil, ibu menyusui, bayi, balita, remaja, dan kelompok rawan gizi lainnya; 6. Penguatan sistem surveilan pangan dan gizi; dan 7. Penguatan program gizi lintas sektor melalui program sensitif gizi.

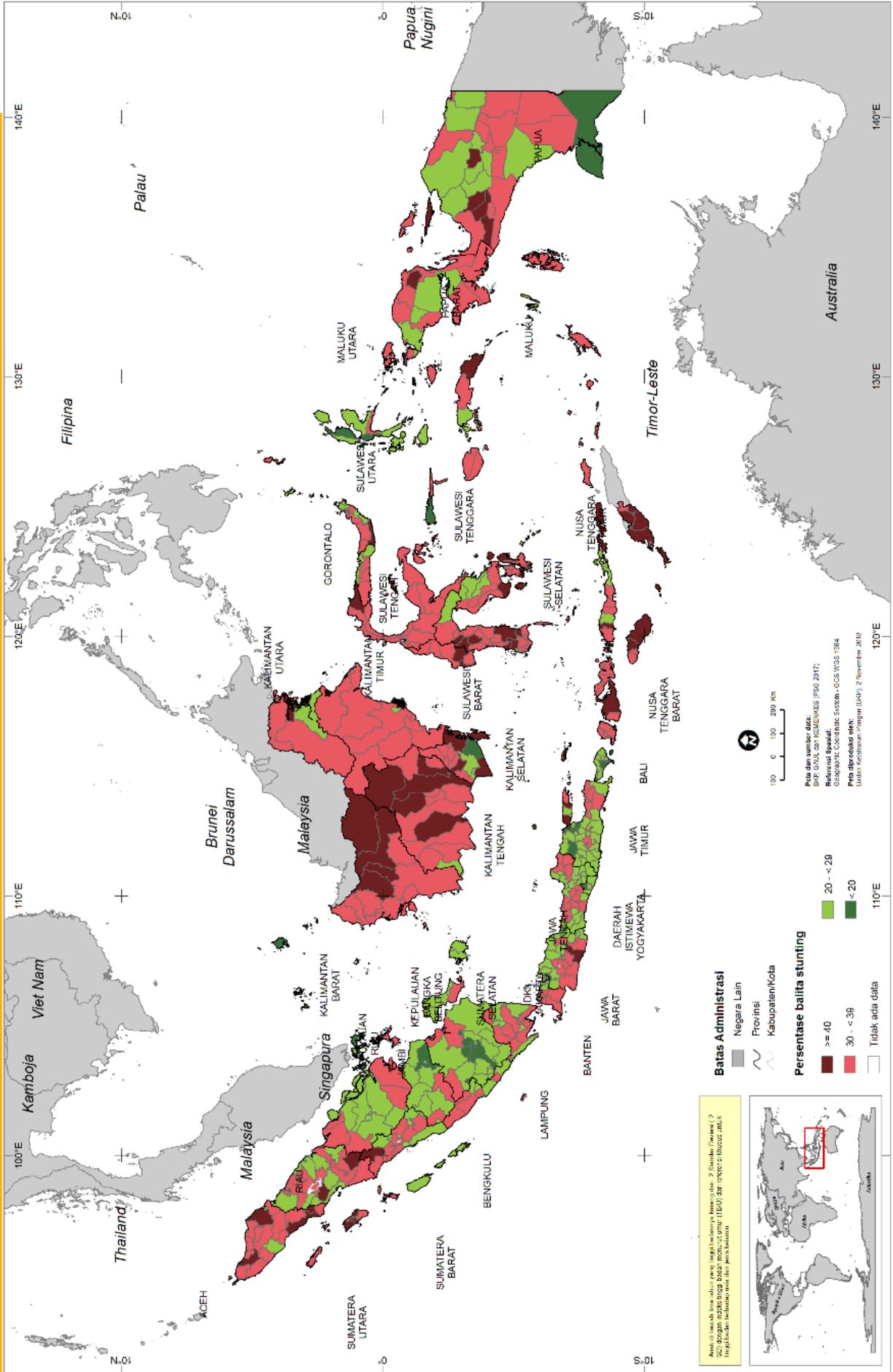
Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi selanjutnya dioperasionalkan melalui Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) yang terdiri atas 5 pilar, meliputi: a. Perbaikan gizi masyarakat; b. Peningkatan aksesibilitas pangan yang beragam; c. Mutu dan keamanan pangan; d. Perilaku hidup bersih dan sehat; dan e. Koordinasi pembangunan pangan dan gizi. Kegiatan utama yang mendukung perbaikan gizi masyarakat adalah: a. Promosi dan pendidikan gizi masyarakat; b. Pemberian suplementasi gizi; c. Pelayanan kesehatan dan masalah gizi; d. Pemberdayaan masyarakat di bidang pangan dan gizi; e. Jaminan sosial yang mendukung perbaikan pangan dan gizi; dan f. Pendidikan anak usia dini. Selanjutnya provinsi dan kabupaten/kota masing-masing menyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) yang lebih operasional sesuai dengan potensi dan target yang akan dicapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Black, Robert E., et al. *Maternal and Child Undernutrition and Overweight in Low-Income and Middle-Income Countries*. The Lancet 382.9890 (2013): 427-451.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2017. Survey Sosial Ekonomi Nasional. Jakarta.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2016. Survey Sosial Ekonomi Nasional. Jakarta.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2017. Statistik Indonesia. Jakarta.
- Kementerian Kesehatan. 2016. Pemantauan Status Gizi (PSG). Jakarta.
- Kementerian Kesehatan. 2017. Pemantauan Status Gizi (PSG). Jakarta.
- Kementerian Kesehatan. 2017. Profil Tenaga Kesehatan. Tersedia di: <http://bppsdmk.kemkes.go.id>. Jakarta.
- Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi 2017-2019. Jakarta.
- [TNP2K] Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 2017. 100 Kabupaten/Kota Prioritas untuk Intervensi Stunting Tahun 2018. Jakarta: TNP2K.
- [WHO] World Health Organization. 2000. *Classification of Severity of Malnutrition in a Community for Children Under 5 Years of Age from 'The Management of Nutrition in Major Emergencies'*. Genewa.

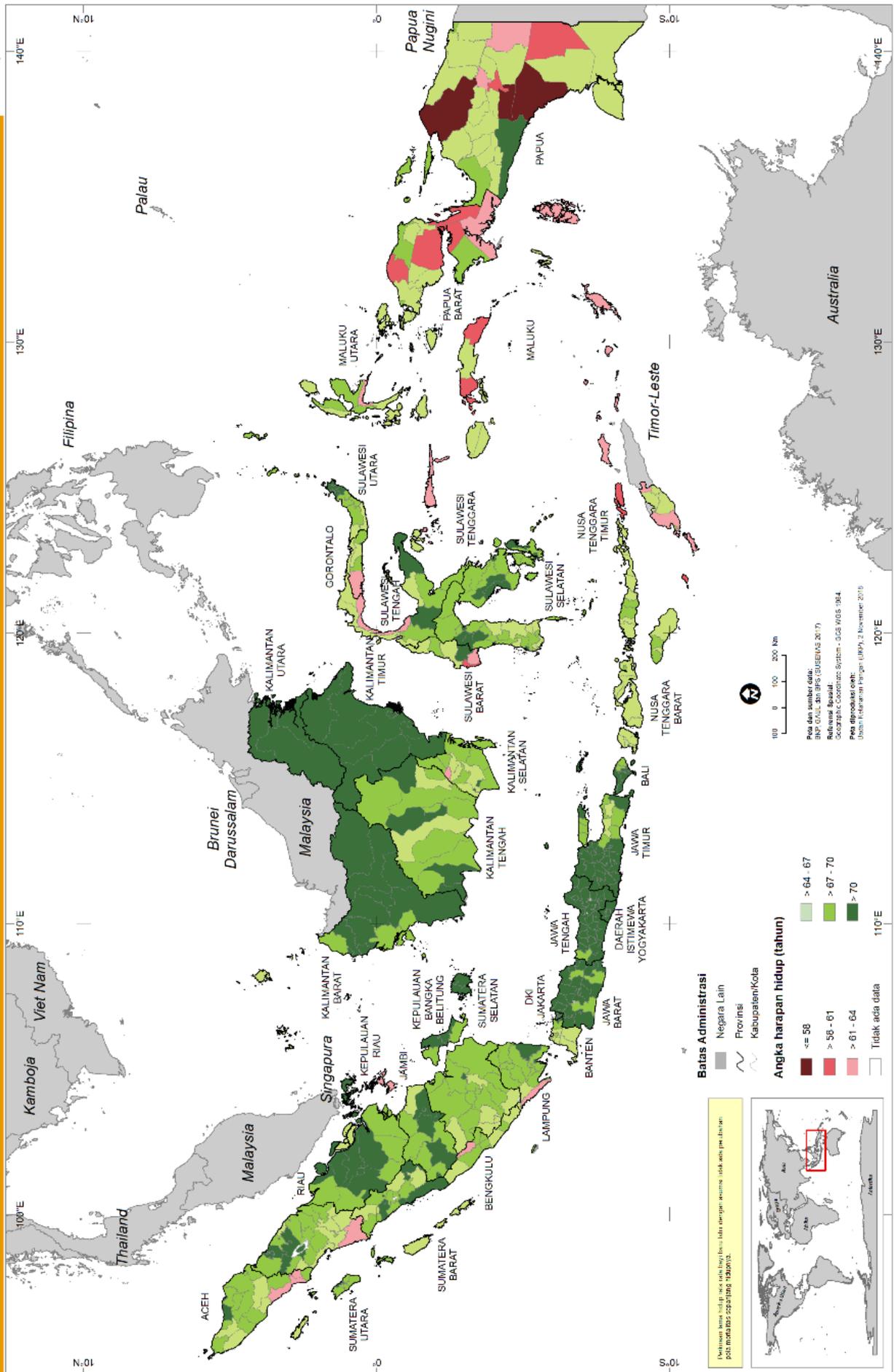


Peta 5.1: Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting)





Peta 5.2: Angka harapan hidup



BAB 6

FAKTOR IKLIM DAN LINGKUNGAN YANG MEMPENGARUHI KETAHANAN PANGAN

Kerentanan terhadap bencana alam dan gangguan mendadak lainnya dapat mempengaruhi ketahanan pangan dan gizi suatu wilayah baik bersifat sementara maupun jangka waktu panjang. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan secara sementara dikenal sebagai kerawanan pangan sementara (*transient food insecurity*). Bencana alam yang terjadi tiba-tiba, maupun perubahan harga atau guncangan terhadap pasar, epidemik penyakit, konflik sosial dan lain-lain dapat menyebabkan terjadinya kerawanan pangan transien (sementara). Kerawanan pangan transien dapat berpengaruh terhadap satu atau semua aspek ketahanan pangan seperti ketersediaan pangan, akses terhadap pangan dan pemanfaatan pangan.

Kerawanan pangan transien dapat juga dibagi menjadi dua, yaitu **berulang (cyclical)**, di mana terdapat suatu pola yang berulang terhadap kondisi rawan pangan, misalnya, “musim paceklik” yang terjadi dalam periode sebelum panen dan **temporal (temporary)**, yang merupakan hasil dari suatu gangguan mendadak dari luar pada jangka pendek, seperti kekeringan atau banjir. Konflik sipil juga termasuk dalam kategori guncangan (*shock*) temporal meskipun dampak negatifnya terhadap ketahanan pangan dapat berlanjut untuk jangka waktu lama. Dengan kata lain, kerawanan pangan transien dapat mempengaruhi orang-orang yang berada pada kondisi rawan pangan kronis dan juga orang-orang yang berada pada keadaan tahan pangan.

Di dalam bab ini, kerawanan pangan dianalisis dari segi iklim dan lingkungan. Faktor iklim dan lingkungan serta kemampuan masyarakat untuk mengatasi guncangan sangat menentukan apakah suatu negara atau wilayah dapat mencapai dan mempertahankan ketahanan pangan dan gizinya. Tinjauan ketahanan pangan dan gizi ini berdasarkan pada dampak dari berbagai bencana alam dan degradasi lingkungan terhadap ketersediaan dan akses pangan. Variabilitas curah hujan dan daerah yang terkena banjir dan tanah longsor merupakan beberapa indikator yang digunakan dalam bab ini untuk menjelaskan kerawanan pangan transien di Indonesia.

Untuk melakukan analisis komprehensif terhadap kondisi iklim yang mempengaruhi kerawanan pangan transien, empat faktor utama dianalisis dalam FSVA 2018, yaitu: i) Data kejadian bencana alam yang terjadi di tingkat kabupaten; ii) Estimasi kehilangan produksi padi dan jagung akibat banjir dan kekeringan; dan iii) variabilitas curah hujan.

6.1. Bencana Alam

Sebagai salah satu negara yang paling rawan terhadap bencana di dunia, bencana alam merupakan faktor utama kerawanan pangan transien di Indonesia. Berdasarkan penelitian dari *Center for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED)*, terdapat lima negara (Indonesia, China, Amerika Serikat, India dan Philipina) yang paling sering mengalami bencana alam pada tahun 2016 (Tabel 6.1).

Tabel 6.1 Sepuluh Negara yang Mengalami Bencana Alam Terbanyak 2016

Negara	Jumlah Kejadian Utama
China	34
Amerika Serikat	26
India	17
Indonesia	15
Philipina	11
Vietnam	10
Jepang	10
Pakistan	9
Haiti	8
Mexico	6

Sumber: *Center for Research on the Epidemiology of Disasters, 2016*

Berdasarkan data dari pemerintah, terjadi 21.387 bencana alam selama periode tahun 2003-2017 yang telah menyebabkan lebih dari 190.100 orang meninggal dunia (Tabel 6.2). Data ini mencatat seluruh jenis kejadian bencana yang meliputi banjir, tanah longsor, gelombang pasang/abrasi, angin puting beliung, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, perubahan iklim, hama tanaman dan kejadian luar biasa (KLB). Pada periode tahun 2003-2017, kejadian bencana alam yang paling sering terjadi adalah banjir, angin puting beliung dan tanah longsor, sedangkan gempa bumi dan tsunami merupakan kejadian bencana yang paling fatal yang menyebabkan lebih dari 174.100 orang meninggal. Kejadian bencana alam di Indonesia paling sering terjadi di Jawa Tengah, kemudian diikuti oleh Jawa Barat, Jawa Timur, Aceh dan Sulawesi Selatan (Gambar 6.1).

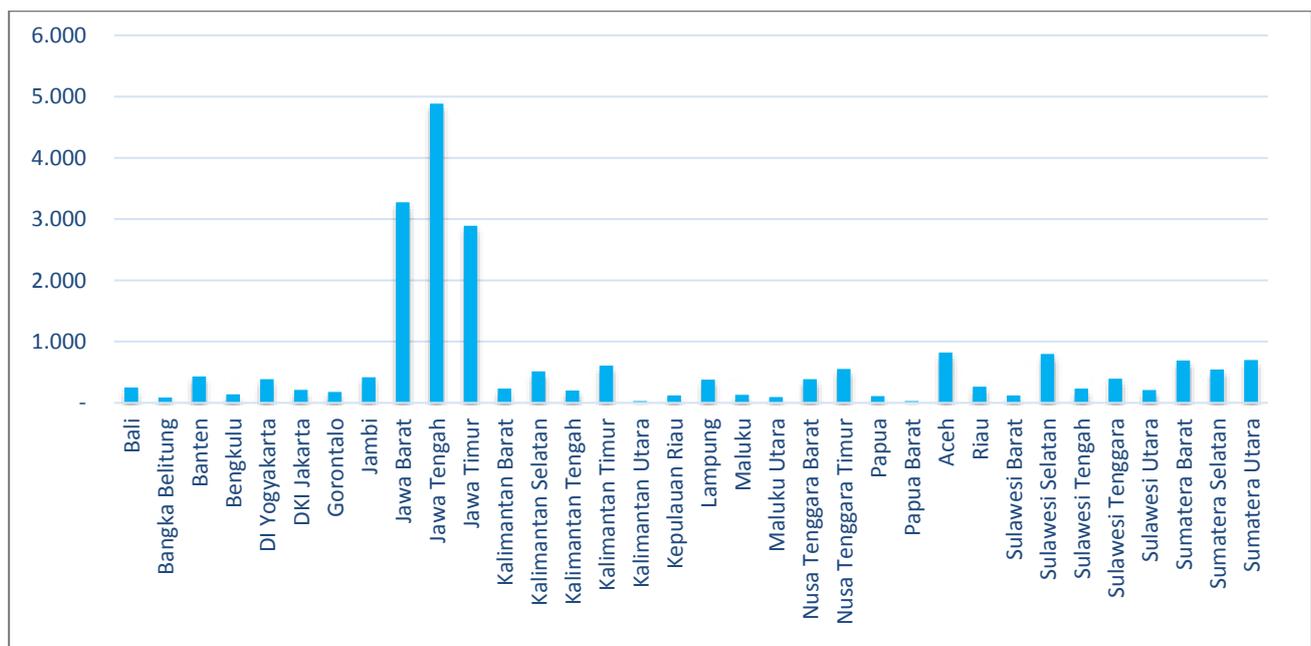
Tabel 6.2 Bencana Alam yang Terjadi di Indonesia dan Kerusakannya 2003-2017

Bencana	Kejadian	Meninggal & Hilang	Luka-luka	Menderita & Mengungsi	Rumah Rusak Berat	Rumah Rusak Ringan	Fasilitas Kesehatan Rusak	Fasilitas Pendidikan Rusak	Lahan Pertanian (Ha)
Banjir	7.810	2.590	141.402	20.601.180	31.074	101.751	70	483	1.460.577
Tanah longsor	4.275	2.433	2.668	218.435	9.964	14.191	2	13	70.968
Banjir dan tanah longsor	613	1.540	40.697	1.317.313	7.382	22.600	-	311	285.356
Gelombang pasang/abrasi	301	68	228	74.441	1.320	2.139	-	2	938
Puting beliung	5.291	331	3.102	289.174	29.563	123.214	10	58	17.649
Kekeringan	1.875	2	-	3.893.270	-	-	-	-	1.732.555

Bencana	Kejadian	Meninggal & Hilang	Luka-luka	Menderita & Mengungsi	Rumah Rusak Berat	Rumah Rusak Ringan	Fasilitas Kesehatan Rusak	Fasilitas Pendidikan Rusak	Lahan Pertanian (Ha)
Kebakaran hutan dan lahan	621	31	13.221	444.325	115	13	-	-	414
Gempa bumi	358	7.608	58.736	2.966.990	209.848	373.301	6	40	1.993
Tsunami	3	1	-	67	17	17	-	-	-
Gempa bumi dan tsunami	41	174.112	3.988	4.788.959	517	209	-	-	58.087
Letusan gunung api	94	436	3.483	944.072	14.887	5.726	-	-	6.682
Perubahan iklim	2	96	4	-	-	-	-	-	-
Hama tanaman	4	-	-	-	-	-	-	-	321
KLB	99	860	38.302	-	-	-	-	-	-
Total	21.387	190.108	305.831	35.538.226	304.687	643.161	88	907	3.635.540

Sumber: BNPB, 2017

Gambar 6.1 Bencana Alam per Provinsi 2003 – 2017



Sumber: BNPB, 2017

6.2. Variabilitas Curah Hujan

Fenomena perubahan iklim global akibat peningkatan konsentrasi gas rumah kaca yang utamanya diakibatkan aktivitas manusia menimbulkan dampak yang berbeda di berbagai belahan dunia, tak terkecuali Indonesia yang berada di wilayah benua maritim tropis. Salah satu parameter iklim utama yang menjadi perhatian di wilayah ini adalah hujan. Variabilitas hujan mempunyai peranan penting dalam mempengaruhi berbagai kegiatan ekonomi, seperti pertanian, perkebunan dan perikanan. Ketersediaan

curah hujan dalam kurun waktu musiman sangat mempengaruhi produktivitas dari aktivitas-aktivitas ekonomi tersebut.

Proyeksi perubahan curah hujan dalam jangka waktu tahun 2032-2040 (*near future*), dibandingkan dengan baseline tahun 2006-2014, diilustrasikan dalam Peta 6.1, dibagi dalam 4 musim yang berbeda (DJF, MAM, JJA, SON) menggunakan skenario pengurangan emisi, yaitu RCP4.5 (*moderate mitigation*). Data proyeksi dihasilkan dengan ensamble data beberapa data model iklim global yang telah di-*downscale* menggunakan metode *dynamic downscaling* yang dilakukan oleh beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia yang diwakili oleh BMKG dalam suatu kerjasama bertajuk *Coordinated Regional Climate Downscaling Experiment Southeast Asia (CORDEX-SEA)*.

Hasil model proyeksi iklim Indonesia pada rata-rata curah hujan per musim di periode *near future* berkurang hingga 3% dibanding baseline, kecuali pada MAM cenderung bertambah sekitar 1%. Rata-rata perubahan curah hujan *near future* terhadap baseline per kabupaten di Indonesia menunjukkan pola beragam, pada DJF sekitar 78% kabupaten di Indonesia berkurang curah hujannya dan 22% kabupaten bertambah curah hujannya. Sedangkan pada JJA, 64% kabupaten di Indonesia berkurang curah hujannya. Hal ini akan mengakibatkan meningkatnya resiko kekeringan dan gagal panen, mengingat kebanyakan dari sentra produksi pangan di Indonesia berada di daerah yang termasuk dalam kategori iklim monsun.

6.3. Kehilangan Produksi yang Disebabkan oleh Kekeringan, Banjir dan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)

Produksi dan produktivitas tanaman pangan sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim dan cuaca. Daerah yang rusak didefinisikan sebagai suatu daerah yang produksi pangannya menurun akibat bencana alam (banjir, kekeringan) dan/atau penularan hama oleh OPT.

Kehilangan produksi pada statistik Indonesia dikategorikan sebagai kehilangan total (*puso*) dan terdampak (ketika kehilangan kurang dari 50%). Tabel 6.3 menunjukkan proporsi kerusakan tanaman padi dan jagung terhadap luas area tanaman padi dan jagung yang disebabkan oleh banjir, kekeringan dan OPT di setiap provinsi pada periode 2013-2017. Secara nasional, kerusakan tanaman padi dan jagung relatif rendah selama periode tersebut (kurang dari 1% dari total luas tanam setiap tahun), kecuali tahun 2014 dan 2015. Pada tahun 2014, kerusakan tanaman padi sebesar 1,31%, dan tahun 2015 kerusakan tanaman padi mencapai 1,79%. Kerusakan areal tanaman padi tahun 2017 (0,68%) lebih besar dibandingkan tahun 2016 (0,45%), tahun 2015 (1,79%), tahun 2014 (1,31%) dan tahun 2013 (0,70%). Pada tahun 2017, tingkat kerusakan terparah tanaman padi ditemukan di Sulawesi Selatan (3,08%), Jambi (2,23%), Aceh (1,78%) yang diikuti Sulawesi Tenggara (1,75%). Kerusakan tanaman jagung pada tahun 2017 (0,18%) lebih kecil daripada tahun 2016 (0,76%), tahun 2015 (0,58%), tahun 2014 (0,14%) dan tahun 2013 (0,22%). Pada tahun 2017, tingkat kerusakan terparah tanaman jagung terjadi di Jambi (2,33%) yang diikuti Aceh (1,23%) dan Sumatera Utara (1,19%).

Tabel 6.3 Perbandingan Area Puso Padi dan Jagung Akibat Banjir, Kekeringan dan Organisme Pengganggu Tanaman 2013-2017

No	Provinsi	Padi (%)					Jagung (%)				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	Aceh	2,63	6,73	1,27	1,44	1,78	0,37	0,99	1,35	0,97	1,23
2	Sumatera Utara	0,53	0,20	0,35	0,27	0,40	0,04	0,04	0,17	1,19	1,19
3	Sumatera Barat	0,10	0,31	0,31	0,47	0,10	0,19	0,03	0,07	0,33	0,23
4	Riau	1,01	1,21	1,11	5,03	0,58	0,16	0,11	2,16	1,05	0,23
5	Jambi	1,71	0,94	4,43	3,81	2,23	0,66	0,78	1,07	2,67	2,33
6	Sumatera Selatan	0,23	0,62	3,22	1,36	0,74	0,08	0,10	1,83	0,26	0,02
7	Bengkulu	0,08	-	0,16	0,01	0,01	-	-	0,14	-	-
8	Lampung	0,81	0,78	2,27	0,07	1,38	0,02	0,00	0,06	0,14	0,01
9	Bangka Belitung	0,01	0,08	2,08	1,88	1,01	-	-	6,33	-	-
10	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	4,61	9,08	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	0,26	2,70	2,61	0,23	0,30	-	-	0,01	0,01	0,12
13	Jawa Tengah	0,79	2,12	1,06	0,40	0,47	0,05	0,06	0,04	0,21	0,04
14	DI Yogyakarta	0,08	0,09	0,09	0,07	0,54	-	-	0,01	0,78	0,69
15	Jawa Timur	0,81	0,30	0,39	0,21	0,18	0,18	0,07	0,02	0,73	0,05
16	Banten	2,30	1,73	3,77	0,17	0,30	-	-	-	-	0,21
17	Bali	0,00	0,05	0,34	0,16	0,12	-	0,17	0,03	0,13	0,00
18	NTB	0,47	0,22	0,26	0,29	0,64	0,11	0,00	0,13	0,02	0,08
19	NTT	0,28	0,37	0,01	0,17	0,09	0,53	0,03	0,01	0,45	0,03
20	Kalimantan Barat	0,08	2,05	0,14	0,09	0,02	-	-	0,01	-	0,02
21	Kalimantan Tengah	0,26	0,21	0,04	0,24	0,64	0,11	-	0,97	0,04	0,31
22	Kalimantan Selatan	0,00	0,47	1,22	0,78	0,26	-	0,05	0,14	0,28	0,09
23	Kalimantan Timur	0,38	0,81	3,83	0,41	1,32	0,02	0,24	-	0,03	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	0,16	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	0,05	0,03	0,53	0,00	0,01	-	0,01	1,06	0,02	0,00
26	Sulawesi Tengah	0,04	0,69	3,14	0,26	0,24	0,01	0,64	2,32	0,22	0,60
27	Sulawesi Selatan	1,87	0,80	5,15	0,36	3,08	1,30	0,58	1,48	0,20	0,24
28	Sulawesi Tenggara	0,78	2,42	7,49	0,25	1,75	1,05	0,00	0,20	0,04	0,15
29	Gorontalo	0,02	0,56	8,39	1,98	0,67	0,03	1,14	7,03	7,72	0,41
30	Sulawesi Barat	0,01	0,02	2,37	0,14	0,04	-	-	0,08	0,21	0,15
31	Maluku	0,12	7,30	2,83	0,06	0,09	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	0,08	0,07	-	-	-	0,02	-	-	0,25	-
33	Papua Barat	0,04	0,01	0,04	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua	0,67	0,20	11,95	-	0,06	-	-	-	-	0,10
Total		0,70	1,31	1,79	0,45	0,68	0,22	0,14	0,58	0,76	0,18

Sumber: Kementerian Pertanian, 2017

* Provinsi yang mempunyai tingkat kerusakan sangat kecil sehingga dapat diabaikan

Selama periode 2013-2017, puso pada tanaman padi yang disebabkan kekeringan paling banyak terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan (72.703 Ha), Jawa Barat (50.352 Ha), Jawa Tengah (25.178 Ha), Sumatera Selatan (22.303 Ha) dan Sulawesi Tenggara (14.342 Ha). Sementara, puso pada tanaman padi yang disebabkan banjir paling banyak terjadi di Provinsi Jawa Barat (64.498 Ha), Jawa Tengah (60.725 Ha), Aceh (50.063 Ha), Sulawesi Selatan (48.420 Ha) dan Jawa Timur (28.488 Ha).

DAFTAR PUSTAKA

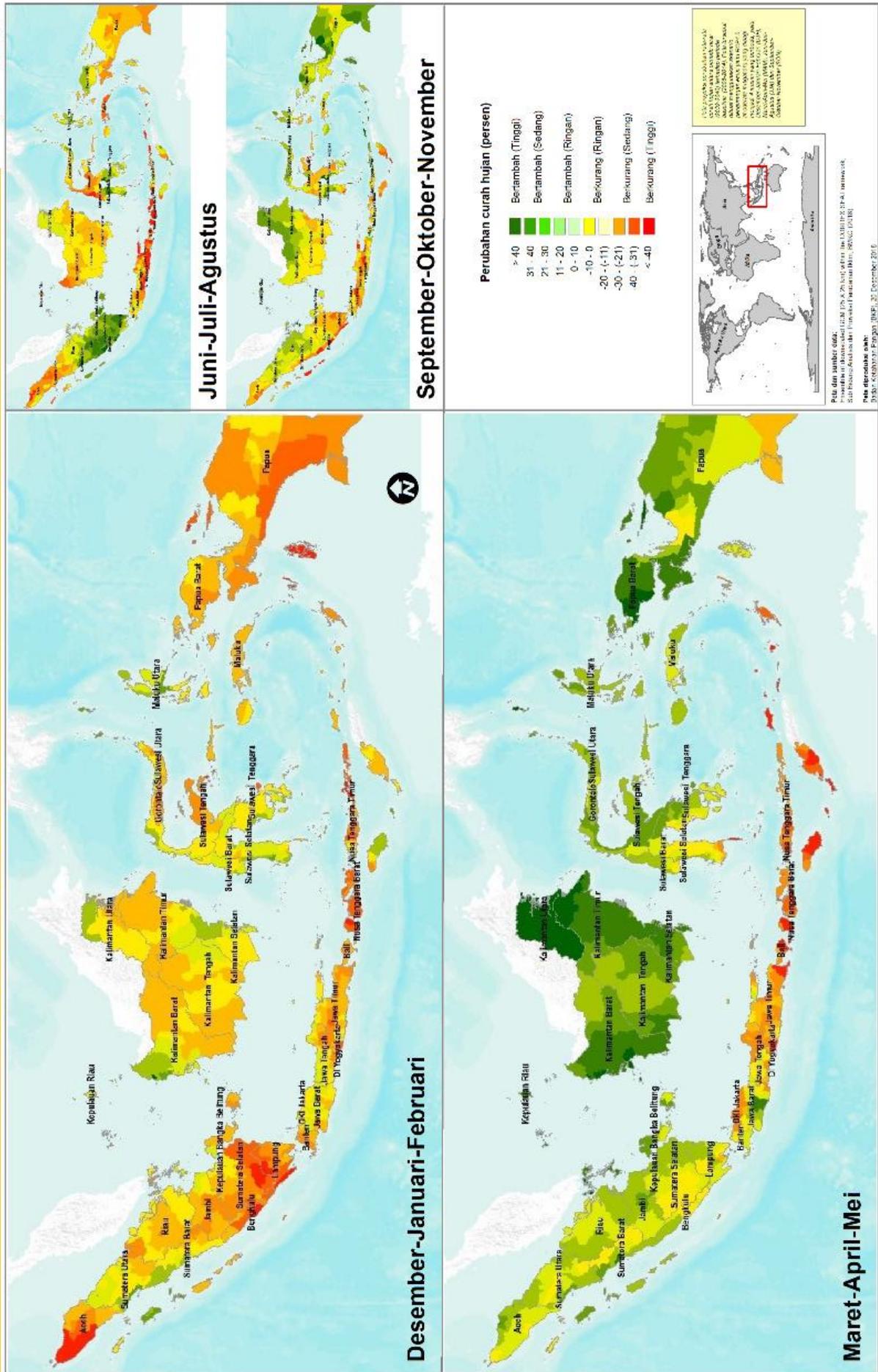
[BMKG] Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. 2018. *Perubahan Iklim: Trend Suhu*. Jakarta: BMKG.

[BNPB] Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2018. *Data dan Informasi*. Jakarta: BNPB.

[CRED] Center for Research on the Epidemiology of Disaster. 2016. *Annual Disaster Statistical Review 2016 The numbers and trends*. Belgium: Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED), Institute of Health and Society (IRSS).

[Kementan] Kementerian Pertanian. 2017. *Data Luas Puso Padi dan Jagung 2013-2017*. Jakarta: Kementerian Pertanian.

Peta 6.1: Peta Proyeksi Perubahan Rata-Rata Curah Hujan Musiman Periode 2032-2040 Terhadap 2006-2014



BAB 7

ANALISIS KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOMPOSIT

7.1. Ketahanan Pangan di Indonesia

Banyak faktor dapat mempengaruhi kerentanan rumah tangga terhadap kerawanan pangan. Faktor-faktor tersebut dikelompokkan menurut keterkaitannya dengan tiga dimensi ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan, akses pangan serta pemanfaatan zat-zat gizi dalam pangan. Berdasarkan literatur yang ada, peta ini menetapkan sembilan indikator yang mencakup tiga dimensi ketahanan pangan dengan mempertimbangkan kelengkapan ketersediaan dan kontinuitas data. Untuk mengetahui definisi, perhitungan dan sumber data setiap indikator dapat dilihat pada Tabel 1.1. Sedangkan hubungan antar indikator dan ketahanan pangan dijelaskan secara rinci pada Bab 2 sampai 5.

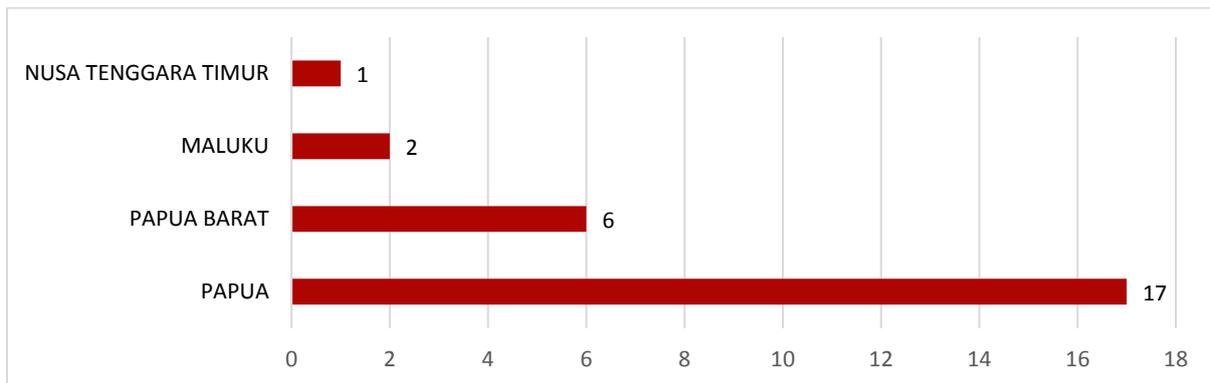
Metodologi untuk menyusun peringkat dan pengelompokan kabupaten/kota ke dalam prioritas status ketahanan pangan, dimutakhirkan dengan menggunakan metode pembobotan yang diadopsi dari *Global Food Security Index (GFSI)* sebagai penyempurnaan metode yang digunakan pada atlas – atlas sebelumnya. Bobot masing-masing indikator individu di dalam analisis komposit menggunakan rata-rata penilaian bobot ditetapkan oleh para ahli. Metode ini menghasilkan skor di masing-masing kabupaten/kota selanjutnya dikelompokkan ke dalam salah satu dari 6 kelompok prioritas. Goodridge (2007) menyatakan jika variabel yang digunakan dalam perhitungan indeks berbeda, maka perlu dilakukan secara tertimbang (pembobotan) untuk membentuk indeks agregat yang disesuaikan dengan tujuannya. Metode pembobotan akan meningkatkan obyektivitas dan kepercayaan hasil analisis.

Kabupaten/kota diklasifikasikan dalam 6 kelompok ketahanan pangan dan gizi berdasarkan pada tingkat keparahan dan penyebab dari situasi ketahanan pangan dan gizi. Kabupaten/kota di Prioritas 1, 2 dan 3 merupakan wilayah rentan pangan dengan klasifikasi Prioritas 1 tingkat rentan pangan tinggi, Prioritas 2 rentan pangan sedang, dan prioritas 3 rentan pangan rendah. Kabupaten/kota di Prioritas 4, 5, dan 6 merupakan wilayah tahan pangan dengan klasifikasi prioritas 4 tahan pangan rendah, prioritas 5 tahan pangan sedang, sedangkan prioritas 6 yaitu tahan pangan tinggi. Kabupaten atau kota dipetakan dalam warna merah untuk kelompok prioritas 1, 2, dan 3, dan warna hijau untuk Prioritas 4, 5 dan 6 (Peta 7.1). Tujuan dari penentuan prioritas ini adalah untuk mengidentifikasi dimanakah kabupaten atau kota yang lebih rentan terhadap terjadinya kerawanan pangan dan gizi. Karena karakteristik kabupaten dan kota berbeda, maka pada penyusunan atlas 2018 ini analisis terhadap 416 kabupaten dan 98 kota dilakukan secara terpisah.

Analisis Kabupaten pada Atlas 2018

Berdasarkan analisis komposit ketahanan pangan, 416 kabupaten dikelompokkan dalam enam kelompok prioritas sebagai berikut: 26 kabupaten pada Prioritas I (6%), 21 kabupaten pada Prioritas 2 (11%), 34 kabupaten pada Prioritas 3 (8%), 47 kabupaten pada Prioritas 4 (11%), 137 kabupaten pada Prioritas 5 (33%) dan 151 kabupaten pada Prioritas 6 (36%). Total kabupaten Prioritas 1-3 (rentan terhadap kerawanan pangan) berjumlah 81 kabupaten, sedangkan kabupaten prioritas 4-6 (tahan terhadap kerawanan pangan) berjumlah 335 kabupaten. Kabupaten pada Prioritas I tersebar di Provinsi Papua (tujuh belas kabupaten), Papua Barat (enam kabupaten), Maluku (dua kabupaten) dan Nusa Tenggara Timur (satu kabupaten) (Gambar 7.1).

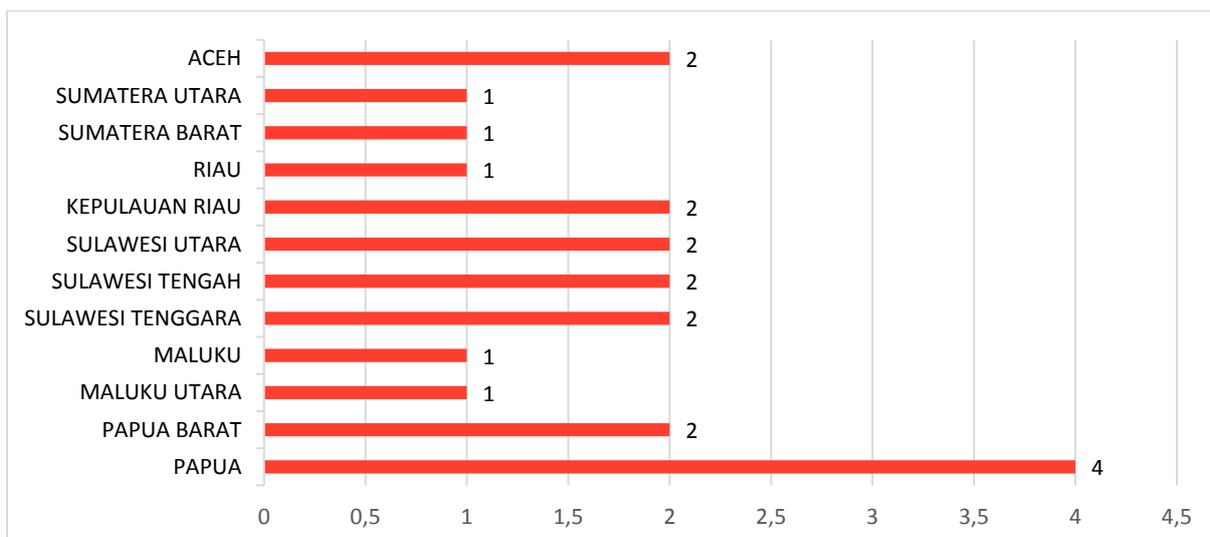
Gambar 7.1 Jumlah Kabupaten Rentan di Prioritas I per Provinsi



Sumber: Hasil analisis, 2018

Kabupaten pada Prioritas 2 tersebar di Provinsi Papua (empat kabupaten), Papua Barat (dua kabupaten), Sulawesi Tenggara (dua kabupaten), Sulawesi Tengah (dua kabupaten), Sulawesi Utara (dua kabupaten), Kepulauan Riau (dua kabupaten), Aceh (dua kabupaten) dan di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Maluku dan Maluku Utara masing-masing satu kabupaten (Gambar 7.2).

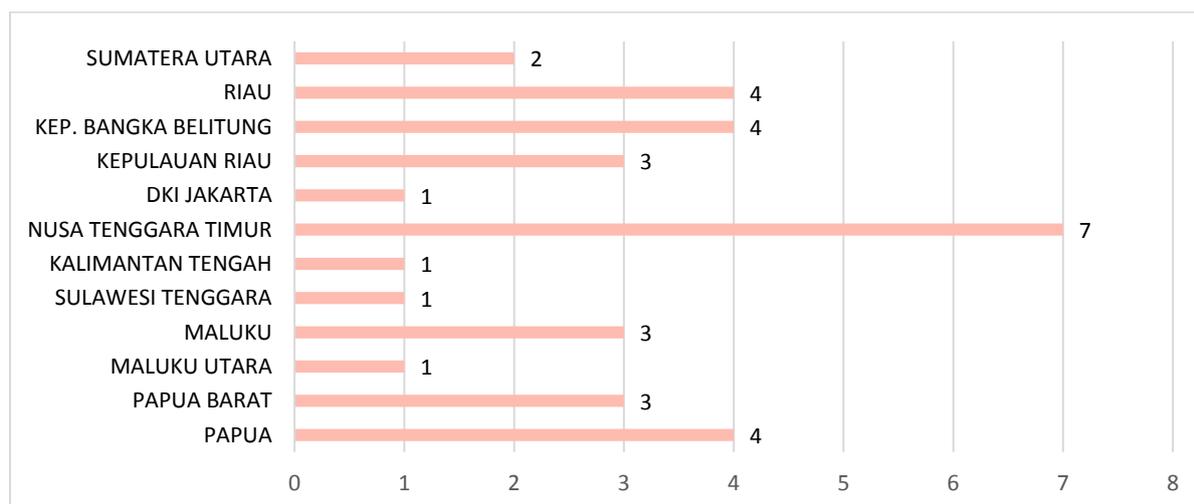
Gambar 7.2 Jumlah Kabupaten Rentan di Prioritas 2 per Provinsi



Sumber: Hasil analisis, 2018

Kabupaten pada Prioritas 3 tersebar di provinsi Nusa Tenggara Timur (tujuh kabupaten), Papua (empat kabupaten), Kepulauan Bangka Belitung (empat kabupaten), Riau (empat kabupaten), Papua Barat (tiga kabupaten), Maluku (tiga kabupaten), Kepulauan Riau (tiga kabupaten), Sumatera Utara (dua kabupaten) dan di Provinsi DKI Jakarta, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara masing-masing kabupaten (Gambar 7.3). Hasil analisis menunjukkan secara umum kawasan Indonesia Timur memiliki status ketahanan pangan yang lebih rendah dibandingkan kawasan Indonesia Barat. Begitu pula daerah Kepulauan memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi dibandingkan daerah bukan kepulauan.

Gambar 7.3 Jumlah Kabupaten Rentan di Prioritas 3 per Provinsi



Sumber: Hasil analisis, 2013

FSVA 2018 telah mengakomodasi pemekaran wilayah. Dari 416 kabupaten yang dianalisis, 383 kabupaten merupakan daerah yang tidak mengalami pemekaran, 15 kabupaten yang mengalami pemekaran, dan 18 kabupaten baru hasil pemekaran. Berdasarkan hasil analisis, sembilan kabupaten hasil pemekaran (50%) termasuk kabupaten dengan kategori rentan terhadap rawan pangan (Prioritas 1-3). Sementara itu, 15 kabupaten yang mengalami pemekaran, 2 kabupaten (14%) diantaranya adalah kabupaten Prioritas 1-3, dan sebanyak 13 kabupaten pada Prioritas 4-6 (86%). Secara umum kabupaten hasil pemekaran memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten induknya (Tabel 7.1).

Tabel 7.1 Klasifikasi Prioritas Berdasarkan Status Kabupaten (Tanpa Pemekaran, Induk dan Pemekaran)

Prioritas	Kabupaten Tanpa Pemekaran	Kabupaten lama (induk)	Kabupaten Hasil Pemekaran	Total
1	25	-	1	26
2	16	1	4	21
3	29	1	4	34
4	41	4	2	47
5	129	4	4	137
6	143	5	3	151
Total	383	15	18	416

Sumber: Hasil analisis, 2018

Tabel 7.2 menunjukkan sebaran prioritas kabupaten di setiap provinsi. Provinsi dengan tingkat kerentanan pangan tinggi (Prioritas 1) secara umum terdapat di daerah Papua (61% dari total kabupaten), Papua Barat (50%), dan Maluku (22%). Provinsi dengan tingkat ketahanan pangan paling baik adalah provinsi Bali, Kalimantan Selatan dan DI Yogyakarta dimana seluruh kabupatennya masuk dalam kategori tahan pangan prioritas 6, diikuti oleh Provinsi Kalimantan Utara (75%), Jawa Tengah (72%), serta Sulawesi Selatan (71%).

Tabel 7.2 Sebaran Prioritas Kabupaten di Setiap Provinsi (Persentase)

Provinsi	Prioritas						Total
	1	2	3	4	5	6	
Aceh	0%	11%	0%	11%	67%	11%	100%
Sumatera Utara	0%	4%	8%	16%	32%	40%	100%
Sumatera Barat	0%	8%	0%	0%	33%	58%	100%
Riau	0%	10%	40%	30%	20%	0%	100%
Jambi	0%	0%	0%	22%	44%	33%	100%
Sumatera Selatan	0%	0%	0%	8%	69%	23%	100%
Bengkulu	0%	0%	0%	11%	89%	0%	100%
Lampung	0%	0%	0%	0%	54%	46%	100%
Kep. Bangka Belitung	0%	0%	67%	33%	0%	0%	100%
Kepulauan Riau	0%	40%	60%	0%	0%	0%	100%
DKI Jakarta	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%
Jawa Barat	0%	0%	0%	6%	56%	39%	100%
Jawa Tengah	0%	0%	0%	0%	28%	72%	100%
Di Yogyakarta	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Jawa Timur	0%	0%	0%	7%	28%	66%	100%
Banten	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%
Bali	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Nusa Tenggara Barat	0%	0%	0%	25%	38%	38%	100%
Nusa Tenggara Timur	5%	0%	33%	38%	24%	0%	100%
Kalimantan Barat	0%	0%	0%	17%	58%	25%	100%
Kalimantan Tengah	0%	0%	8%	8%	38%	46%	100%
Kalimantan Selatan	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Kalimantan Timur	0%	0%	0%	0%	57%	43%	100%
Kalimantan Utara	0%	0%	0%	0%	25%	75%	100%
Sulawesi Utara	0%	18%	0%	18%	27%	36%	100%
Sulawesi Tengah	0%	17%	0%	17%	42%	25%	100%
Sulawesi Selatan	0%	0%	0%	0%	29%	71%	100%
Sulawesi Tenggara	0%	13%	7%	27%	13%	40%	100%
Gorontalo	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%
Sulawesi Barat	0%	0%	0%	33%	33%	33%	100%
Maluku	22%	11%	33%	22%	11%	0%	100%
Maluku Utara	0%	13%	13%	25%	38%	13%	100%
Papua Barat	50%	17%	25%	8%	0%	0%	100%
Papua	61%	14%	14%	4%	4%	4%	100%
Total	6%	5%	8%	11%	33%	36%	100%

Sumber: Hasil analisis, 2018

Indikator utama yang menyebabkan kerentanan terhadap kerawanan pangan di 416 kabupaten secara umum adalah: i) Tingginya prevalensi balita stunting, ii) Rendahnya rata-rata lama sekolah perempuan >15 tahun, iii) Tingginya rasio konsumsi per kapita terhadap produksi bersih per kapita, iv) Tingginya rumah tangga tanpa akses air bersih, dan v) Tingginya jumlah rumah tangga dengan pangsa pengeluaran untuk pangan >65% terhadap total pengeluaran.

Secara lebih khusus, kabupaten-kabupaten dalam kelompok rentan rawan pangan Prioritas 1-3 (81 kabupaten) diindikasikan oleh: i) Tingginya rasio konsumsi per kapita terhadap produksi bersih per kapita, ii) Tingginya prevalensi balita stunting, iii) Tingginya penduduk miskin, iv) Tingginya rumah tangga tanpa akses ke air bersih, dan v) Rendahnya rata-rata lama sekolah perempuan >15 tahun. Rata-rata rasio konsumsi terhadap produksi pangan di daerah rentan pangan Prioritas 1-3 adalah 3,92. Kabupaten-kabupaten tersebut sangat tergantung pada *supply* pangan dari wilayah lain yang merupakan daerah sentra untuk memenuhi kebutuhan pangannya.

Rata-rata persentase balita *stunting* pada daerah rentan pangan adalah sebesar 33,72%. Namun demikian, angka tersebut tidak berbeda jauh dengan angka *stunting* di kabupaten tahan pangan, yaitu 32,21. WHO mengklasifikasikan wilayah dengan persentase balita *stunting* sebesar 30-40% sebagai wilayah dengan kategori buruk (WHO 2000). Melihat kondisi tersebut, maka penanganan *stunting* harus menjadi fokus tidak hanya di kabupaten rentan pangan tetapi juga di kabupaten yang tahan pangan.

Rata-rata angka kemiskinan di kabupaten rentan pangan adalah sebesar 23,19%. Angka ini jauh di atas rata-rata angka kemiskinan nasional yang sebesar 10,64% (Susenas Maret 2017). Rata-rata rumah tangga tanpa akses bersih yang memadai pada kabupaten rentan pangan adalah 50,08%, sedangkan rata-rata angka lama sekolah perempuan >15 tahun di kabupaten rentan pangan hanya sebesar 6,95 tahun (Tabel 7.3).

Tabel 7.3 Nilai Rata-Rata Kelompok Kabupaten Prioritas Rentan dan Prioritas Tahan

Indikator	Prioritas Rentan (1 – 3)	Prioritas Tahan (4 – 6)
Rasio konsumsi terhadap produksi	3,92	0,83
Angka kemiskinan	23,19	12,08
Pengeluaran pangan >65%	45,74	40,15
Terbatasnya akses ke listrik	26,45	3,03
Terbatasnya akses ke air bersih	50,08	42,16
Angka harapan hidup	65,38	69,03
Rasio penduduk per tenaga kesehatan	23,91	5,26
Lama sekolah perempuan >15 tahun	6,95	7,79
Stunting pada balita	33,72	32,21

Sumber: Hasil analisis, 2018

Indikator utama dari kerentanan terhadap kerawanan pangan di tiap kabupaten berbeda-beda, maka pendekatan-pendekatan khusus untuk mengurangi kerentanan juga akan berbeda-beda pada setiap kabupaten. Dengan menentukan indikator utama kerentanan pangan di tingkat kabupaten, maka peta

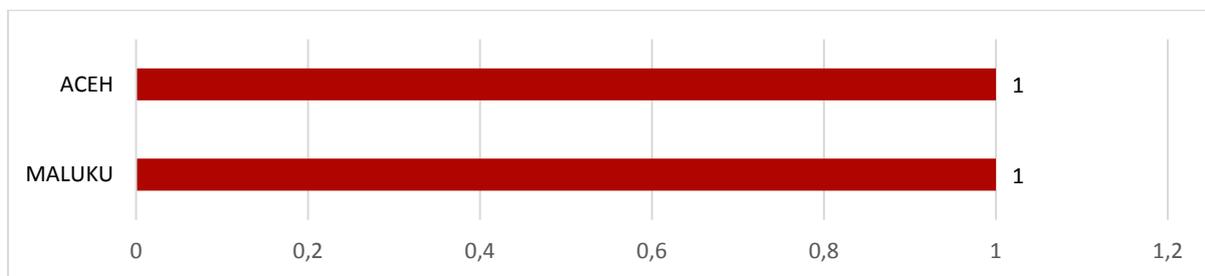
ini dapat memberikan petunjuk yang lebih baik kepada para pengambil kebijakan untuk meningkatkan efektifitas dan penentuan program ketahanan pangan.

Analisis Perkotaan pada Atlas 2018

Berdasarkan analisis komposit ketahanan pangan, 98 kota dikelompokkan kedalam enam kelompok prioritas sebagai berikut: 2 kota pada Prioritas 1 (2%), 2 kota pada Prioritas 2 (2%), 3 kota pada Prioritas 3 (3%), 9 kota pada Prioritas 4 (9%), 32 kota pada Prioritas 5 (33%) dan 50 kota pada Prioritas 6 (51%). Total kota Prioritas 1-3 (paling rentan terhadap kerawanan pangan) berjumlah 7 kota, sedangkan kota prioritas 4-6 (paling tahan terhadap kerawanan pangan) berjumlah 91 kota.

Kota pada Prioritas 1 berada di Kota Subulussalam di Provinsi Aceh dan Kota Tual di Maluku (Gambar 7.4). Dua kota tersebut dikategorikan daerah rentan pangan disebabkan oleh persentase balita *stunting* yang tinggi dan pangsa pengeluaran pangan yang tinggi.

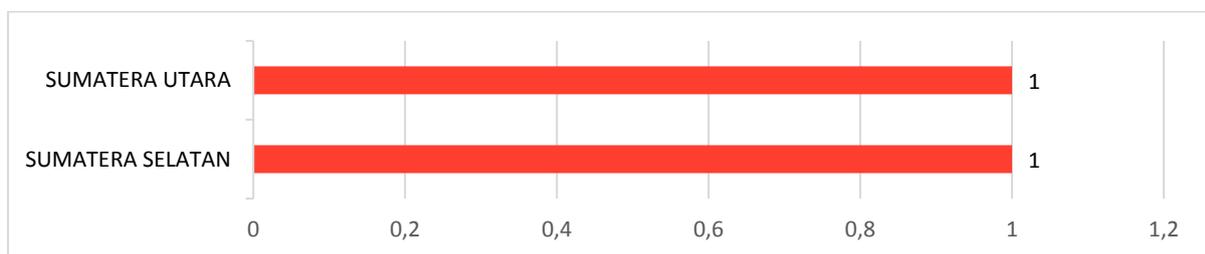
Gambar 7.4 Jumlah Kota Rentan di Prioritas 1 per Provinsi



Sumber: Hasil analisis, 2018

Kota pada Prioritas 2 tersebar di Provinsi Sumatera Utara satu kota yaitu Kota Gunung Sitoli dan satu kota di Sumatera Selatan yaitu Kota Pagar Alam (Gambar 7.5). Dua kota tersebut masuk dalam kategori rentan pangan prioritas 2 karena memiliki persentase balita *stunting* yang tinggi, pangsa pengeluaran pangan tinggi, dan rendahnya akses terhadap air bersih.

Gambar 7.5 Jumlah Kota Rentan di Prioritas 2 per Provinsi

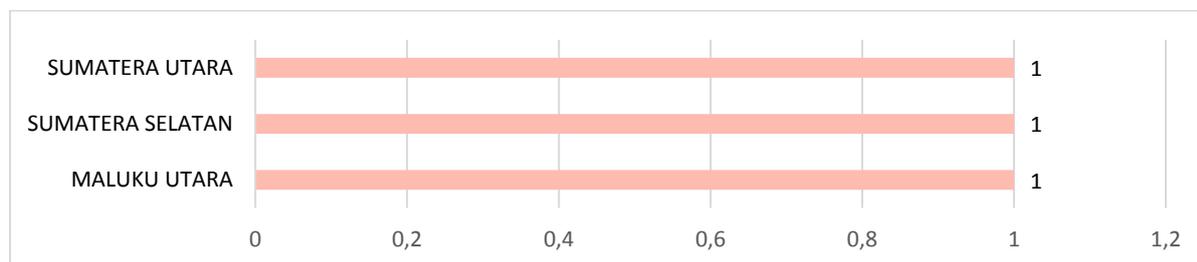


Sumber: Hasil analisis, 2018

Kota pada Prioritas 3 tersebar di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Maluku Utara masing-masing satu kota (Gambar 7.6). Adapun kota rentan pangan Prioritas 3 tersebut adalah Kota Tanjung Balai di Sumatera Utara, Lubuk Linggau di Sumatera Selatan, dan Tidore Kepulauan di Maluku Utara.

Kota-kota tersebut masuk dalam kategori rentan pangan prioritas 3 karena memiliki rumah tangga dengan pangsa pengeluaran pangan yang tinggi dan akses terhadap air bersih yang rendah.

Gambar 7.6 Jumlah Kota Rentan di Prioritas 3 per Provinsi



Sumber: Hasil analisis, 2018

Tabel 7.4 menunjukkan sebaran prioritas wilayah perkotaan di setiap provinsi. Secara umum, wilayah perkotaan memiliki tingkat ketahanan yang baik. Hanya dua kota yang masuk kategori Prioritas 1. Provinsi yang memiliki wilayah perkotaan dengan tingkat kerentanan pangan tinggi (Prioritas 1), yaitu Maluku dan Aceh.

Tabel 7.4 Sebaran Prioritas Kota di Setiap Provinsi (Persentase)

Provinsi	Prioritas						Total
	1	2	3	4	5	6	
Aceh	20%	0%	0%	20%	40%	20%	100%
Sumatera Utara	0%	13%	13%	25%	25%	25%	100%
Sumatera Barat	0%	0%	0%	0%	29%	71%	100%
Riau	0%	0%	0%	0%	50%	50%	100%
Jambi	0%	0%	0%	0%	50%	50%	100%
Sumatera Selatan	0%	25%	25%	25%	0%	25%	100%
Bengkulu	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%
Lampung	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%
Kep. Bangka Belitung	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Kepulauan Riau	0%	0%	0%	0%	50%	50%	100%
DKI Jakarta	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Jawa Barat	0%	0%	0%	11%	22%	67%	100%
Jawa Tengah	0%	0%	0%	0%	33%	67%	100%
DI Yogyakarta	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Jawa Timur	0%	0%	0%	0%	56%	44%	100%
Banten	0%	0%	0%	25%	25%	50%	100%
Bali	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Nusa Tenggara Barat	0%	0%	0%	50%	50%	0%	100%
Nusa Tenggara Timur	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%
Kalimantan Barat	0%	0%	0%	50%	50%	0%	100%
Kalimantan Tengah	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Kalimantan Selatan	0%	0%	0%	0%	50%	50%	100%

Provinsi	Prioritas						Total
	1	2	3	4	5	6	
Kalimantan Timur	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Kalimantan Utara	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Sulawesi Utara	0%	0%	0%	0%	50%	50%	100%
Sulawesi Tengah	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Sulawesi Selatan	0%	0%	0%	0%	33%	67%	100%
Sulawesi Tenggara	0%	0%	0%	0%	50%	50%	100%
Gorontalo	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Maluku	50%	0%	0%	0%	50%	0%	100%
Maluku Utara	0%	0%	50%	0%	0%	50%	100%
Papua Barat	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100%
Papua	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%
Total	2%	2%	3%	9%	33%	51%	100%

Sumber: Hasil analisis, 2018

Indikator yang menyebabkan tingginya kerentanan terhadap kerawanan pangan secara umum di 98 kota di Indonesia adalah: i) Tingginya prevalensi balita stunting, ii) Tingginya rumah tangga dengan pangsa pengeluaran pangan >65% terhadap total pengeluaran, iii) Tingginya rumah tangga tanpa akses air bersih, iv) Tingginya angka kemiskinan, dan v) Rendahnya angka harapan hidup.

Secara khusus, kota-kota di Prioritas 1 – 3 diindikasikan oleh: i) Tingginya rumah tangga dengan pangsa pengeluaran pangan >65% terhadap total pengeluaran, ii) Tingginya rumah tangga tanpa akses ke air bersih, iii) Tingginya angka balita stunting, iv) Tingginya penduduk miskin, dan v) Rendahnya angka harapan hidup. Kota-kota yang rentan rawan pangan memiliki rata-rata pengeluaran pangan >65% masih tinggi, yaitu sebesar 56%; rata-rata 42,45% penduduknya memiliki akses yang terbatas terhadap infrastruktur dasar air bersih; rata-rata *stunting* pada balita sebesar 29%; rata-rata angka kemiskinan yang tinggi, yaitu sebesar 15%, serta rata-rata angka harapan hidup sebesar 66,29 tahun, lebih rendah dari angka harapan hidup kota-kota di Prioritas 4 – 6 (Tabel 7.5).

Tabel 7.5 Nilai Rata-rata Kelompok Kota Prioritas Rentan dan Prioritas Tahan

Indikator	Prioritas Rentan (1 – 3)	Prioritas Tahan (4 – 6)
Angka kemiskinan	15,33	6,91
Pengeluaran pangan >65%	55,72	46,44
Terbatasnya akses ke listrik	1,62	0,16
Terbatasnya akses ke air bersih	42,45	16,88
Angka harapan hidup	66,29	71,92
Rasio penduduk per tenaga kesehatan	0,69	0,17
Lama sekolah perempuan >15 tahun	9,18	10,14
Stunting pada balita	29,46	26,54

Sumber: Hasil analisis, 2018

Upaya-upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan dan pengurangan kerawanan pangan harus ditekankan pada penyelesaian akar utama penyebab kerentanan terhadap kerawanan pangan. Dengan

menentukan indikator utama dari kerentanan terhadap kerawanan pangan di tingkat kota, maka peta ini dapat memberikan petunjuk yang lebih baik kepada para pengambil kebijakan untuk meningkatkan efektifitas dan penentuan program ketahanan pangan.

7.2. Perubahan Tingkat Kerentanan terhadap Ketahanan Pangan Kronis Tahun 2015-2018

Perubahan tingkat kerentanan terhadap kerawanan pangan dilakukan dengan membandingkan secara langsung kondisi ketahanan pangan tahun 2015 dan 2018 pada 398 kabupaten, sementara wilayah perkotaan tidak dibandingkan karena pada FSVA 2015 wilayah perkotaan belum dianalisis.

Analisis perubahan tingkat ketahanan pangan dibagi menjadi lima katagori:

1. Warna hijau tua menunjukkan peningkatan prioritas sebanyak dua tingkat atau lebih, misalnya dari prioritas 3 menjadi 5.
2. Warna hijau muda menunjukkan peningkatan prioritas sebanyak satu tingkat, misalnya dari prioritas 3 menjadi 4.
3. Warna kuning menunjukkan tidak adanya perubahan prioritas misalnya dari prioritas 3 tetap di prioritas 3.
4. Warna merah muda menunjukkan penurunan sebanyak satu tingkat, misalnya dari prioritas 3 menjadi 2.
5. Warna merah tua menunjukkan penurunan prioritas sebanyak dua tingkat atau lebih, misalnya dari prioritas 3 menjadi 1.

Berdasarkan hasil analisis indikator komposit 2018, sebanyak 69 kabupaten (17%) telah berhasil mengalami peningkatan status ketahanan pangan sebanyak dua tingkat atau lebih. Provinsi yang mengalami perbaikan status ketahanan paling tinggi berturut-turut di provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Selatan. 108 kabupaten (27%) yang menunjukkan perbaikan satu tingkat, yang sebagian besar tersebar di Provinsi Bengkulu, Gorontalo, Sumatera Selatan. Sementara, 153 kabupaten (38%) tidak mengalami perubahan pada status ketahanan pangan wilayahnya. Namun demikian, masih terdapat 45 kabupaten (11%) mengalami penurunan status sebanyak satu tingkat dan 23 kabupaten (6%) mengalami penurunan dua tingkat atau lebih yang sebagian besar berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Riau dan Sulawesi Utara (Tabel 7.6). Penurunan status pada daerah-daerah tersebut secara umum disebabkan oleh penurunan akses rumah tangga terhadap air bersih; penurunan angka harapan hidup; dan konsumsi normatif dibandingkan ketersediaan pangan hasil produksi wilayah. Faktor lain adalah perbaikan kondisi atau faktor penyebab kerentanan pangan daerah tersebut lebih rendah jika di bandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain. Hal ini menyebabkan secara agregat nilai indeks ketahanan pangannya relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan kabupaten diseluruh Indonesia.

Secara khusus, pada kabupaten-kabupaten kelompok rentan (Prioritas 1–3) yang berjumlah 110 kabupaten pada FSVA 2015, terdapat 75 kabupaten (68%) yang mengalami peningkatan sebanyak satu tingkat atau lebih, sedangkan 23 kabupaten tidak mengalami perubahan status ketahanan pangan wilayah. Kabupaten-kabupaten kelompok tahan Prioritas 4–6 yang berjumlah 288 kabupaten, terdapat 102 kabupaten (35%) mengalami peningkatan sebanyak satu tingkat atau lebih.

Tabel 7.6 Perubahan Tingkat Prioritas Kabupaten per Provinsi 2015 – 2018 (Persentase)

Provinsi	Penurunan Prioritas 2 tingkat atau lebih	Penurunan Prioritas 1 tingkat	Tidak ada perubahan	Peningkatan Prioritas 1 tingkat	Peningkatan Prioritas 2 tingkat atau lebih
Aceh	6%	33%	39%	6%	17%
Sumatera Utara	4%	4%	44%	32%	16%
Sumatera Barat	0%	0%	50%	25%	25%
Riau	50%	30%	20%	0%	0%
Jambi	0%	22%	0%	56%	22%
Sumatera Selatan	0%	0%	9%	73%	18%
Bengkulu	0%	0%	11%	89%	0%
Lampung	0%	0%	25%	42%	33%
Kep. Bangka Belitung	100%	0%	0%	0%	0%
Kepulauan Riau	100%	0%	0%	0%	0%
Jawa Barat	6%	0%	47%	24%	24%
Jawa Tengah	0%	17%	69%	14%	0%
DI Yogyakarta	0%	0%	100%	0%	0%
Jawa Timur	0%	7%	55%	10%	28%
Banten	0%	0%	0%	25%	75%
Bali	0%	0%	100%	0%	0%
Nusa Tenggara Barat	0%	0%	0%	25%	75%
Nusa Tenggara Timur	0%	30%	15%	40%	15%
Kalimantan Barat	0%	0%	42%	33%	25%
Kalimantan Tengah	0%	8%	23%	31%	38%
Kalimantan Selatan	0%	0%	9%	18%	73%
Kalimantan Timur	0%	50%	50%	0%	0%
Kalimantan Utara	0%	25%	75%	0%	0%
Sulawesi Utara	27%	18%	36%	18%	0%
Sulawesi Tengah	0%	10%	10%	40%	40%
Sulawesi Selatan	0%	0%	76%	19%	5%
Sulawesi Tenggara	0%	20%	30%	50%	0%
Gorontalo	0%	0%	20%	80%	0%
Sulawesi Barat	0%	0%	20%	60%	20%
Maluku	0%	22%	11%	56%	11%
Maluku Utara	0%	14%	0%	71%	14%
Papua Barat	10%	40%	20%	20%	10%
Papua	0%	11%	68%	14%	7%
Total	6%	11%	38%	27%	17%

Sumber: Hasil analisis, 2018

Ket.: Data tahun 2015 berdasarkan data jumlah kabupaten pada tahun 2015 (398 kabupaten). Analisis dilakukan dengan menggunakan perbandingan langsung prioritas untuk data tahun 2015 dan 2018.

Selama periode 2015-2018, terdapat 15 kabupaten yang mengalami pemekaran (kabupaten induk) menjadi 18 kabupaten baru hasil pemekaran, sedangkan kabupaten yang tidak mengalami pemekaran

sebanyak 383 kabupaten. Sehingga total kabupaten yang dianalisis sebanyak 416 kabupaten, yang terdiri atas 15 kabupaten induk, 18 kabupaten baru, dan 383 kabupaten lama. Di antara 383 kabupaten yang tidak mengalami pemekaran, proporsi kabupaten yang berada pada kategori kelompok prioritas rentan (Prioritas 1-3) menurun dari 27% pada tahun 2015 menjadi 18% pada tahun 2018; sedangkan untuk kategori tahan pangan pada Prioritas 4 – 6, mengalami perbaikan dari 73% menjadi 82% dari jumlah kabupaten yang tidak mengalami pemekaran (Tabel 7.7).

Tabel 7.7 Jumlah dan Persentase dari Kabupaten Tanpa Pemekaran dalam Kelompok-kelompok Prioritas

Prioritas	Kab Tanpa Pemekaran		Kab Tanpa Pemekaran (%)	
	2015	2018	2015	2018
1	14	25	4%	7%
2	42	16	11%	4%
3	49	29	13%	8%
4	81	41	21%	11%
5	79	129	21%	34%
6	118	143	31%	37%
Total kabupaten	383	383	100%	100%

Sumber: Hasil analisis, 2018

DAFTAR PUSTAKA

[DKP dan WFP] Dewan Ketahanan Pangan dan World Food Programme. 2015. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia 2015. Jakarta (ID): Dewan Ketahanan Pangan dan World Food Programme.

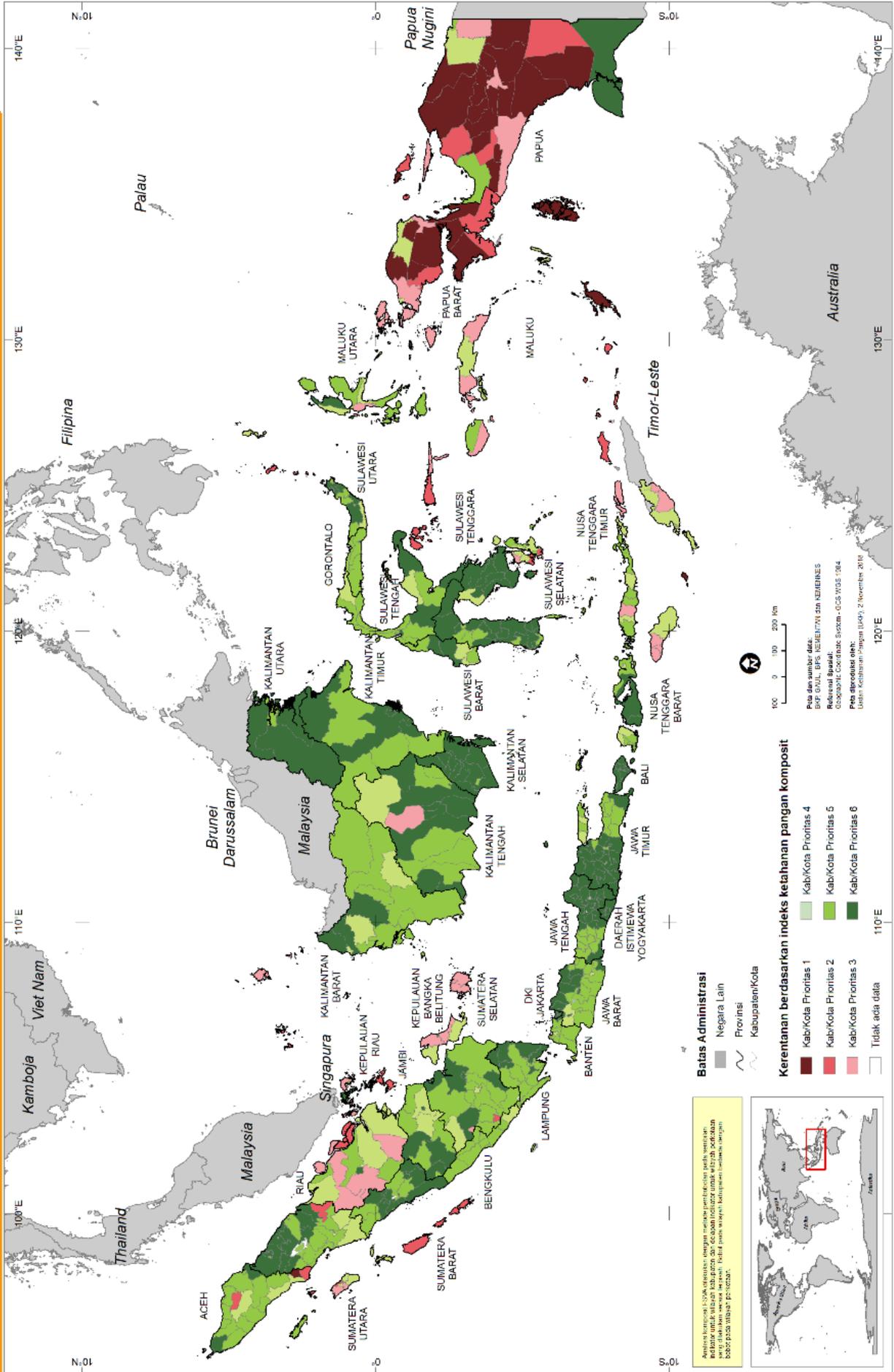
[EIU] The Economist Intelligence Unit. 2017. Global Food Security Index 2017, Measuring Food Security and The Impact of Resources Risks. Dupont (GB): London.

[EIU] The Economist Intelligence Unit. 2016. Global Food Security Index 2016 an Annual Measure of The State of Global Food Security. Dupont (GB): London.

Goodridge P. 2007. Method explained index number, economic and labour. *Market Review*. 1 (3): 54-57.



Peta 7.1: Peta ketahanan dan kerentanan pangan 2018



BAB 8

KEBIJAKAN STRATEGIS PANGAN DAN GIZI

8.1. Strategi untuk Ketahanan Pangan Berkelanjutan

Daerah yang saat ini tahan pangan tidak dijamin selamanya berada dalam kondisi tahan pangan jika tidak ada strategi dan upaya yang dilakukan oleh pengambil kebijakan yang didukung oleh masyarakat dan sektor swasta secara berkelanjutan. Keterlibatan lintas sektor dalam pembangunan pangan dan gizi mutlak diperlukan karena dimensi dan ragam persoalan yang dihadapinya sangat kompleks, guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Sebagai dasar penyusunan kebijakan/program secara berjenjang Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (KSPG). KSPG terdiri atas kebijakan strategis di bidang: (a) ketersediaan pangan; (b) keterjangkauan pangan; (c) pemanfaatan pangan; (d) perbaikan gizi masyarakat; dan (e) penguatan kelembagaan pangan dan gizi. Kebijakan strategis masing-masing bidang dapat dilihat pada Tabel 8.1.

Tabel 8.1 Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi

Bidang	Kebijakan Strategis
1. Ketersediaan pangan	<ul style="list-style-type: none">a. Peningkatan produksi pangan dalam negerib. Penguatan cadangan pangan nasionalc. Penguatan perdagangan pangand. Penyediaan pangan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
2. Keterjangkauan pangan	<ul style="list-style-type: none">a. Efisiensi pemasaran panganb. Penguatan sistem logistik panganc. Stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok dan pangan lainnyad. Pemberdayaan masyarakat di bidang pangan dan gizie. Penanganan kerawanan pangan dan gizif. Penyediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin dan masyarakat yang mengalami rawan pangan dan gizi
3. Pemanfaatan pangan	<ul style="list-style-type: none">a. Pengembangan pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan amanb. Pengembangan jejaring dan informasi pangan dan gizic. Peningkatan pengawasan keamanan pangan.
4. Perbaikan gizi masyarakat	<ul style="list-style-type: none">a. Perbaikan pola konsumsi pangan perseorangan dan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang, dan amanb. Perbaikan atau pengayaan gizi pangan tertentuc. Penguatan pelaksanaan dan pengawasan regulasi dan standar gizid. Penetapan persyaratan khusus mengenai komposisi pangan untuk meningkatkan kandungan gizi pangan olahan tertentu yang diperdagangkane. Perbaikan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, remaja, dan kelompok rawan gizi lainnyaf. Penguatan sistem surveilan pangan dan gizig. Penguatan program gizi lintas sektor melalui program sensitif gizi

Bidang	Kebijakan Strategis
5. Penguatan kelembagaan pangan dan gizi	a. Penguatan kelembagaan pangan dan gizi tingkat nasional yang telah ada b. Penguatan peran kelembagaan pangan dan gizi daerah provinsi dan kabupaten/kota yang telah ada c. Penguatan fungsi Dewan Ketahanan Pangan, dan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah ada d. Pengembangan kemitraan antar berbagai Pemangku Kepentingan dalam pembangunan pangan dan gizi berkelanjutan

Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi selanjutnya dioperasionalkan melalui Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG). Provinsi dan kabupaten/kota menindaklanjutinya dengan menyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) yang lebih operasional sesuai dengan potensi dan target yang akan dicapai.

RAN-PG tersebut terdiri atas 5 pilar, meliputi: (a) Perbaikan gizi masyarakat; (b) Peningkatan aksesibilitas pangan yang beragam; (c) Mutu dan keamanan pangan; (d) Perilaku hidup bersih dan sehat; dan (e) Koordinasi pembangunan pangan dan gizi. Program/kegiatan pada masing-masing pilar disajikan pada Tabel 8.2.

Tabel 8.2 Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi

Pilar	Program/Kegiatan
1. Perbaikan Gizi Masyarakat	a. Promosi dan pendidikan gizi masyarakat b. Pemberian suplementasi gizi c. Pelayanan kesehatan dan masalah gizi d. Pemberdayaan masyarakat di bidang pangan dan gizi e. Jaminan sosial yang mendukung perbaikan pangan dan gizi f. Pendidikan anak usia dini.
2. Peningkatan Aksesibilitas Pangan yang beragam	a. Produksi pangan dalam negeri b. Penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal c. Distribusi pangan d. Konsumsi kalori, karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral e. Peningkatan akses pangan bagi masyarakat miskin dan masyarakat yang mengalami rawan pangan dan gizi.
3. Mutu dan Keamanan Pangan	a. Pengawasan regulasi dan standar gizi b. Pengawasan keamanan pangan segar c. Pengawasan keamanan pangan olahan d. Pengawasan pangan sarana air minum dan tempat-tempat umum e. Promosi keamanan pangan
4. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	a. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular b. Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular c. Penyediaan air bersih dan sanitasi d. Penerapan kawasan tanpa rokok e. Penerapan perilaku sehat
6. Koordinasi Pembangunan Pangan dan Gizi	a. Perencanaan pangan dan gizi b. Penguatan peranan lintas sektor c. Penguatan pencatatan sipil dalam perbaikan gizi d. Pelibatan pemangku kepentingan e. Pemantauan dan evaluasi f. Penyusunan dan penyampaian laporan

8.2. Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor

Menurunkan tingkat kerentanan pangan dan gizi merupakan tantangan yang besar bagi pihak perencana dan pengambil kebijakan karena masalah kerentanan pangan dan gizi merupakan permasalahan multi-efek, tidak hanya masalah satu sektor, tetapi meliputi aspek dari hulu hingga hilir. Demikian pula dengan dukungan berbagai program pembangunan ketahanan pangan dan gizi dari pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah, swasta dan seluruh komponen masyarakat perlu disinergikan sehingga ketahanan pangan secara berkelanjutan dapat terwujud.

Kerjasama lintas program merupakan keterpaduan beberapa program yang dilakukan pada satu wilayah administrasi (desa). Kerjasama lintas program dapat meningkatkan efisiensi anggaran dan tenaga kerja serta mempercepat pencapaian tujuan akhir yang ingin dicapai.

Kerjasama lintas sektor diartikan sebagai usaha bersama beberapa pihak seperti Kementerian/Dinas bahkan perguruan tinggi dan masyarakat yang dilandasi oleh pemahaman yang sama bahwa ketahanan pangan dan gizi bersifat multi dimensi. Untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi mensyaratkan kerjasama tersebut, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Komitmen menjadi kata kunci keberhasilan kerjasama lintas sektor.

Forum Dewan Ketahanan Pangan (DKP) harus dioptimalkan untuk akselerasi program yang melibatkan lintas sektor. Berdasarkan Perpres 83/2006, DKP diberikan tugas untuk memberikan masukan, terutama hal-hal yang bersifat strategis kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan tingkatannya masing-masing untuk membangun ketahanan pangan dan gizi. Setiap saran dan program yang disampaikan kepada Ketua DKP mestinya bersifat terobosan sekaligus mampu menawarkan perubahan yang konstruktif serta fokus pada lokus dan target pencapaian yang telah ditetapkan.

Forum DKP harus mampu dimanfaatkan untuk memperkuat kerjasama lintas program dan sektor serta memberikan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai detail setiap program yang akan dilaksanakan. Dengan demikian dukungan akan diperoleh dari masyarakat sebagai pelaksana utama setiap program. Optimalisasi peran Dewan Ketahanan Pangan sangat diperlukan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dan antar wilayah.

Gambar 8.1 Koordinasi Lintas Sektor dalam Penanganan Kerentanan Pangan



BAB 9

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Penyebab terjadinya kondisi rentan rawan pangan di setiap wilayah tentu berbeda-beda, maka intervensi program untuk mencegah dan mengatasinya pun idealnya spesifik lokasi. Namun demikian, pendekatan penanganan kerentanan pangan secara umum dapat dibedakan antara wilayah kabupaten dan perkotaan. Terdapat beberapa perbedaan karakteristik antara kabupaten dan kota diantaranya: i) Luas wilayah kabupaten relatif lebih luas; ii) Kepadatan penduduk kota lebih tinggi; iii) Mata pencaharian penduduk kabupaten pada umumnya bergerak di sektor agraris, sedangkan penduduk kota di perdagangan dan jasa; iv) Tingkat pendidikan dan kesehatan penduduk kota relatif lebih baik; dan v) Rata-rata Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di kabupaten relatif lebih rendah dibandingkan kota, hal ini berimplikasi pada pendapatan asli daerah PAD. Perbedaan tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan penanganan kerentanan pangan, dengan tetap memperhatikan kesamaan faktor yang menjadi penyebab kerentanan pangan di wilayah masing-masing.

9.1. Wilayah Kabupaten

Fokus lokasi penanganan kerentanan pangan di wilayah kabupaten diprioritaskan pada:

- a. Kabupaten-kabupaten yang terletak di Kawasan Indonesia Timur yang memiliki daerah prioritas 1-3 terbesar
- b. Kabupaten-kabupaten yang lokasinya jauh dari ibu kota provinsi atau di wilayah yang berbatasan dengan provinsi/negara lain yang memiliki tingkat ketahanan pangan lebih rendah dibandingkan kabupaten lain.
- c. Kabupaten-kabupaten di Kepulauan yang menghadapi kendala akses fisik terhadap sumber pangan.
- d. Kabupaten-kabupaten pemekaran yang fasilitas, infrastruktur dan kapasitas SDMnya masih terbatas.

Upaya-upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan ditekankan pada penyebab utama kerentanan pangan di kabupaten seperti digambarkan pada diagram di bawah ini.

Gambar 9.1 Kerangka Intervensi untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan



Program-program peningkatan ketahanan pangan dan penanganan kerentanan pangan wilayah kabupaten diarahkan pada kegiatan:

- a. Peningkatan penyediaan pangan di daerah non sentra produksi dengan mengoptimalkan sumberdaya pangan lokal.
- b. Penanganan stunting diantaranya melalui sosialisasi dan penyuluhan tentang gizi dan pola asuh anak; penyediaan fasilitas dan layanan air bersih.
- c. Penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan; pembangunan infrastruktur dasar (jalan, listrik, rumah sakit), dan pemberian bantuan sosial; serta pembangunan usaha produktif/UMKM/padat karya untuk menggerakkan ekonomi wilayah.
- d. Peningkatan akses air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih; sosialisasi dan penyuluhan.
- e. Penurunan pangsa pengeluaran pangan melalui sosialisasi pola konsumsi pangan (B2SA) serta peningkatan kesempatan kerja.
- f. Peningkatan pendapatan peningkatan pendidikan perempuan.
- g. Penyediaan tenaga kesehatan.

Tabel 9.1 Contoh Intervensi Penanganan Kerentanan Pangan Wilayah Kabupaten

Indikator	Penyebab	Intervensi
Rasio Konsumsi Normatif terhadap produksi	<ul style="list-style-type: none"> Sebaran produksi tidak merata Keterbatasan akses 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan produksi Optimalisasi sumberdaya pangan lokal Penganekaragaman konsumsi pangan
Penduduk Miskin	<ul style="list-style-type: none"> Keterbatasan lapangan kerja Kepemilikan Aset Infrastruktur Keterbatasan akses finansial 	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan lapangan kerja, padat karya; Redistribusi lahan; Pembangunan infrastruktur dasar (jalan, listrik, rumah sakit); Pemberian bantuan sosial
Prevalensi Stunting	<ul style="list-style-type: none"> Pola asuh anak Tingkat pendidikan ibu relatif rendah 	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi dan penyuluhan tentang gizi dan pola asuh anak Penyediaan fasilitas pendidikan formal dan non formal (kejar paket dan kursus)

9.2. Wilayah Perkotaan

Fokus lokasi penanganan kerentanan pangan di wilayah perkotaan diprioritaskan pada:

- Kota-kota yang memiliki keterbatasan akses terhadap pangan terutama dalam hal stabilisasi pasokan dan daya beli masyarakat.
- Kota-kota yang memiliki keterbatasan dalam pemanfaatan pangan dikarenakan oleh pemahaman/pengetahuan yang terbatas ataupun karena buruknya sanitasi.

Upaya-upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan ditekankan pada penyebab utama kerentanan pangan di perkotaan seperti digambarkan pada diagram di bawah ini.

Gambar 9.2 Kerangka Intervensi untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan



Program-program penanganan kerentanan pangan di daerah perkotaan diarahkan pada kegiatan:

- a. Peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat untuk meningkatkan daya beli masyarakat.
- b. Sosialisasi pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman.
- c. Peningkatan akses rumah tangga terhadap air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih.
- d. Peningkatan sanitasi lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat melalui sosialisasi dan penyuluhan.
- e. Penanganan balita stunting melalui intervensi program gizi baik yang bersifat spesifik maupun sensitif. Intervensi spesifik dilakukan untuk mendukung kesehatan anak pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) diantaranya adalah melalui pemberian vitamin yang dilengkapi zat besi, yodium, asam folat untuk ibu hamil; mendukung pemberian ASI eksklusif bayi usia 0-6 bulan; dan pemberian MP ASI UNTUK anak usia 7-23 bulan. Intervensi gizi sensitif yang diarahkan untuk penyediaan bahan pangan yang cukup dan beragam, akses air bersih, sanitasi, fortifikasi bahan pangan, akses layanan kesehatan, jaminan kesehatan, pendidikan gizi, jaring pengaman sosial, dan meningkatkan pendapatan keluarga.

Tabel 9.2 Contoh Intervensi Penanganan Kerentanan Pangan Wilayah Kota

Indikator	Penyebab	Intervensi
Proporsi pengeluaran pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya tingkat pendapatan • Tingkat Pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kesempatan kerja • Sosialisasi pola konsumsi pangan (B2SA)
Akses terhadap Air Bersih	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya infrastruktur air bersih • Rendahnya sanitasi lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan fasilitas dan layanan air bersih • Sosialisasi dan penyuluhan
Prevalensi Stunting	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya akses terhadap air bersih • Pola asuh anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan fasilitas dan layanan air bersih • Sosialisasi dan penyuluhan tentang gizi dan pola asuh anak

Lampiran I. Data Indikator Individu dan Prioritas Ketahanan Pangan Komposit Wilayah Kabupaten

No.	Kabupaten	NCPR	Pov	Food	Elec	Water	Life	Health	School	Stunting	Prioritas
Aceh											
1	Simeulue	0.67	20.20	55.69	1.42	30.36	64.90	2.12	8.98	35.70	5
2	Aceh Singkil	4.31	22.11	40.27	1.07	42.45	67.07	3.05	8.04	38.70	2
3	Aceh Selatan	0.69	14.07	69.08	0.50	53.23	63.89	5.49	8.41	44.90	4
4	Aceh Tenggara	0.33	14.86	58.78	2.02	56.35	67.62	4.86	9.63	38.20	5
5	Aceh Timur	0.51	15.25	47.94	0.60	50.06	68.33	3.68	8.23	43.60	5
6	Aceh Tengah	1.79	16.84	42.96	0.00	53.57	68.53	3.85	9.85	37.20	4
7	Aceh Barat	0.42	20.28	42.10	2.29	33.76	67.62	2.32	9.38	33.20	5
8	Aceh Besar	0.55	15.41	54.60	0.82	26.99	69.52	1.78	9.64	31.20	6
9	Pidie	0.50	21.43	64.65	1.96	52.11	66.58	1.18	8.87	43.70	5
10	Bireuen	0.64	15.87	47.40	1.10	48.25	70.80	0.71	9.18	34.40	5
11	Aceh Utara	0.52	19.78	68.89	2.10	50.32	68.54	1.59	8.31	35.90	5
12	Aceh Barat Daya	0.59	18.31	51.54	0.95	45.10	64.51	1.95	8.92	31.60	5
13	Gayo Lues	0.40	21.97	49.88	0.70	43.78	64.98	7.99	7.99	38.50	5
14	Aceh Tamiang	0.53	14.69	35.35	0.28	23.93	69.16	2.83	9.02	32.40	6
15	Nagan Raya	0.33	19.34	52.24	0.49	56.79	68.76	4.87	8.47	26.20	5
16	Aceh Jaya	0.25	14.85	52.83	0.00	42.31	66.77	7.44	8.42	38.30	5
17	Bener Meriah	5.00	21.14	54.93	0.84	47.16	68.90	2.25	9.67	37.60	2
18	Pidie Jaya	0.51	21.82	61.14	0.28	46.06	69.68	1.21	9.03	34.60	5
Sumatera Utara											
19	Nias	0.80	18.11	60.16	32.17	59.99	69.18	1.80	5.08	41.60	4
20	Mandailing Natal	0.47	11.02	61.46	7.47	63.39	61.97	17.06	8.36	39.70	4
21	Tapanuli Selatan	0.42	10.60	63.53	5.28	63.86	64.28	8.43	9.02	32.40	5
22	Tapanuli Tengah	0.59	14.66	50.77	4.10	59.24	66.66	2.52	8.54	28.20	5
23	Tapanuli Utara	0.38	11.35	70.97	3.86	51.03	67.86	2.60	9.40	24.20	5
24	Toba Samosir	0.28	10.19	57.74	4.41	47.51	69.36	2.48	9.62	36.20	6
25	Labuhan Batu	0.84	8.89	41.91	2.51	37.50	69.44	2.27	9.21	33.10	6
26	Asahan	1.55	11.67	44.80	1.06	25.03	67.57	2.77	8.78	24.60	5
27	Simalungun	0.20	10.65	51.34	0.31	41.73	70.53	1.86	9.02	36.70	6
28	Dairi	0.35	8.87	60.18	2.01	54.06	68.13	2.33	9.17	29.60	6
29	Karo	0.33	9.97	62.56	0.73	41.69	70.77	2.18	9.68	30.80	6
30	Deli Serdang	0.90	4.62	40.27	0.53	20.36	71.11	0.60	9.75	33.30	6
31	Langkat	0.61	11.15	42.84	0.32	39.45	67.94	2.05	8.79	26.20	6
32	Nias Selatan	0.57	18.48	48.72	34.76	77.31	68.00	1.97	5.96	39.20	4
33	Humbang Hasundutan	0.44	9.85	54.47	1.45	53.10	68.41	6.95	9.25	41.50	5
34	Pakpak Barat	0.62	10.53	66.15	2.85	59.22	65.05	3.94	8.35	28.30	5
35	Samosir	0.70	14.72	59.10	1.15	51.00	70.68	4.22	8.62	33.10	5
36	Serdang Bedagai	0.20	9.30	62.95	0.32	37.86	67.79	1.45	8.44	31.60	6
37	Batu Bara	0.62	12.48	42.11	0.27	31.36	66.10	1.46	8.17	20.10	6
38	Padang Lawas Utara	0.41	10.70	57.94	6.71	54.77	66.58	5.65	8.77	32.20	5
39	Padang Lawas	1.07	9.10	70.20	7.05	66.89	66.50	4.86	8.57	40.50	4

No.	Kabupaten	NCPR	Pov	Food	Elec	Water	Life	Health	School	Stunting	Prioritas
40	Labuhan Batu Selatan	5.00	11.63	46.97	1.57	34.60	68.14	4.41	8.73	25.90	2
41	Labuhan Batu Utara	0.51	11.28	51.25	1.43	44.07	68.91	3.43	8.46	23.60	6
42	Nias Utara	1.48	29.06	51.90	30.30	54.14	68.77	3.20	6.09	41.60	3
43	Nias Barat	1.39	27.23	57.04	20.23	58.66	68.28	1.34	5.77	45.50	3
Sumatera Barat											
44	Kepulauan Mentawai	3.30	14.67	68.40	27.40	58.00	64.37	9.43	7.33	25.70	2
45	Pesisir Selatan	0.40	7.79	45.39	1.47	35.45	70.25	6.61	8.35	27.50	6
46	Solok	0.29	9.06	54.54	4.69	48.05	67.65	3.98	8.16	39.90	5
47	Sawah Lunto/Sijunjung	0.72	7.35	58.36	2.15	41.46	65.44	5.69	8.20	38.70	5
48	Tanah Datar	0.33	5.56	47.33	1.50	40.16	69.11	2.04	8.61	33.00	6
49	Padang Pariaman	0.40	8.46	43.37	1.66	48.73	67.96	1.48	7.65	33.60	6
50	Agam	0.30	7.59	43.73	2.08	42.24	71.57	2.93	8.94	31.30	6
51	Limapuluh Koto	0.36	7.15	63.56	3.58	42.59	69.31	4.53	8.14	27.00	6
52	Pasaman	0.37	7.41	60.99	3.49	47.77	66.54	6.69	7.68	40.60	5
53	Solok Selatan	0.32	7.21	49.82	2.31	46.14	66.92	4.28	8.37	36.20	6
54	Dharmas Raya	1.03	6.68	59.65	0.00	37.66	70.44	5.64	8.16	27.00	6
55	Pasaman Barat	0.55	7.26	53.13	1.47	49.45	67.15	4.07	8.04	32.10	5
Riau											
56	Kuantan Sengingi	1.68	9.97	56.72	0.54	35.41	67.99	4.30	8.07	27.50	5
57	Indragiri Hulu	5.00	6.94	29.07	3.44	30.32	69.83	5.87	8.16	33.70	3
58	Indragiri Hilir	1.91	7.70	46.91	14.73	43.89	67.07	8.12	7.44	34.30	4
59	Pelalawan	2.99	10.25	34.55	5.35	22.18	70.54	9.95	7.98	22.30	4
60	Siak	2.79	5.80	53.97	0.79	12.70	70.64	8.84	9.50	23.00	5
61	Kampar	5.00	8.02	40.53	0.27	38.37	70.16	6.43	8.88	27.00	3
62	Rokan Hulu	3.65	10.91	34.61	2.52	44.13	69.31	6.53	8.67	37.20	3
63	Bengkalis	4.72	6.85	27.20	2.29	25.82	70.69	6.00	9.04	26.50	3
64	Rokan Hilir	3.73	7.88	40.99	1.06	33.31	69.66	5.85	8.29	35.90	4
65	Kepulauan Meranti	3.70	28.99	39.54	15.68	46.42	66.99	7.07	7.58	24.60	2
Jambi											
66	Kerinci	0.29	7.45	46.97	2.89	29.36	69.52	3.94	8.18	35.00	6
67	Merangin	0.64	9.43	42.26	2.83	48.16	70.94	7.74	7.78	25.40	6
68	Sarolangun	1.18	8.87	41.72	1.00	42.37	68.83	7.31	7.91	37.30	5
69	Batanghari	1.84	10.33	62.80	2.39	51.04	70.12	6.76	7.87	28.10	4
70	Muara Jambi	3.59	4.37	64.54	0.42	45.43	70.90	5.34	8.43	16.10	4
71	Tanjung Jabung Timur	0.57	12.58	51.13	3.21	41.98	65.69	4.78	6.74	21.50	5
72	Tanjung Jabung Barat	1.52	11.32	38.40	4.38	35.54	67.75	9.25	7.64	29.20	5
73	Tebo	0.17	6.79	44.92	3.81	51.63	69.67	9.95	7.33	24.10	6
74	Bungo	1.54	5.82	38.19	1.98	37.81	67.27	3.05	7.99	21.90	5
Sumatera Selatan											
75	Ogan Komering Ulu	1.09	12.95	38.58	2.28	42.33	67.66	2.92	8.92	24.30	5
76	Ogan Komering Ilir	0.29	15.75	40.87	2.92	49.17	68.04	8.34	7.18	22.60	5
77	Muara Enim (Liot)	0.97	13.19	58.42	0.85	50.07	68.14	5.32	7.57	14.90	5

No.	Kabupaten	NCPR	Pov	Food	Elec	Water	Life	Health	School	Stunting	Prioritas
78	Lahat	0.60	16.81	41.91	0.19	60.12	65.25	4.45	8.71	28.20	5
79	Musi Rawas	0.29	14.24	24.80	0.94	52.93	67.34	4.79	7.48	25.90	6
80	Musi Banyuasin	0.60	16.75	42.14	4.22	38.93	68.14	8.63	7.87	21.40	5
81	Banyuasin	0.16	11.47	65.40	0.96	34.29	68.36	8.77	7.36	32.80	6
82	Ogan Komering Ulu Selatan	0.38	10.98	38.62	5.95	65.46	66.24	4.77	7.87	22.50	5
83	Ogan Komering Ulu Timur	0.17	11.00	28.44	0.41	55.22	68.44	0.97	7.49	26.70	6
84	Ogan Ilir	0.52	13.58	50.08	4.99	38.55	64.72	1.80	7.75	29.50	5
85	Empat Lawang	0.47	12.44	49.36	3.90	60.75	64.32	6.34	7.76	27.70	5
86	Penukal Abab Lematang Ilir	1.59	14.53	48.55	0.39	48.92	67.70	2.42	6.89	18.60	5
87	Musi Rawas Utara	1.57	19.49	39.88	0.33	60.29	64.99	7.55	6.62	32.80	4
Bengkulu											
88	Bengkulu Selatan	0.51	21.06	36.87	0.28	56.52	67.24	1.12	8.72	30.90	5
89	Rejang Lebong	0.51	16.97	39.91	4.70	64.71	67.65	2.16	8.44	29.00	5
90	Bengkulu Utara	0.70	13.11	41.67	1.11	48.42	67.42	3.73	7.83	35.80	5
91	Kaur	0.60	21.54	50.92	3.50	64.62	65.92	7.44	7.98	23.70	4
92	Seluma	0.56	20.73	41.19	3.35	64.00	66.85	2.78	7.85	23.30	5
93	Mukomuko	0.54	12.20	44.75	1.30	42.13	65.93	4.51	8.03	33.40	5
94	Lebong	0.60	11.83	54.62	2.76	57.91	62.46	4.51	7.66	34.40	5
95	Kepahiang	0.66	15.95	30.04	1.16	52.07	67.12	1.34	8.12	29.30	5
96	Bengkulu Tengah	0.78	8.41	50.31	2.59	52.32	67.64	2.37	7.25	34.80	5
Lampung											
97	Lampung Barat	0.58	14.32	40.15	3.56	60.06	66.86	3.80	7.53	37.30	5
98	Tanggamus	0.55	13.25	31.30	2.87	62.39	67.80	2.78	7.09	37.30	5
99	Lampung Selatan	0.32	15.16	43.00	0.12	44.15	68.65	0.48	7.87	30.30	6
100	Lampung Timur	0.15	16.35	40.76	0.30	50.04	70.11	3.72	7.57	23.50	6
101	Lampung Tengah	0.13	12.90	41.64	0.38	58.98	69.28	1.82	7.40	37.00	5
102	Lampung Utara	0.10	21.55	38.14	0.20	65.90	68.48	1.58	8.43	34.90	5
103	Way Kanan	0.21	14.06	32.38	1.00	71.08	68.74	3.45	7.15	30.70	5
104	Tulang Bawang	0.17	10.09	58.83	3.90	44.96	69.41	3.41	7.69	24.40	6
105	Pesawaran	0.38	16.48	40.61	1.38	59.06	68.29	2.46	7.71	35.10	5
106	Pringsewu	0.62	11.30	31.24	0.77	39.36	69.14	0.53	7.96	25.80	6
107	Mesuji	0.18	7.66	27.36	0.00	38.45	67.49	4.79	7.00	31.70	6
108	Tulang Bawang Barat	0.10	8.11	20.68	0.14	55.77	69.35	2.08	7.34	27.20	6
109	Pesisir Barat	0.41	15.61	54.87	6.00	65.98	62.54	7.05	7.82	29.80	5
Kepulauan Bangka Belitung											
110	Bangka	4.91	5.10	22.78	1.40	29.52	70.56	2.49	8.26	27.70	3
111	Belitung	5.00	7.77	20.02	0.88	16.02	70.44	4.15	8.12	27.60	3
112	Bangka Barat	3.73	2.98	26.21	0.27	31.03	69.56	3.90	7.43	25.00	4
113	Bangka Tengah	5.00	6.07	26.02	0.85	26.46	70.49	3.98	6.97	25.60	3
114	Bangka Selatan	2.77	3.92	31.81	0.57	34.44	67.13	7.29	6.57	30.10	4
115	Belitung Timur	5.00	6.81	22.78	1.73	20.75	71.37	4.94	8.39	29.30	3
Kepulauan Riau											

No.	Kabupaten	NCPR	Pov	Food	Elec	Water	Life	Health	School	Stunting	Prioritas
116	Karimun	5.00	7.41	12.61	2.16	38.60	70.32	1.30	7.92	19.80	3
117	Bintan	5.00	6.01	19.35	0.54	35.31	70.12	1.98	8.58	19.50	3
118	Natuna	5.00	4.64	23.64	4.30	29.09	64.33	3.60	8.55	19.70	3
119	Lingga	5.00	13.84	22.86	5.12	42.81	61.14	5.18	6.35	33.20	2
120	Kepulauan Anambas	5.00	6.87	27.08	2.61	43.82	66.76	1.50	6.77	24.60	2
DKI Jakarta											
121	Kep. Seribu	5.00	12.98	69.22	0.00	2.24	68.04	0.05	8.04	23.90	3
Jawa Barat											
122	Bogor	2.42	8.57	27.20	0.00	48.48	70.70	0.56	7.57	28.50	4
123	Sukabumi	0.64	8.04	43.68	0.70	56.96	70.26	1.20	7.04	37.60	5
124	Cianjur	0.64	11.41	50.00	0.18	64.24	69.49	0.86	7.09	35.70	5
125	Bandung	1.72	7.36	38.94	0.00	30.52	73.13	0.63	8.32	38.70	5
126	Garut	0.45	11.27	55.51	0.11	57.97	70.84	0.96	7.38	43.10	5
127	Tasikmalaya	0.51	10.84	60.89	0.40	59.45	68.71	1.25	7.29	33.40	5
128	Ciamis	0.70	8.20	56.06	0.22	55.57	71.07	1.21	7.66	29.00	5
129	Kuningan	0.63	13.27	56.52	0.00	49.19	72.88	0.55	7.45	28.50	5
130	Cirebon	1.31	12.97	46.35	0.00	36.29	71.49	0.28	6.95	25.60	5
131	Majalengka	0.52	12.60	52.54	0.00	39.41	69.39	0.57	7.02	30.20	6
132	Sumedang	0.60	10.53	32.80	0.00	44.02	72.00	0.93	8.17	28.10	6
133	Indramayu	0.40	13.67	55.49	0.26	15.70	70.86	0.98	6.03	29.90	6
134	Subang	0.48	10.77	35.27	0.00	46.80	71.71	1.22	7.26	25.50	6
135	Purwakarta	0.92	9.06	40.66	0.00	47.14	70.42	0.55	8.02	30.80	5
136	Karawang	0.67	10.25	25.24	0.00	20.63	71.64	0.36	7.37	26.10	6
137	Bekasi	1.92	4.73	23.07	0.00	9.17	73.30	0.36	8.52	23.70	6
138	Bandung Barat	1.43	11.49	40.35	0.00	53.40	71.87	0.81	8.06	34.30	5
139	Pangandaran	0.66	10.00	48.31	0.36	40.40	70.56	1.44	7.52	28.10	6
Jawa Tengah											
140	Cilacap	0.50	13.94	31.45	0.43	38.97	73.24	0.77	6.67	27.20	6
141	Banyumas	1.15	17.05	29.48	0.00	47.17	73.33	0.31	7.68	24.50	5
142	Purbalingga	0.81	18.80	32.41	0.20	48.67	72.91	0.49	7.11	28.20	5
143	Banjarnegara	0.79	17.21	37.99	0.16	59.95	73.79	0.78	6.60	30.10	5
144	Kebumen	0.59	19.60	36.06	0.23	56.95	72.98	0.50	7.37	31.30	5
145	Purworejo	0.51	13.81	29.85	0.09	51.99	74.26	0.55	7.79	25.80	6
146	Wonosobo	0.56	20.32	25.37	0.11	38.02	71.30	0.80	6.84	32.50	6
147	Magelang	0.75	12.42	28.32	0.17	47.73	73.39	0.91	7.18	37.60	6
148	Boyolali	0.64	11.96	20.77	0.16	47.03	75.72	0.63	7.33	25.90	6
149	Klaten	0.69	14.15	35.66	0.00	47.06	76.62	0.28	7.99	27.20	6
150	Sukoharjo	0.61	8.75	23.04	0.00	35.16	77.49	0.20	8.78	23.80	6
151	Wonogiri	0.20	12.90	35.78	0.00	44.42	76.00	1.02	6.63	23.90	6
152	Karanganyar	0.52	12.28	24.41	0.00	44.48	77.31	0.56	7.79	22.60	6
153	Sragen	0.37	14.02	30.73	0.00	34.30	75.55	0.47	6.95	25.20	6
154	Grobogan	0.35	13.27	46.12	0.24	21.78	74.46	0.78	6.82	37.60	6

No.	Kabupaten	NCPR	Pov	Food	Elec	Water	Life	Health	School	Stunting	Prioritas
155	Blora	0.36	13.04	36.43	0.12	24.86	73.99	1.09	6.62	37.00	6
156	Rembang	0.60	18.35	44.27	0.00	27.10	74.32	0.91	6.81	32.30	6
157	Pati	0.27	11.38	30.65	0.00	29.49	75.80	0.63	7.34	31.80	6
158	Kudus	1.15	7.59	16.48	0.00	34.88	76.44	0.19	8.37	23.00	6
159	Jepara	0.63	8.12	43.34	0.00	39.99	75.68	0.53	7.31	26.20	6
160	Demak	0.48	13.41	35.45	0.00	16.78	75.27	0.68	7.47	25.90	6
161	Semarang	0.90	7.78	19.68	0.16	38.33	75.57	0.70	8.15	21.10	6
162	Temanggung	0.77	11.46	24.45	0.12	43.67	75.42	0.57	7.14	30.00	6
163	Kendal	0.76	11.10	32.83	0.06	28.57	74.24	0.59	7.05	26.70	6
164	Batang	0.76	10.80	36.64	0.00	48.55	74.50	0.69	6.80	30.90	6
165	Pekalongan	1.26	12.61	38.38	0.00	55.74	73.46	0.48	6.91	35.60	5
166	Pemalang	0.82	17.37	46.79	0.00	33.47	72.98	0.51	6.48	30.80	5
167	Tegal	0.93	9.90	36.89	0.14	46.17	71.14	0.43	6.61	34.40	5
168	Brebes	0.74	19.14	39.76	0.00	39.94	68.61	0.62	6.06	28.50	5
DI Yogyakarta											
169	Kulon Progo	0.70	20.03	42.78	0.65	42.58	75.06	0.52	8.61	23.60	6
170	Bantul	1.33	14.07	18.12	0.00	44.81	73.56	0.21	9.30	22.90	6
171	Gunung Kidul	0.19	18.65	50.94	0.15	40.80	73.82	1.31	6.81	27.90	6
172	Sleman	0.98	8.13	16.96	0.00	43.81	74.63	0.11	10.37	10.60	6
Jawa Timur											
173	Pacitan	0.30	15.42	47.15	0.15	47.60	71.31	1.48	7.10	21.10	6
174	Ponorogo	0.26	11.39	39.47	0.24	38.59	72.27	0.65	7.18	25.10	6
175	Trenggalek	0.41	12.96	43.68	0.00	60.77	73.15	0.90	7.21	24.30	6
176	Tulungagung	0.51	8.04	27.84	0.10	47.07	73.53	0.58	8.04	22.10	6
177	Blitar	0.55	9.80	36.03	0.33	52.48	72.99	0.93	7.29	23.30	6
178	Kediri	0.78	12.25	40.35	0.15	42.62	72.25	0.74	7.81	33.50	6
179	Malang	0.84	11.04	37.61	0.16	50.38	72.12	1.10	7.31	28.30	6
180	Lumajang	0.54	10.87	48.29	0.16	55.18	69.50	1.19	6.33	28.10	5
181	Jember	0.60	11.00	43.96	0.07	51.26	68.54	0.84	6.22	30.90	5
182	Banyuwangi	0.53	8.64	25.96	0.00	47.89	70.19	2.10	6.98	26.20	6
183	Bondowoso	0.42	14.54	61.90	0.00	51.15	66.04	0.91	5.48	38.30	5
184	Situbondo	0.44	13.05	50.78	0.00	53.86	68.53	1.09	6.23	30.50	5
185	Probolinggo	0.69	20.52	42.89	0.18	45.49	66.47	1.29	5.83	32.00	5
186	Pasuruan	0.52	10.34	51.63	0.06	50.14	69.90	0.84	6.84	24.20	6
187	Sidoarjo	2.84	6.23	16.50	0.00	27.61	73.71	0.17	9.67	19.00	5
188	Mojokerto	0.66	10.19	32.62	0.00	36.49	72.10	0.33	8.25	29.00	6
189	Jombang	0.63	10.48	44.54	0.00	31.17	71.87	0.34	8.10	26.20	6
190	Nganjuk	0.40	11.98	45.53	0.00	32.79	71.11	0.90	7.57	25.90	6
191	Madiun	0.33	12.28	34.45	0.15	31.28	70.77	0.78	7.50	20.70	6
192	Magetan	0.35	10.48	26.30	0.00	27.15	72.16	0.43	7.81	24.80	6
193	Ngawi	0.24	14.91	40.89	0.10	37.66	71.74	0.84	6.82	26.90	6
194	Bojonegoro	0.35	14.34	44.22	0.00	22.80	70.83	1.04	6.84	19.20	6

No.	Kabupaten	NCPR	Pov	Food	Elec	Water	Life	Health	School	Stunting	Prioritas
195	Tuban	0.39	16.87	55.61	0.49	21.63	70.80	1.24	6.69	25.30	6
196	Lamongan	0.31	14.42	27.56	0.00	15.41	71.87	0.97	7.63	23.00	6
197	Gresik	0.77	12.80	26.52	0.00	8.60	72.36	0.45	8.75	19.80	6
198	Bangkalan	0.64	21.32	64.21	0.06	47.25	69.82	0.50	5.38	43.00	4
199	Sampang	0.70	23.56	59.09	0.09	40.19	67.67	1.62	4.95	26.40	5
200	Pamekasan	1.08	16.00	67.74	0.00	44.48	67.05	0.45	6.25	42.50	4
201	Sumenep	0.80	19.62	72.14	0.26	44.61	70.71	1.30	5.36	32.30	5
Banten											
202	Pandeglang	0.46	9.74	48.81	0.16	63.79	64.04	2.26	6.73	37.80	5
203	Lebak	0.59	8.64	41.79	0.25	63.64	66.59	1.88	6.33	37.30	5
204	Tangerang	2.55	5.39	21.60	0.00	28.58	69.47	0.27	7.97	28.80	5
205	Serang	0.78	4.63	44.41	0.00	37.32	64.02	1.57	7.36	34.30	5
Bali											
206	Jembrana	1.31	5.38	22.17	0.00	36.91	71.70	1.09	7.37	25.20	6
207	Tabanan	0.59	4.92	8.91	0.00	23.15	73.03	0.44	8.19	16.20	6
208	Badung	1.48	2.06	7.04	0.00	18.01	74.53	0.23	9.64	14.90	6
209	Gianyar	0.81	4.46	1.38	0.00	23.05	73.06	0.19	8.41	22.50	6
210	Klungkung	1.38	6.29	31.57	0.17	16.34	70.45	0.41	7.08	16.60	6
211	Bangli	1.30	5.23	20.15	0.18	35.45	69.83	0.64	6.62	28.40	6
212	Karangasem	0.84	6.55	53.92	0.68	34.10	69.85	0.40	5.39	23.60	6
213	Buleleng	1.26	5.74	23.21	0.41	33.73	71.14	0.89	6.93	29.00	6
Nusa Tenggara Barat											
214	Lombok Barat	0.93	16.46	34.82	0.18	43.05	65.78	0.95	6.49	36.10	5
215	Lombok Tengah	0.66	15.31	46.92	0.26	48.66	65.28	0.68	6.36	39.30	5
216	Lombok Timur	0.83	18.28	48.40	0.11	54.66	65.01	0.63	6.76	35.10	4
217	Sumbawa	0.22	15.31	32.05	2.55	36.22	66.58	5.56	7.56	41.90	6
218	Dompu	0.26	13.43	38.50	1.10	31.90	65.89	5.54	8.24	38.30	6
219	Bima	0.33	15.10	42.39	1.76	35.98	65.40	4.81	7.72	36.60	5
220	Sumbawa Barat	0.34	15.96	41.83	0.23	27.66	66.98	2.80	8.19	32.60	6
221	Lombok Utara	0.78	32.06	39.90	0.23	53.39	66.17	1.88	6.06	37.60	4
Nusa Tenggara Timur											
222	Sumba Barat	0.63	29.28	67.05	42.40	68.52	66.20	2.24	6.99	38.00	3
223	Sumba Timur	0.67	31.03	58.15	18.34	47.82	64.12	12.94	7.31	40.10	4
224	Kupang	0.99	22.91	50.17	22.68	51.60	63.49	5.37	7.64	47.20	4
225	Timor Tengah Selatan	0.92	29.44	70.29	43.07	60.50	65.65	17.60	6.43	53.50	3
226	Timor Tengah Utara	0.59	23.52	67.96	26.71	62.02	66.19	4.73	7.37	40.80	4
227	Belu	0.69	15.95	48.48	13.14	57.78	63.42	2.22	7.27	39.30	4
228	Alor	1.37	21.67	68.73	17.59	61.68	60.47	8.90	7.80	40.20	3
229	Lembata	0.65	26.48	58.30	19.86	46.25	66.19	2.98	7.55	40.80	4
230	Flores Timur	1.23	10.75	54.88	2.36	46.27	64.45	2.60	7.32	29.90	5
231	Sikka	0.89	14.20	54.11	24.88	44.63	66.30	2.03	6.68	29.10	5
232	Ende	1.61	23.95	58.60	5.23	43.24	64.48	2.42	7.82	34.10	4

No.	Kabupaten	NCPR	Pov	Food	Elec	Water	Life	Health	School	Stunting	Prioritas
233	Ngada	0.38	12.77	42.90	14.10	48.24	67.36	2.02	8.18	35.90	5
234	Manggarai	0.96	21.91	56.96	15.78	46.52	65.84	1.62	7.23	50.30	4
235	Rote Nda	0.57	28.81	61.76	10.08	49.09	63.41	2.80	7.56	46.70	4
236	Manggarai Barat	0.46	18.86	52.14	23.05	53.51	66.19	3.90	7.15	35.00	5
237	Sumba Tengah	0.69	36.01	75.14	37.44	69.16	67.74	5.47	6.58	43.50	3
238	Sumba Barat Daya	0.72	30.13	82.23	51.16	68.49	67.76	5.13	5.77	38.70	3
239	Nageko	0.78	13.48	59.98	13.31	49.09	66.36	2.80	7.98	39.80	5
240	Manggarai Timur	0.77	26.80	73.13	46.70	73.04	67.40	8.04	6.64	24.40	3
241	Sabu Raijua	3.35	31.07	77.18	36.99	50.03	59.00	1.38	7.19	50.00	1
242	Malaka	2.07	16.52	51.93	23.81	70.22	64.29	1.96	6.80	44.60	3
Kalimantan Barat											
243	Sambas	0.53	8.59	32.90	0.66	48.85	68.17	4.90	6.71	37.10	6
244	Bengkayang	0.46	7.51	40.89	8.69	52.80	73.04	6.55	6.31	39.60	6
245	Landak	2.19	12.23	57.56	27.96	57.58	72.12	13.39	6.84	33.30	4
246	Pontianak/ Mempawah	0.84	5.94	51.30	0.74	42.37	70.32	3.36	6.55	35.10	5
247	Sanggau	0.65	4.52	34.05	12.54	42.09	70.75	15.35	6.75	43.00	6
248	Ketapang	1.22	11.02	42.36	6.64	48.32	70.52	21.42	7.23	33.00	5
249	Sintang	1.18	10.20	33.99	25.02	46.29	71.11	26.91	6.65	44.10	5
250	Kapuas Hulu	1.15	9.45	46.71	5.02	33.56	71.95	31.24	6.91	40.30	5
251	Sekadau	1.48	6.46	40.19	14.61	43.37	70.98	11.78	6.38	44.10	5
252	Melawai	1.84	12.54	63.43	20.24	45.64	72.39	20.36	6.29	37.90	4
253	Kayong Utara	0.52	9.89	37.20	3.47	52.84	67.46	15.80	5.75	33.80	5
254	Kubu Raya	0.98	5.26	35.86	0.75	45.18	69.80	8.55	7.23	34.80	5
Kalimantan Tengah											
255	Kotawaringin Barat	3.23	4.52	24.88	1.09	16.04	70.34	11.31	8.32	36.90	5
256	Kotawaringin Timur	1.42	6.24	26.76	2.84	23.35	69.70	18.15	7.88	41.80	5
257	Kapuas	0.35	5.32	58.53	7.30	35.01	68.59	12.46	7.85	44.10	6
258	Barito Selatan	1.54	4.44	48.38	3.46	27.00	66.78	17.31	8.78	42.00	5
259	Barito Utara	1.19	5.21	29.54	4.56	27.61	71.27	13.79	7.96	37.20	6
260	Sukamara	1.95	3.36	19.72	3.17	20.87	71.41	15.54	7.54	27.90	6
261	Lamandau	0.52	3.52	33.70	4.94	39.94	69.28	13.18	7.86	37.60	6
262	Seruyan	1.76	7.46	28.76	2.08	36.19	69.23	26.18	7.77	33.50	5
263	Katingan	0.71	5.78	48.98	3.10	26.67	65.53	27.56	8.30	34.40	6
264	Pulang Pisau	0.22	5.19	42.26	0.78	30.33	67.86	18.00	7.75	35.40	6
265	Gunung Mas	4.20	5.83	49.75	18.84	27.53	70.15	26.36	8.97	48.10	3
266	Barito Timur	1.29	7.17	29.93	1.25	40.30	67.97	8.01	8.69	35.70	5
267	Murung Raya	1.80	5.88	45.35	13.88	41.09	69.39	33.81	7.33	46.70	4
Kalimantan Selatan											
268	Tanah Laut	0.36	4.60	29.71	0.15	43.16	68.89	3.78	7.44	40.60	6
269	Kota Baru	0.77	4.38	29.59	3.53	25.62	68.72	11.23	7.28	46.70	6
270	Banjar	0.57	2.96	26.84	0.98	30.90	66.38	2.33	7.31	26.10	6
271	Barito Kuala	0.25	5.13	50.42	1.39	37.51	65.33	3.22	6.95	36.30	6

No.	Kabupaten	NCPR	Pov	Food	Elec	Water	Life	Health	School	Stunting	Prioritas
272	Tapin	0.16	3.77	37.11	1.28	26.60	69.77	3.26	7.47	45.70	6
273	Hulu Sungai Selatan	0.25	5.80	45.62	1.59	27.32	65.39	1.95	7.67	39.90	6
274	Hulu Sungai Tengah	0.26	6.09	40.14	0.13	38.34	65.30	2.04	7.96	39.10	6
275	Hulu Sungai Utara	0.50	6.65	29.64	0.38	26.73	62.94	1.29	7.57	39.40	6
276	Tabalong	0.62	6.09	39.07	0.00	26.09	69.95	3.10	8.59	36.50	6
277	Tanah Bumbu	0.94	4.99	20.89	0.00	16.45	69.44	2.24	7.69	17.90	6
278	Balangan	0.20	5.68	41.11	2.23	20.58	67.19	2.83	7.15	35.30	6
Kalimantan Timur											
279	Pasir	1.80	9.28	57.46	1.50	19.93	72.05	11.32	8.05	31.70	5
280	Kutai Barat	2.16	8.72	27.62	6.53	32.71	72.37	20.91	8.05	31.50	5
281	Kutai	1.23	7.57	52.25	0.41	7.78	71.68	14.45	8.88	30.90	6
282	Kutai Timur	2.87	9.29	18.22	1.85	9.85	72.51	18.87	8.95	32.40	5
283	Berau	1.53	5.41	20.61	2.15	14.93	71.44	24.14	9.10	30.40	6
284	Penajam Paser Utara	1.41	7.63	10.51	0.34	15.75	70.82	5.07	7.96	31.80	6
285	Mahakam Ulu	1.61	11.29	53.94	6.16	21.45	71.25	85.49	7.85	30.50	5
286	Malinau	1.09	8.06	11.59	5.33	17.67	71.39	56.15	8.83	31.60	6
287	Bulungan	0.91	9.93	20.28	1.15	17.57	72.51	15.84	8.74	27.00	6
288	Tana Tidung	2.40	6.63	20.53	0.89	26.02	71.33	24.36	7.61	42.30	5
289	Nunukan	1.14	6.22	29.92	5.02	18.52	71.25	19.95	7.54	39.30	6
Sulawesi Utara											
290	Bolaang Mongondow	0.16	8.02	48.24	0.00	45.53	68.61	5.73	7.71	35.80	6
291	Minahasa	1.02	7.90	35.72	0.57	35.77	70.46	1.74	9.76	37.60	6
292	Kep.Sangihe Talaud	4.32	11.80	62.98	6.49	55.11	69.35	0.86	8.57	22.20	2
293	Kepulauan Talaud	2.52	9.77	43.69	2.46	50.87	69.48	2.37	8.84	37.50	4
294	Minahasa Selatan	0.78	9.78	55.58	0.00	49.36	69.24	2.45	9.30	35.90	5
295	Minahasa Utara	0.97	7.46	37.29	0.44	34.04	70.86	1.75	9.96	29.70	6
296	Bolaang Mongondow Utara	0.30	8.89	54.21	1.43	52.90	66.98	7.52	8.82	36.80	5
297	Kep. Siau Tagulandang Biaro	5.00	10.33	60.46	3.06	45.79	69.85	0.55	9.29	30.40	2
298	Minahasa Tenggara	0.70	14.08	53.58	0.00	47.10	69.58	2.48	9.21	24.60	5
299	Bolaang Mongondow Selatan	1.31	14.16	53.11	0.29	43.85	64.03	9.67	7.68	51.30	4
300	Bolaang Mongondow Timur	0.83	6.20	35.97	0.22	40.06	67.32	4.63	7.65	22.30	6
Sulawesi Tengah											
301	Banggai Kepulauan	5.00	15.92	38.60	12.70	39.04	64.53	5.72	7.93	37.30	2
302	Banggai	0.46	9.20	33.31	2.18	47.27	70.02	12.35	8.17	31.50	6
303	Morowali	0.60	14.55	29.62	2.69	37.88	68.07	5.05	8.84	34.00	6
304	Poso	0.37	17.16	24.60	1.25	38.27	70.16	7.13	9.01	35.40	6
305	Donggala	0.81	18.17	39.24	8.42	50.43	65.89	7.30	7.74	39.50	5
306	Toli-Toli	0.83	13.30	38.13	6.59	33.97	64.12	3.20	8.23	36.90	5
307	Buol	1.52	16.65	43.08	6.35	40.02	67.00	6.97	8.69	41.30	4
308	Parigi Moutong	0.41	17.55	34.88	8.05	41.97	63.19	3.51	7.27	34.40	5
309	Tojo Una-Una	1.60	18.15	41.55	9.37	44.83	64.07	6.64	8.10	38.40	4
310	Sigi	0.48	12.66	37.10	5.62	49.98	68.72	5.81	8.28	36.40	5

No.	Kabupaten	NCPR	Pov	Food	Elec	Water	Life	Health	School	Stunting	Prioritas
311	Banggai Laut	5.00	16.17	37.57	1.52	43.32	63.62	1.37	8.11	33.40	2
312	Morowali Utara	0.61	15.73	28.42	6.07	44.29	68.34	15.71	8.53	36.50	5
Sulawesi Selatan											
313	Selayar	1.17	13.28	60.67	2.03	40.28	67.82	2.36	7.41	30.20	5
314	Bulukumba	0.46	7.97	35.31	0.51	43.38	66.96	1.39	7.70	31.80	6
315	Bantaeng	0.33	9.66	17.87	0.81	28.71	69.90	1.20	7.34	38.10	6
316	Jeneponto	0.34	15.40	56.93	0.00	28.36	65.65	1.81	6.91	35.90	5
317	Takalar	0.52	9.24	22.92	0.14	26.28	66.38	0.90	7.42	33.30	6
318	Gowa	0.34	8.42	33.30	0.40	30.64	69.95	2.50	8.18	36.80	6
319	Sinjai	0.55	9.24	22.51	1.96	45.53	66.61	1.36	7.68	43.70	6
320	Maros	0.28	11.14	18.12	0.49	27.65	68.60	2.44	7.82	41.20	6
321	Pangkajene Kepulauan	0.62	16.22	57.23	0.59	31.42	65.86	1.82	7.47	41.90	5
322	Barru	0.42	9.71	15.48	1.98	33.17	68.30	1.11	8.18	31.00	6
323	Bone	0.21	10.28	26.57	3.62	44.90	66.22	1.89	7.13	40.10	6
324	Soppeng	0.22	8.29	35.95	3.05	42.57	68.72	2.90	7.88	38.70	6
325	Wajo	0.14	7.38	25.18	0.88	32.95	66.52	3.02	7.06	36.80	6
326	Sidenreng Rappang	0.14	5.32	29.30	0.45	35.09	68.82	3.44	7.86	31.30	6
327	Pinrang	0.16	8.46	31.06	0.34	36.22	68.68	2.83	7.87	38.10	6
328	Enrekang	0.79	13.16	32.23	0.00	56.15	70.38	2.88	8.52	45.90	5
329	Luwu	0.32	14.01	32.69	6.76	47.59	69.60	5.26	8.28	39.10	6
330	Tana Toraja	0.55	12.62	36.24	7.68	55.64	72.56	3.18	8.20	43.00	5
331	Luwu Utara	0.48	14.33	19.87	2.14	43.61	67.61	12.49	7.73	30.80	6
332	Luwu Timur	0.38	7.66	19.82	5.11	34.64	69.79	10.44	8.34	22.10	6
333	Toraja Utara	0.48	14.41	40.52	0.65	51.71	72.94	1.62	7.95	42.40	5
Sulawesi Tenggara											
334	Buton	1.54	13.46	18.77	2.87	60.79	67.30	3.00	8.11	38.30	4
335	Muna	2.24	14.85	16.55	0.38	53.31	69.77	3.24	8.28	31.80	4
336	Konawe/Kab Kendari	0.29	15.65	54.03	1.52	36.04	69.52	6.28	9.05	29.60	6
337	Kolaka	0.52	13.78	22.41	3.35	30.75	70.05	3.50	8.63	31.90	6
338	Konawe Selatan	0.55	11.14	20.55	1.65	42.38	69.98	7.96	7.60	37.40	6
339	Bombana	0.58	12.36	28.18	4.23	34.55	67.82	7.20	7.19	40.10	6
340	Wakatobi	1.52	16.19	22.73	1.23	37.08	69.59	0.93	7.85	26.40	5
341	Kolaka Utara	2.30	16.24	30.08	13.48	39.03	69.74	3.19	7.77	36.50	4
342	Buton Utara	0.58	15.58	26.16	15.17	42.79	70.38	3.38	8.08	44.50	5
343	Konawe Utara	0.46	13.93	24.34	2.03	54.59	68.69	13.55	8.81	29.90	6
344	Kolaka Timur	0.44	15.64	11.94	1.66	28.42	71.66	6.10	8.61	37.30	6
345	Konawe Kepulauan	2.01	18.10	17.16	11.02	45.04	67.88	5.50	9.08	43.60	4
346	Muna Barat	5.00	16.24	13.31	7.78	20.97	69.79	1.66	7.58	31.70	3
347	Buton Tengah	5.00	18.35	23.64	2.88	5.94	67.17	1.69	4.43	48.80	2
348	Buton Selatan	5.00	15.99	22.56	24.05	21.97	67.17	0.97	7.04	43.50	2
Gorontalo											
349	Boalemo	0.89	21.85	28.53	7.52	48.25	67.86	3.44	6.78	32.40	5

No.	Kabupaten	NCPR	Pov	Food	Elec	Water	Life	Health	School	Stunting	Prioritas
350	Gorontalo	0.69	17.65	21.77	4.15	48.37	66.69	1.99	7.66	32.40	5
351	Pohuwato	1.14	21.27	31.45	1.58	13.98	62.86	7.61	7.54	33.20	5
352	Bone Bolango	2.01	17.81	24.05	1.64	35.42	67.71	3.31	8.44	25.60	5
353	Gorontalo Utara	0.44	19.23	36.66	3.84	39.20	65.12	4.22	7.29	27.40	5
Sulawesi Barat											
354	Majene	1.73	13.94	41.94	6.17	39.63	60.79	2.33	8.85	43.90	4
355	Polewali Mamasa	0.39	16.05	45.51	0.54	45.28	61.76	2.88	7.33	38.70	5
356	Mamasa	0.60	13.51	53.96	5.67	80.88	70.48	7.24	8.06	44.10	4
357	Mamuju	0.45	6.88	27.97	5.25	44.77	66.65	3.79	7.70	38.20	6
358	Mamuju Utara	0.88	4.84	25.57	7.51	38.90	65.33	8.00	7.46	39.90	5
359	Mamuju Tengah	0.56	6.95	27.30	9.83	44.55	67.52	3.19	7.39	39.10	6
Maluku											
360	Maluku Tenggara Barat	5.00	27.47	58.08	15.95	54.01	63.06	18.29	9.17	31.70	1
361	Maluku Tenggara	2.08	23.87	9.15	16.53	53.25	64.61	8.03	9.38	26.60	4
362	Maluku Tengah	1.24	21.20	41.44	1.59	50.88	66.06	10.15	9.46	32.00	4
363	Buru	0.68	17.40	27.15	5.51	47.68	66.03	13.93	8.66	31.80	5
364	Kepulauan Aru	5.00	27.13	34.62	42.03	53.89	62.34	15.46	8.39	34.20	1
365	Seram Bagian Barat	1.51	25.49	38.68	12.62	65.58	60.96	7.19	8.77	29.10	3
366	Seram Bagian Timur	2.09	23.59	50.45	16.03	62.95	58.56	6.33	7.87	41.10	3
367	Maluku Barat Daya	2.76	30.18	45.79	23.88	72.53	61.62	15.19	8.32	34.80	2
368	Buru Selatan	2.38	16.83	44.97	12.99	63.71	65.74	12.85	7.48	31.00	3
Maluku Utara											
369	Halmahera Barat	2.67	8.74	28.73	1.70	61.06	65.55	3.90	7.89	23.60	4
370	Halmahera Tengah	1.11	14.15	23.58	11.82	58.61	62.80	10.35	8.42	32.70	4
371	Kepulauan Sula	2.74	8.59	50.39	15.56	48.78	62.60	8.20	8.74	39.40	3
372	Halmahera Selatan	1.23	4.10	19.86	8.69	52.02	65.20	10.07	7.48	28.40	5
373	Halmahera Utara	1.15	4.22	27.77	0.87	48.04	68.94	6.45	8.34	16.90	6
374	Halmahera Timur	0.56	15.25	28.41	3.08	54.35	67.85	17.34	7.84	24.20	5
375	Pulau Morotai	0.65	7.07	42.75	8.00	57.90	66.28	7.09	6.68	29.00	5
376	Pulau Taliabu	3.61	7.17	35.57	35.02	68.36	61.32	13.35	7.48	16.60	2
Papua Barat											
377	Fak-Fak	5.00	25.96	57.36	4.68	34.79	67.95	100.00	9.53	31.30	1
378	Kaimana	5.00	17.22	13.61	25.48	36.33	63.99	38.53	9.37	31.10	2
379	Teluk Wondama	5.00	36.37	25.82	16.58	57.80	59.26	15.33	9.36	38.60	1
380	Teluk Bintuni	5.00	34.32	26.26	6.30	34.26	59.83	67.05	8.72	24.90	1
381	Manokwari	2.22	24.32	19.20	6.69	51.57	68.00	5.88	9.42	36.80	4
382	Sorong Selatan	5.00	19.66	41.67	13.24	34.52	65.63	16.46	8.17	36.80	2
383	Sorong	2.67	32.86	26.02	9.97	27.85	65.52	64.13	8.78	28.40	3
384	Raja Ampat	3.19	20.00	20.22	11.10	42.63	64.26	24.26	8.64	36.90	3
385	Tambrauw	5.00	35.99	42.91	7.18	65.65	59.29	100.00	6.95	37.30	1
386	Maybrat	5.00	34.87	21.68	6.02	73.60	64.80	100.00	8.95	20.50	1
387	Manokwari Selatan	1.19	34.02	39.12	10.97	60.30	66.96	100.00	7.42	39.50	3

No.	Kabupaten	NCPR	Pov	Food	Elec	Water	Life	Health	School	Stunting	Prioritas
388	Pegunungan Arfak	4.00	39.23	50.27	72.79	56.07	66.72	55.55	4.68	43.50	I
Papua											
389	Merauke	0.28	10.81	22.54	5.30	32.97	66.56	65.52	7.72	17.60	6
390	Jayawijaya	0.66	38.62	30.76	42.07	42.70	58.67	4.34	5.60	39.00	3
391	Jayapura	3.28	13.01	36.13	2.93	36.75	66.47	7.79	8.74	27.90	4
392	Nabire	0.55	25.38	30.34	7.36	25.36	67.55	6.49	8.89	31.40	5
393	Yapen Waropen/ Kep. Yapen	2.94	26.82	58.67	29.60	39.92	68.71	10.04	8.12	41.90	3
394	Biak Namfor	5.00	25.44	56.00	1.36	30.18	67.87	38.77	8.85	34.20	2
395	Paniai	0.66	37.40	54.53	68.03	58.51	65.70	65.26	3.14	42.30	2
396	Puncak Jaya	5.00	36.01	60.55	85.09	72.22	64.41	11.18	4.25	27.80	I
397	Mimika	5.00	14.89	36.46	1.85	6.35	71.93	2.36	8.89	32.20	3
398	Boven Digoel	3.21	19.90	37.86	8.37	39.28	58.77	50.55	8.08	31.80	2
399	Mappi	5.00	25.75	67.23	73.14	62.36	64.30	40.43	5.83	31.40	I
400	Asmat	5.00	27.16	74.20	18.71	48.54	56.32	79.77	4.31	25.90	I
401	Yahukimo	3.36	39.33	52.10	97.09	81.44	65.32	41.85	2.78	34.40	I
402	Pegunungan Bintang	5.00	30.60	69.10	65.78	44.15	63.90	49.48	4.88	39.30	I
403	Tolikara	3.14	32.73	75.48	88.93	86.42	65.10	24.68	2.62	41.00	I
404	Sarmi	5.00	13.75	37.88	18.15	44.49	65.82	100.00	8.47	35.70	I
405	Keerom	3.31	16.69	20.18	4.46	34.36	66.18	26.02	7.32	26.60	3
406	Waropen	2.98	30.82	39.16	6.97	55.81	65.82	27.12	7.89	28.10	2
407	Supiori	5.00	37.40	45.35	25.79	40.95	65.33	3.17	7.83	38.10	I
408	Membramo Raya	5.00	29.88	71.73	56.12	60.32	56.90	100.00	5.42	29.00	I
409	Nduga	5.00	37.29	77.33	93.51	98.75	54.60	69.14	1.57	37.80	I
410	Lanny Jaya	5.00	39.60	42.77	96.91	98.23	65.65	14.39	3.71	28.60	I
411	Mamberamo Tengah	5.00	36.38	22.34	61.08	100.00	62.92	34.97	2.10	26.00	I
412	Yalimo	5.00	34.97	23.33	14.18	73.28	64.94	22.60	2.58	33.20	I
413	Puncak	5.00	37.46	89.55	84.85	33.55	65.13	42.62	2.25	29.80	I
414	Dogiyai	5.00	30.36	60.68	96.40	88.03	65.12	26.24	4.47	43.90	I
415	Intan Jaya	5.00	42.23	91.10	88.94	96.98	65.09	86.18	1.40	45.50	I
416	Deiyai	5.00	43.63	55.44	55.35	59.74	64.63	12.45	1.95	37.70	I

Keterangan:

NCPR : Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan bersih sereal

Pov : Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan

Food : Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran

Elec : Persentase rumah tangga tanpa akses listrik

Water : Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih

Life : Angka harapan hidup pada saat lahir

Health : Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk

School : Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun

Stunting : Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (*stunting*)

Lampiran 2. Data Indikator Individu dan Prioritas Ketahanan Pangan Komposit Wilayah Kota

No.	Kabupaten	Pov	Food	Elec	Water	Life	Health	School	Stunting	Prioritas
Aceh										
1	Kota Banda Aceh	7.44	43.09	0.10	0.82	70.96	0.02	11.86	25.10	6
2	Kota Sabang	17.66	58.71	0.00	9.39	70.09	0.48	11.05	29.80	4
3	Kota Langsa	11.24	49.93	0.13	15.00	69.06	0.21	10.95	26.70	5
4	Kota Lhokseumawe	12.32	51.14	0.00	11.97	71.14	0.06	10.78	25.20	5
5	Kota Subulussalam	19.71	59.43	1.16	47.90	63.56	1.00	8.06	47.40	1
Sumatera Utara										
6	Kota Sibolga	13.69	55.17	0.65	9.96	68.05	0.07	9.91	20.90	5
7	Kota Tanjung Balai	14.46	63.26	0.39	7.34	62.28	0.16	9.28	29.80	3
8	Kota Pematang Siantar	10.10	51.81	0.00	10.69	72.63	0.04	11.45	22.70	6
9	Kota Tebing Tinggi	11.90	56.44	0.49	22.02	70.28	0.04	10.10	27.00	4
10	Kota Medan	9.11	47.68	0.00	4.44	72.40	0.04	11.06	8.40	6
11	Kota Binjai	6.75	53.42	0.23	24.92	71.75	0.04	10.73	29.70	5
12	Kota Padang Sidempuan	8.25	54.50	0.30	38.08	68.41	0.18	10.94	35.70	4
13	Kota Gunung Sitoli	21.66	55.17	1.73	34.08	70.42	0.57	8.19	35.80	2
Sumatera Barat										
14	Kota Padang	4.74	47.54	0.32	12.41	73.20	0.17	11.29	22.60	6
15	Kota Solok	3.66	51.97	0.74	2.46	72.92	0.10	11.17	31.90	6
16	Kota Sawah Lunto	2.01	54.25	1.08	19.17	69.39	0.75	10.22	26.30	5
17	Kota Padang Panjang	6.17	51.22	0.28	8.83	72.46	0.06	11.21	29.60	6
18	Kota Bukit Tinggi	5.35	46.61	0.00	7.33	73.69	0.02	11.65	24.50	6
19	Kota Payakumbuh	5.88	50.81	1.10	8.17	73.13	0.15	10.55	28.00	6
20	Kota Pariaman	5.20	55.47	1.15	24.21	69.67	0.13	10.47	25.90	5
Riau										
21	Kota Pekanbaru	3.05	46.20	0.00	7.37	71.75	0.14	10.94	27.70	6
22	Kota Dumai	4.57	50.64	0.16	16.65	70.37	1.00	9.75	30.10	5
Jambi										
23	Kota Jambi	8.84	46.95	0.06	14.34	72.33	0.05	10.14	21.90	6
24	Kota Sungai Penuh	2.78	54.75	0.04	11.22	71.71	1.00	10.16	27.60	5
Sumatera Selatan										
25	Kota Palembang	11.40	48.51	0.00	4.22	70.10	0.06	9.79	14.50	6
26	Kota Prabumulih	11.42	52.20	1.11	47.76	69.67	0.28	9.41	19.30	4
27	Kota Pagar Alam	8.89	54.93	2.27	59.74	65.87	1.00	9.58	26.50	2
28	Kota Lubuk Linggau	13.12	51.75	0.13	54.29	68.64	0.42	9.46	18.90	3
Bengkulu										
29	Kota Bengkulu	19.18	40.89	0.00	24.92	69.52	0.07	11.63	23.50	5
Lampung										
30	Kota Bandar Lampung	9.94	48.04	0.00	14.77	70.84	0.09	10.22	33.40	5
31	Kota Metro	9.89	44.17	0.25	37.29	71.13	0.06	10.63	26.60	5
Kep. Bangka Belitung										
32	Kota Pangkal Pinang	4.80	43.92	0.00	10.42	72.64	0.11	9.44	26.70	6

No.	Kabupaten	Pov	Food	Elec	Water	Life	Health	School	Stunting	Prioritas
Kepulauan Riau										
33	Kota Batam	4.81	47.46	0.30	2.39	73.19	0.44	10.79	20.70	6
34	Kota Tanjung Pinang	9.29	50.44	0.36	20.44	71.84	0.15	10.07	20.80	5
DKI Jakarta										
35	Kota Jakarta Selatan	3.14	38.28	0.00	15.48	73.84	0.01	11.20	17.80	6
36	Kota Jakarta Timur	3.31	44.70	0.00	10.74	74.18	0.02	11.09	25.70	6
37	Kota Jakarta Pusat	3.78	41.71	0.00	7.14	73.83	0.00	10.60	29.20	6
38	Kota Jakarta Barat	3.45	37.41	0.00	7.83	73.37	0.02	9.99	20.40	6
39	Kota Jakarta Utara	5.59	38.22	0.00	2.24	72.99	0.02	10.19	23.70	6
Jawa Barat										
40	Kota Bogor	7.11	44.68	0.00	19.78	73.01	0.04	9.59	25.00	6
41	Kota Sukabumi	8.48	48.76	0.34	27.51	71.95	0.03	9.42	23.10	5
42	Kota Bandung	4.17	41.48	0.00	14.86	73.86	0.02	10.15	25.80	6
43	Kota Cirebon	9.66	47.92	0.00	5.48	71.86	0.02	9.58	26.50	6
44	Kota Bekasi	4.79	44.24	0.00	17.60	74.63	0.04	10.49	15.00	6
45	Kota Depok	2.34	41.68	0.00	23.66	74.04	0.05	10.46	14.90	6
46	Kota Cimahi	5.76	47.92	0.00	20.92	73.61	0.03	10.86	25.60	6
47	Kota Tasikmalaya	14.80	48.94	0.00	33.77	71.48	0.10	9.28	38.20	4
48	Kota Banjar	7.06	50.16	0.00	26.18	70.39	0.15	8.65	28.00	5
Jawa Tengah										
49	Kota Magelang	8.75	44.54	0.11	11.60	76.66	0.01	9.80	27.90	6
50	Kota Surakarta	10.65	41.70	0.00	18.89	77.06	0.01	9.78	22.10	6
51	Kota Salatiga	5.07	42.61	0.00	18.04	76.98	0.05	9.93	28.10	6
52	Kota Semarang	4.62	39.95	0.11	10.44	77.21	0.05	9.60	21.00	6
53	Kota Pekalongan	7.47	54.23	0.00	36.45	74.19	0.04	8.71	31.80	5
54	Kota Tegal	8.11	43.92	0.00	35.82	74.23	0.03	7.90	24.20	5
DI Yogyakarta										
55	Kota Yogyakarta	7.64	40.76	0.00	31.46	74.35	0.01	11.09	23.00	6
Jawa Timur										
56	Kota Kediri	8.49	44.53	0.00	34.28	73.69	0.04	9.52	25.60	5
57	Kota Blitar	8.03	45.74	0.00	46.05	73.17	0.05	9.46	15.50	5
58	Kota Malang	4.17	37.85	0.00	14.58	72.77	0.04	9.77	27.40	6
59	Kota Probolinggo	7.84	40.79	0.00	20.60	69.86	0.06	8.13	30.40	5
60	Kota Pasuruan	7.53	52.46	0.00	20.84	71.02	0.06	8.84	33.40	5
61	Kota Mojokerto	5.73	44.15	0.00	18.65	72.86	0.04	9.77	10.30	6
62	Kota Madiun	4.94	42.74	0.00	7.71	72.48	0.02	9.90	18.30	6
63	Kota Surabaya	5.39	39.88	0.00	2.70	73.88	0.04	9.45	22.80	6
64	Kota Batu	4.31	49.82	0.00	41.39	72.25	0.32	8.68	35.10	5
Banten										
65	Kota Tangerang	4.95	46.28	0.00	13.82	71.38	0.04	9.86	23.30	6
66	Kota Cilegon	3.52	49.99	0.00	18.44	66.32	0.15	9.07	20.80	5
67	Kota Serang	5.57	52.85	0.18	28.75	67.38	0.16	8.32	31.70	4

No.	Kabupaten	Pov	Food	Elec	Water	Life	Health	School	Stunting	Prioritas
68	Kota Tangerang Selatan	1.76	38.78	0.00	23.91	72.16	0.03	11.24	23.90	6
Bali										
69	Kota Denpasar	2.27	38.33	0.00	3.12	74.17	0.03	10.47	9.50	6
Nusa Tenggara Barat										
70	Kota Mataram	9.55	44.44	0.22	12.45	70.98	0.03	8.28	37.80	5
71	Kota Bima	9.27	50.33	0.21	21.40	69.58	0.56	9.94	36.30	4
Nusa Tenggara Timur										
72	Kota Kupang	9.81	44.13	0.63	32.08	68.58	0.18	10.82	36.40	5
Kalimantan Barat										
73	Kota Pontianak	5.31	46.70	0.00	30.96	72.17	0.04	9.64	28.40	5
74	Kota Singkawang	5.42	49.05	0.74	33.15	71.13	0.46	7.47	31.10	4
Kalimantan Tengah										
75	Kota Palangka Raya	3.62	44.80	0.00	10.11	73.13	1.00	10.24	33.80	6
Kalimantan Selatan										
76	Kota Banjarmasin	4.19	47.88	0.34	4.45	70.55	0.02	9.46	31.50	6
77	Kota Banjar Baru	4.68	47.61	0.00	20.78	71.50	0.50	10.23	29.10	5
Kalimantan Timur										
78	Kota Balikpapan	2.82	41.81	0.00	3.78	73.97	0.17	9.80	30.20	6
79	Kota Samarinda	4.77	41.71	0.00	2.00	73.71	0.23	10.07	28.80	6
80	Kota Bontang	5.16	42.54	0.09	3.49	73.72	0.18	10.43	32.40	6
Kalimantan Utara										
81	Kota Tarakan	6.32	49.05	0.25	5.12	73.85	0.31	9.84	32.20	6
Sulawesi Utara										
82	Kota Manado	5.46	49.24	0.00	7.83	71.34	0.06	10.68	27.30	6
83	Kota Bitung	6.62	53.31	0.00	14.75	70.54	0.41	9.97	29.90	5
84	Kota Tomohon	6.47	47.97	0.00	28.89	71.18	0.20	10.51	13.40	6
85	Kota Kotamobago	5.90	48.67	0.00	17.30	69.72	0.15	9.55	30.70	5
Sulawesi Tengah										
86	Kota Palu	6.74	40.71	0.16	13.77	69.93	0.14	10.62	36.80	6
Sulawesi Selatan										
87	Kota Makassar	4.59	39.93	0.11	6.72	71.51	0.02	10.08	25.20	6
88	Kota Pare Pare	5.70	47.70	0.33	12.66	70.69	0.12	10.19	35.70	6
89	Kota Palopo	8.78	48.13	0.00	11.84	70.30	0.34	10.79	32.80	5
Sulawesi Tenggara										
90	Kota Kendari	5.01	41.71	0.24	13.88	73.02	0.16	11.47	37.10	6
91	Kota Bau-Bau	8.39	41.41	0.09	16.79	70.50	0.44	9.95	33.70	5
Gorontalo										
92	Kota Gorontalo	5.70	40.14	0.00	12.18	71.79	0.08	10.20	36.20	6
Maluku										
93	Kota Ambon	4.46	46.48	0.68	30.40	69.92	0.26	11.35	22.10	5
94	Kota Tual	24.00	49.60	5.66	43.49	64.61	0.69	10.11	30.30	1
Maluku Utara										

No.	Kabupaten	Pov	Food	Elec	Water	Life	Health	School	Stunting	Prioritas
95	Kota Ternate	2.73	42.20	0.00	14.89	70.27	0.12	11.08	24.40	6
96	Kota Tidore Kepulauan	5.45	55.88	0.00	50.30	68.64	1.00	9.57	17.50	3
Papua Barat										
97	Kota Sorong	17.78	42.23	0.43	9.89	69.67	1.00	10.96	32.70	4
Papua										
98	Kota Jayapura	11.46	44.63	0.12	12.50	70.00	0.91	9.55	31.60	5

Keterangan:

Pov : Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan

Food : Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran

Elec : Persentase rumah tangga tanpa akses listrik

Water : Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih

Life : Angka harapan hidup pada saat lahir

Health : Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk

School : Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun

Stunting : Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (*stunting*)



Badan Ketahanan Pangan
Kementerian Pertanian
Jl. Harsono RM No. 3, Ragunan
Jakarta 12550 INDONESIA
Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
Telp : (62) 21 – 7816652, 78840424
Fax : (62) 21 – 7816652, 78840424
[http : bkp.pertanian.go.id](http://bkp.pertanian.go.id)